

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

2025



**Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo**

Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama Tahun 2025, yang mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta mendukung pengambilan kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Gorontalo, Maret 2026
Kepala Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo



FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197707151996121001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2025 ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, analisis capaian, tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 serta mengacu pada Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Secara singkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran Berdasarkan Renstra 2023-2026 yaitu

a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP

Capaian realisasi indikator kinerja *Nilai SAKIP* Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,86 (BB). Capaian tersebut, apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 74,88, menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan terlampaui secara signifikan.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten pada seluruh tahapan manajemen kinerja. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 79,46, capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan konsistensi kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,41, capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,45 poin, yang mencerminkan penguatan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Nilai SAKIP tercatat sebesar 79,86. Angka ini melampaui target Renstra 2023-2026 yang ditetapkan sebesar 74,88, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,65 persen.

Target nasional Nilai SAKIP diarahkan pada kategori AA (Sangat Memuaskan) sebagai standar kinerja tertinggi dalam penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah. Capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target nasional tersebut, capaian OPD belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, namun telah menunjukkan penerapan SAKIP yang sangat baik dan menjadi modal penting untuk peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan menuju kategori yang lebih tinggi.

b. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Koperasi Berkualitas* Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 18 koperasi, atau telah mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 20 koperasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk memenuhi target secara keseluruhan.

Capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 2 koperasi atau 10% dibandingkan dengan capaian 2024 dan 18,2% dibandingkan tahun 2023. Capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan dengan jumlah yang sama, yang dipengaruhi oleh hasil penilaian Kesehatan koperasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Jumlah Koperasi Berkualitas tercatat sebanyak 18 koperasi. Apabila dibandingkan dengan target Renstra yang ditetapkan sebesar 20 koperasi, tingkat capaian kinerja mencapai 90 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi telah berjalan dengan baik.

Indikator jumlah koperasi berkualitas tahun 2025 diukur berdasarkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas sesuai ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM. Hingga tahun 2025, belum terdapat target nasional kuantitatif yang

ditetapkan secara seragam, sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra daerah serta tren peningkatan kualitas koperasi pada tahun sebelumnya. Upaya peningkatan jumlah koperasi berkualitas dilakukan melalui pendampingan intensif bagi koperasi binaan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi melalui pelatihan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan dan tata kelola, mempercepat pemenuhan kriteria koperasi berkualitas, dan mendorong pencapaian target pada periode berikutnya

c. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah UKM yang Berdaya Saing* pada tahun 2025 tercatat sebanyak 43 UKM. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 UKM, capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum sepenuhnya mencapai target, dengan tingkat pencapaian sekitar 53,75 persen.

Belum optimalnya capaian indikator ini dipengaruhi oleh pemenuhan kriteria UKM berdaya saing, keterbatasan kapasitas sebagian UKM dalam memenuhi standar yang ditetapkan, serta proses pemutakhiran data dan evaluasi UKM pada tahun berjalan. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh mencerminkan UKM yang telah memenuhi kriteria berdaya saing.

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah UKM yang Berdaya Saing* pada tahun 2025 mencapai 43 UKM. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga sebesar 43 UKM, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stabil, tanpa perubahan jumlah UKM berdaya saing.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 50 UKM, capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 7 UKM. Penurunan tersebut mencerminkan perbedaan jumlah UKM yang memenuhi kriteria berdaya saing pada tahun berjalan, seiring dengan dinamika usaha UKM, serta proses pemutakhiran data.

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Jumlah UKM yang Berdaya Saing tercatat sebanyak 43 UKM. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 UKM, tingkat capaian kinerja mencapai 53,75 persen.

Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Kebijakan nasional tidak menetapkan angka “jumlah UKM berdaya saing” per provinsi, melainkan arah kebijakan dan kriteria peningkatan daya saing UKM. UKM dikategorikan berdaya saing apabila telah memenuhi Sebagian atau seluruh indikator Memiliki legalitas usaha (NIB, PIRT/Halal/sertifikasi lain), Peningkatan kualitas produk dan kemasan, Akses pasar digital / ekspor / kemitraan, Penerapan standar mutu dan manajemen usaha, Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah UKM berdaya saing antara lain dengan memperluas pendampingan intensif bagi pelaku usaha, memfasilitasi pemenuhan legalitas dan sertifikasi produk, serta meningkatkan akses pemasaran melalui kemitraan strategis dan promosi produk. Selain itu, penguatan kapasitas dalam manajemen usaha, inovasi produk, dan digitalisasi juga menjadi langkah penting untuk mendorong UKM mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

d. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian realisasi indikator kinerja *Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah* pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,97 persen, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,9 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah yang signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Capaian realisasi indikator kinerja *Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah* pada tahun 2025 mencapai 19,97 persen, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,38 persen, terjadi kenaikan sebesar 19,59 poin persentase, yang mencerminkan penguatan dan pemulihan pertumbuhan IKM secara bertahap.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercatat - 36,34 persen, capaian tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat substansial, dengan selisih 56,31 poin persentase, sekaligus menandai perubahan kondisi dari kontraksi menjadi pertumbuhan positif yang kuat.

Capaian indikator kinerja *Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah* jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 tidak mencapai target yang

ditetapkan. Dimana capaiannya hanya sebesar 45,24% dari target yang ditetapkan 0,84% dan realisasi 0,38%.

Hingga tahun 2025 belum terdapat target nasional kuantitatif yang ditetapkan secara seragam untuk indikator ini, sehingga evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan nasional penguatan IKM serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Capaian OPD tahun 2025 sebanyak 43 IKM menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas IKM binaan, meskipun masih diperlukan penguatan pembinaan berkelanjutan untuk Langkah strategis untuk peningkatan IKM meliputi peningkatan efektivitas pendampingan, penguatan kapasitas produksi melalui fasilitasi bantuan bagi IKM, serta pemenuhan legalitas (sertifikat halal) dan pengembangan kualitas produk. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja, perlu dilakukan penguatan basis data IKM, penajaman sasaran pembinaan, peningkatan kualitas pendampingan, dan perluasan akses pasar agar IKM serta Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas melalui pemanfaatan potensi bahan baku lokal agar dapat tumbuh lebih kompetitif dan berdaya saing

g. Meningkatkan Nilai Eespor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.

Pada tahun 2025, capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Nilai Ekspor* tercatat sebesar USD 52.504.306,66, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar USD 15.548.086. Capaian tersebut menunjukkan kinerja ekspor yang sangat baik dan melampaui ekspektasi yang telah direncanakan.

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Nilai Ekspor* pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 52.504.306,66. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar USD 52.967.332,45, nilai ekspor tahun 2025 mengalami penurunan sebesar USD 463.025,79 atau sekitar 0,87 persen, yang menunjukkan kondisi relatif stagnan dengan fluktuasi ringan (Perbedaan nilai lebih dipengaruhi dinamika normal pasar (harga, volume, permintaan), bukan penurunan kinerja struktural)

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar USD 7.959.205, nilai ekspor tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar USD 44.545.101,66 atau meningkat sekitar 559,5 persen.

Peningkatan ini mencerminkan penguatan kinerja ekspor secara substansial dalam tiga tahun terakhir.

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Nilai Ekspor tercatat sebesar US\$52.504.306,66. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar US\$15.548.086, tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 337,7 persen. Data ini diperoleh dari Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kumperindag dan Bea Cukai Provinsi Gorontalo dan bila dibandingkan dengan standar nasional nilai ekspor sebesar USD 315 miliar, capaian tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional, meskipun secara nominal masih berada di bawah target agregat nasional.

Upaya peningkatan nilai ekspor dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produk ekspor guna memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten, perluasan akses pasar melalui promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak dan identifikasi produk unggulan potensi eksport. Selain itu, keberlanjutan kinerja didukung dengan fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yang membina UMKM, keikutsertaan dalam penyelenggaraan misi dagang untuk membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi produk di pasar internasional. Hal ini juga membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk.

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu :

- a. Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif. Capaian indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 70,25% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mendorong keaktifan koperasi telah melampaui target yang ditetapkan. indikator kinerja sasaran strategis belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan

Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya. Adapun realisasinya melampaui target Renstra sebesar 70 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 106,74 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator tersebut telah mencapai bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan koperasi di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan serta aktivitas usaha koperasi di daerah.

Secara umum, tingkat koperasi aktif di berbagai daerah berada pada kisaran 60–70 persen dari total koperasi yang terdaftar. Dengan capaian tersebut, Provinsi Gorontalo tidak hanya melampaui target Renstra sebesar 70 persen, tetapi juga berada di atas rata-rata capaian beberapa daerah, yang menunjukkan bahwa tingkat keaktifan koperasi di daerah ini relatif lebih baik serta mencerminkan adanya peningkatan pembinaan dan pengelolaan koperasi yang cukup efektif. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan kewajiban kelembagaan, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh OPD. Selain itu, perbaikan aspek administrasi dan tata kelola koperasi turut berkontribusi terhadap peningkatan status keaktifan koperasi.

Namun demikian, masih terdapat sebagian koperasi yang belum aktif secara optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, rendahnya partisipasi anggota, serta kendala dalam pengembangan usaha koperasi.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan pembinaan dan pengawasan, penguatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pengembangan usaha agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

- b. Peningkatan UMKM Naik kelas dengan Indikator Persentase UMKM Naik Kelas
Realisasi indikator Persentase UMKM Naik Kelas pada tahun berjalan sebesar 0,28% dari target yang ditetapkan sebesar 0,7%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 40%. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan UMKM naik kelas belum memenuhi target yang telah ditetapkan

Indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada indikator ini belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo

Secara umum, peningkatan UMKM naik kelas di berbagai daerah masih berada pada kisaran di bawah 1 persen dari total UMKM binaan, mengingat proses peningkatan skala usaha memerlukan waktu, penguatan kapasitas usaha, serta dukungan akses pembiayaan dan pasar. Dengan demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Provinsi Gorontalo masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan agar semakin banyak UMKM yang mampu berkembang dan naik kelas.

Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha, serta belum optimalnya pemenuhan aspek legalitas, standardisasi, dan kualitas produk. Selain itu, keterbatasan jangkauan program pembinaan dan pendampingan serta belum terintegrasinya dukungan lintas sektor turut mempengaruhi percepatan peningkatan kelas UMKM.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan upaya peningkatan pembinaan dan pendampingan secara lebih terarah, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, serta pengembangan kemitraan dan rantai pasok. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan guna mendorong UMKM agar mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing secara berkelanjutan.

c. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM dengan indikator :

- Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Realisasi indikator Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah pada tahun berjalan sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 16%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 416,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan rencana pembangunan IKM jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya.

Indikator ini melampaui target Renstra sebesar 16 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 416,69 persen. Hal ini menunjukkan percepatan dalam rekomendasi penyusunan RPIK di Provinsi Gorontalo

Secara nasional tidak terdapat standar persentase baku terkait fasilitasi Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah. Namun pada berbagai daerah, persentase kabupaten/kota yang telah memiliki atau difasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan industri umumnya berada pada kisaran 40 hingga 70 persen dari total kabupaten/kota yang ada. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perencanaan pembangunan industri sebagai bagian dari penguatan sektor industri daerah

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan IKM, termasuk penyusunan dan implementasi rencana pembangunan yang lebih progresif, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Selain itu, adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan IKM turut mempercepat realisasi capaian indikator

- Persentase IKM yang difasilitasi stimulant

Realisasi indikator Persentase IKM yang difasilitasi stimulan pada tahun berjalan sebesar 5,31% dari target yang ditetapkan sebesar 0,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 1.770%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi stimulan kepada IKM jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan program bantuan stimulan, meningkatnya jumlah IKM yang memperoleh fasilitasi, serta adanya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, proses identifikasi dan verifikasi calon penerima yang lebih diefektifkan turut mempercepat realisasi program.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya.

capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu realisasi tahun 2025 sebesar 5,31 persen, dari target Renstra sebesar 0,30 persen, tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 1.770 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya fasilitasi stimulan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rangka mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi IKM di Provinsi Gorontalo.

Persentase IKM yang difasilitasi stimulan di Provinsi Gorontalo sebesar 5,31 persen tergolong cukup baik. Secara umum, fasilitasi stimulan kepada IKM di berbagai daerah masih terbatas karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta jumlah IKM yang menjadi sasaran pembinaan setiap tahunnya. Oleh karena itu, persentase IKM yang difasilitasi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan total populasi IKM yang ada. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya memberikan dukungan stimulan kepada pelaku IKM guna mendorong peningkatan

kapasitas produksi, kualitas produk, serta pengembangan usaha industri kecil dan menengah di daerah

adapun langkah yang dapat dilakukan kedepan adalah peningkatan kualitas fasilitasi agar bantuan yang diberikan tidak hanya menjangkau lebih banyak IKM, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing secara berkelanjutan.

- d. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan Nilai Ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indikator

- Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting
Realisasi indikator Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada tahun berjalan sebesar 170,26% dari target yang ditetapkan sebesar 2%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 8.513%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi pengendalian harga jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan kegiatan intervensi yang meningkat, seperti operasi pasar, pasar murah, pemantauan harga, serta koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, respons cepat terhadap potensi gejolak harga pada momen tertentu turut mendorong peningkatan realisasi indikator.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada indikator ini juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya intervensi pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok dan barang penting melalui berbagai kegiatan seperti pemantauan harga, operasi pasar, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait telah dilaksanakan secara intensif dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat.

Pada berbagai daerah, capaian indikator ini umumnya berada pada kisaran 100 hingga 200 persen dari target yang direncanakan. Dengan capaian sebesar 400 persen, Provinsi Gorontalo menunjukkan tingkat respons yang cukup tinggi dalam melakukan langkah-langkah stabilisasi harga melalui berbagai kegiatan pemantauan harga, operasi pasar, serta koordinasi distribusi bahan pokok.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dan belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Ke depan dibutuhkan penguatan efektivitas intervensi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan, tetapi juga pada dampak nyata dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat

- Persentase peningkatan nilai ekspor

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Nilai Ekspor pada tahun berjalan sebesar 49,45% dari target yang ditetapkan sebesar 10%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 494,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan nilai ekspor jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor daerah baik melalui pelabuhan Gorontalo maupun melalui Pelabuhan diluar Gorontalo serta upaya penguatan daya saing produk dan perluasan akses pasar ekspor.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor nasional yang dalam kondisi normal berada pada kisaran 5–15 persen per tahun, capaian peningkatan nilai ekspor Provinsi Gorontalo sebesar 49,45 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap komoditas unggulan daerah serta penguatan akses pasar ekspor.

Namun demikian diperlukan penguatan strategi diversifikasi produk, peningkatan daya saing melalui standardisasi dan hilirisasi, serta keberlanjutan fasilitasi bagi pelaku usaha agar pertumbuhan ekspor dapat terjaga secara konsisten.

- Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

Realisasi indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada tahun berjalan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian pengaduan konsumen melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas mekanisme penanganan pengaduan, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait seperti BPSK dan instansi teknis, serta respons yang cepat terhadap setiap laporan yang masuk. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara resmi turut mendorong optimalnya penyelesaian kasus.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator ini telah mencapai dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen telah berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen di Provinsi Gorontalo

Secara umum, tingkat penyelesaian pengaduan konsumen pada berbagai daerah ditargetkan berada pada kisaran 90 hingga 100 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan capaian 100 persen, Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa seluruh pengaduan konsumen yang masuk telah dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas layanan pengaduan, meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan,

serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel

- Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

Realisasi indikator Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi pada tahun berjalan sebesar 78,39% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 130,65%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian komoditi terakreditasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas layanan laboratorium, ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang cukup, serta kompetensi SDM yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengujian dan standarisasi produk turut mendorong peningkatan jumlah komoditi yang diuji secara terakreditasi.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya.

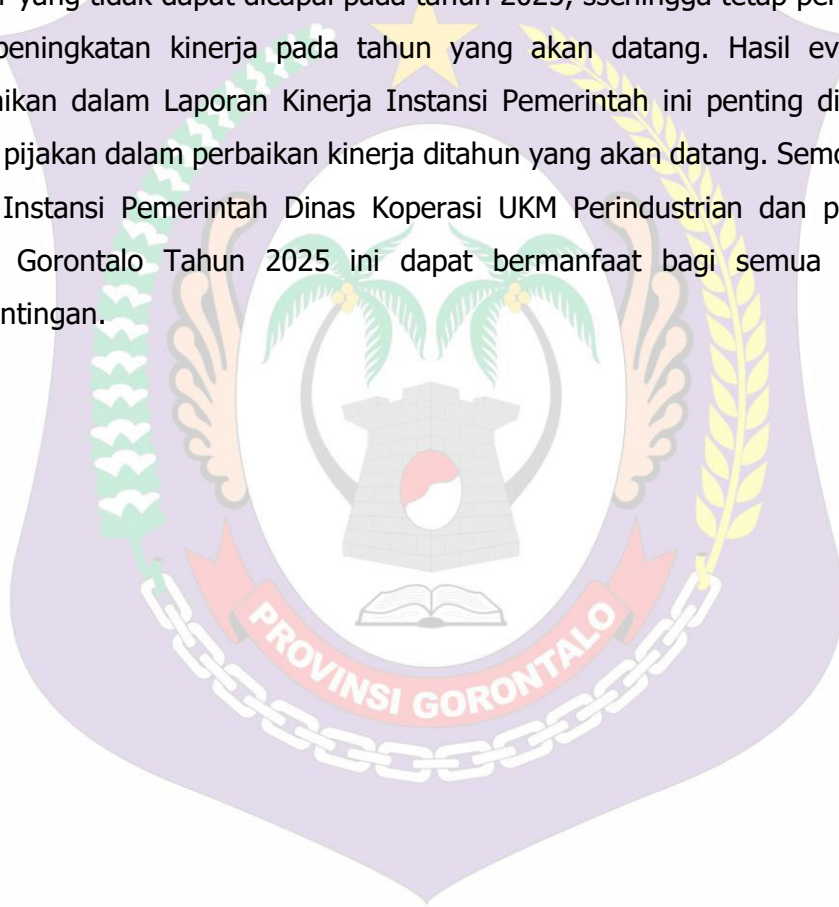
capaian kinerja indikator ini telah mencapai dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 60% dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pengujian komoditi terakreditasi telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan mutu serta daya saing produk di Provinsi Gorontalo.

Secara umum, persentase pengujian komoditi terakreditasi pada laboratorium pemerintah diberbagai daerah berada pada kisaran 60 hingga 80 persen dari total pengujian yang dilakukan. Dengan capaian sebesar 78,39 persen, kinerja layanan pengujian komoditi di Provinsi Gorontalo tergolong baik dan telah mendekati praktik optimal layanan laboratorium terakreditasi.

Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pengujian melalui penguatan akreditasi, peningkatan kompetensi tenaga penguji, penyediaan sarana prasarana yang optimal serta

pengembangan cakupan layanan agar mampu mendukung daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas.

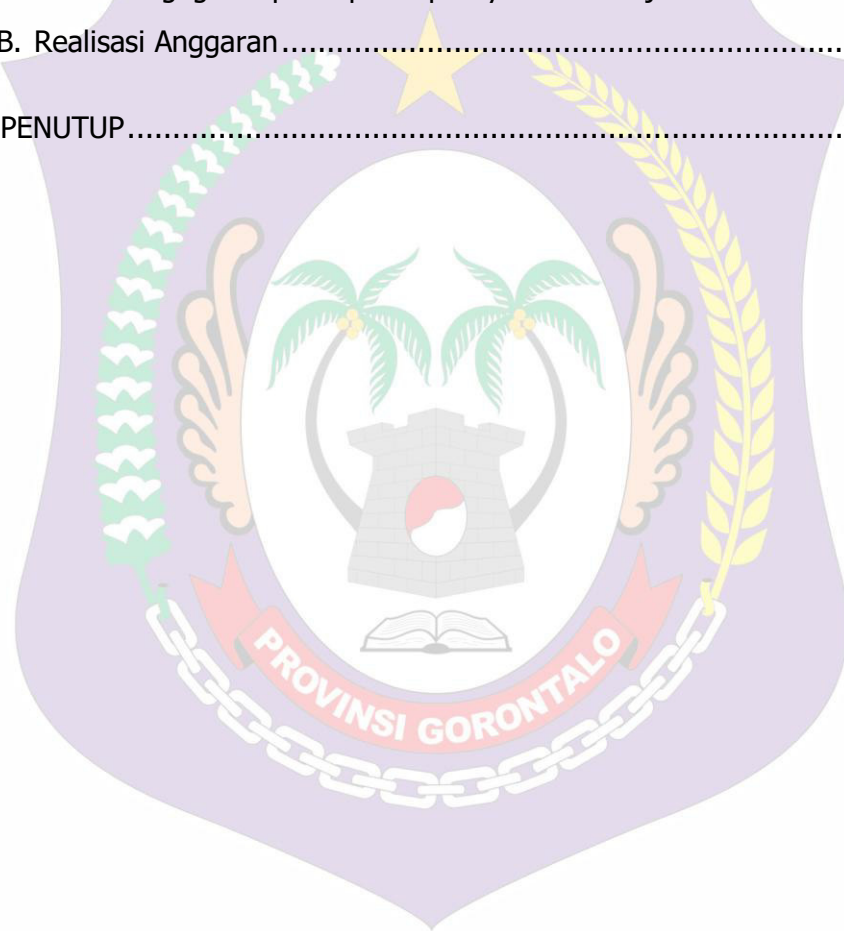
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ke depan. Berdasarkan Uraian diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dicapai pada tahun 2025, sehingga tetap perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum OPD	4
E. Isu-Isu Strategis Organisasi	14
F. Keadaan Pegawai	19
G. Sarana Prasarana Kantor	24
H. Sistematika Penyusunan LAKIP	30
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	32
A. Rencana Strategis.....	32
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	33
2. Tujuan Perangkat Daerah	35
3. Sasaran Strategis.....	36
4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
C. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	53
D. Instrumen Pendukung	67
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	74
A. Capaian Kinerja Diskumperindag Prov. Gorontalo	74
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025... ..	75
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu	84

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 Jangka. menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	92
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional	98
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan ...	106
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	116
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	126
B. Realisasi Anggaran.....	193
BAB IV PENUTUP.....	206



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin <i>Per 31 Desember 2025</i>	20
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025	21
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2025	22
Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon <i>Per 31 Desember 2025</i>	23
Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung	24
Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	30
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi Provinsi Gorontalo	34
Tabel 2.2. Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029...	35
Tabel 2.3. Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	36
Tabel 2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	37
Tabel 2.5. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	38
Tabel 2.6. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	44
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025	52
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025	52
Tabel 2.9. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.....	55
Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja	75
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	75
(Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	76
(Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025..... (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	77
Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025..... (Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	79
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu..... (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	85
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu..... (Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	86
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu..... (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	87
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu..... (Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	91
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	92
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	93
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra..... (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	94
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra..... (Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	96
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Mengacu Pada Renstra 2023-2026)	99
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Mengacu Pada Renstra 2025-2029)	100

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	100
<i>(Mengacu Pada Renstra 2023-2026)</i>	
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	102
<i>(Mengacu Pada Renstra 2025-2029)</i>	
Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	116
<i>(Mengacu Pada Renstra 2023-2026)</i>	
Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	120
<i>(Mengacu Pada Renstra 2025-2029)</i>	
Tabel 3.20. Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Proimer Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	134
Tabel 3.21. Daftar pengawasan & pemeriksaan/Monev koeprasi di Provinsi Gorontalo.....	136
Tabel 3.22. Rekap Realisasi Export Berdasarkan Komoditi selang Bulan Desember Tahun 2025.....	164
Tabel 3.23. Penerbitan SKA yang Dokumennya Telah dengan Lengkap dan benar Tahun 2025.....	165
Tabel 3.24. Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah di Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	176
Tabel 3.25. Rekapitulasi Pengujian laboratorium BPSMB di Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	184
Tabel 3.26. Hasil Pengawasan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	184
Tabel 3.27. Realisasi Anggaran setiap Sasaran Strategis Tahun 2025	194
<i>(Mengacu Pada Renstra 2023-2026)</i>	
Tabel 3.28. Realisasi Anggaran setiap Sasaran Strategis Tahun 2025	199
<i>(Mengacu Pada Renstra 2025-2029)</i>	
Tabel 3.29. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025	204
<i>(Mengacu Pada Renstra 2023-2026)</i>	
Tabel 3.30. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025	204
<i>(Mengacu Pada Renstra 2025-2029)</i>	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Dinas Kumperindag	6
Gambar 1.2.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin	20
Gambar 1.3.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan.....	21
Gambar 1.4.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan	22
Gambar 1.5.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon	23
Gambar 2.1.	Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo.....	68
Gambar 2.2.	Aplikasi SIKP	68
Gambar 2.3.	Aplikasi Online Data System	69
Gambar 2.4.	Aplikasi SIIInas.....	69
Gambar 2.5.	Aplikasi Sp2KP.....	71
Gambar 2.6.	Elektronik Surat Keterangan Asal (E-SKA).....	71
Gambar 2.7.	Aplikasi Godigi.....	72
Gambar 2.8.	Aplikasi SIPD.....	72
Gambar 2.9.	Aplikasi siDalev.....	73

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya secara terukur, sistematis, dan transparan. Dalam kerangka tersebut, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** disusun sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada aspek penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan daya saing industri, serta penguatan dan stabilisasi sektor perdagangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan secara terarah dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, yang selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan.

Indikator kinerja yang disajikan dalam LAKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dirumuskan sebagai penjabaran langsung dari sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penetapan sasaran strategis perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah, serta pengembangan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dengan tetap memperhatikan ketersediaan data dan kondisi pelaksanaan. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam LAKIP

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kontribusi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, penyusunan LAKIP Tahun 2025 tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo secara administratif, tetapi juga untuk menunjukkan keterkaitan dan kontribusi nyata indikator kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini, antara lain

1. Undang-Undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara nomor 4060);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
9. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara RI nomor 4437);
10. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

11. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Gorontalo No, 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

C. Tujuan

LAKIP Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kumperindag dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang
2. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan, yaitu Gubernur Gorontalo sebagai Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

D. Gambaran Umum OPD

Mengacu pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, tugas fungsi serta struktur organisasi Diskumperindag adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Berdasarkan Bab XVI bagian kesatu kedudukan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, maka Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas
Dinas Koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

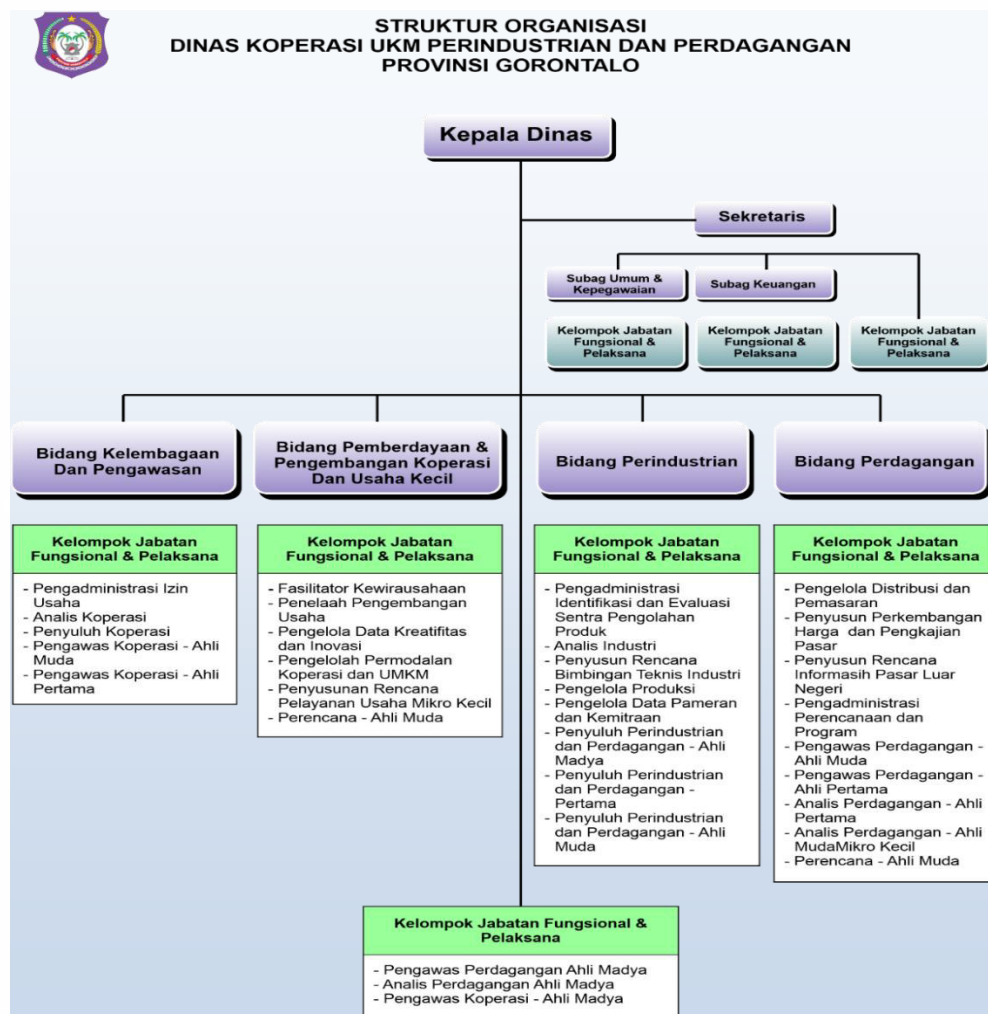
- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;

- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3. Struktur Organisasi, SDM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang kelembagaan dan Pengawasan;
- d. Bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. Bidang perindustrian;
- f. Bidang Perdagangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

❖ Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- penggordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan:

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,
- d. penggordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,
- e. penggordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo,
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

■ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. penetapan Program dan Kegiatan Dinas:
- c. pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas,
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Koperasi, MKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.

■ Tugas pokok dan fungsi Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan
- c. menyusun laporan keuangan SKPD:
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD,
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran,
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan:
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM,
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran,
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai,

- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran,
- k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ,
- l. membuat laporan pengesahan SPI, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak /Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak,
- m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi,
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA,
- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan:
- d. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris,

- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah,
- f. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi,
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur:
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran,
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris:
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya:
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris:
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT:
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM),
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural,
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit:
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan:
- t. melaksanakan tugas kehumasan,
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas,

- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas, dan
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah

3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan, supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi:
- b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian,
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi,
- d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana koperasi:
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi,
- f. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi:
- g. melakukan pengawasan pemeriksaan KSP dan USP:
- h. penerapan sanksi, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM, melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan data dan pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen, data dan informasi pembiayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, bagi Koperasi, dan UKM,
- c. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem promosi, dan pemasaran UKM,
- d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pemberdayaan UKM/ promosi dan pemasaran produk UKM,
- e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UKM secara periodik; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan UKM.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan industri,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, serta promosi industri,
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan serta promosi industri,
- d. penyiapan bahan dan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan teknis dibidang industri:
- e. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dan sarana dibidang industri:
- f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnik pengembangan komoditi industri, dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada urusan perdagangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan konsumen, promosi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan,
- b. perumusan pembinaan, pengawasan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas kab/kota,
- c. melakukan kerjasama dagang dalam Tangka peningkatan produksi dalam negeri,
- d. pelaksanaan kegiatan misi dagang nasional dan mternasional,
- e. pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di kabupaten/kota:
- f. pelaksanaan bimtek bagi SDM perdagangan, dan
- g. perumusan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

E. Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan sebagai dasar penetapan kebijakan dan prioritas program, dengan mempertimbangkan capaian kinerja, permasalahan utama, serta tantangan pembangunan daerah

Isu-isu strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra periode 2023-2026 sebagai berikut.

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah yang besar, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar,

masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Masih banyak koperasi yang belum menjalankan aspek manajemen kelembagaan, manajemen usaha permodalan dan pencatatan koperasi sesuai ketentuan, dan banyaknya koperasi yang belum melakukan pencatatan atau laporan keuangan dengan baik sehingga menjadi kendala dalam hal mengakses Kredit ke lembaga pembiayaan serta masih kurangnya koperasi yang dapat mengakselerasi digitalisasi koperasi yang tersedia

- b. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional

- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

2. Bidang Perindustrian

Isu strategis di bidang perindustrian adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan,
- b. Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional,
- c. Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah,
- d. Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah:

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,

- k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

4. Bidang Pelayanan OPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD

Isu-isu strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra periode 2023-2026

- 1. Penguatan Kelembagaan Koperasi
 - Untuk Mendorong koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Transformasi koperasi menjadi lebih modern dan profesional.
- 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- 3. Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan
- 4. Peningkatan Literasi Digital kepada UMKM
- 5. Peningkatan kemitraan
- 6. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- 7. Legalitas dan formalisasi usaha
- 8. Transformasi Digital UMKM
- 9. Ketersediaan data UMKM yang akurat dan terkini
- 10. Peningkatan kualitas produk dan sertifikasi
- 11. Penguatan ekosistem Industri Halal

12. Peningkatan produktivitas IKM (sumber daya manusia, proses produksi, hingga akses pasar dan pembiayaan)
13. Peningkatan pemasaran dan promosi produk IKM
14. Penguatan pengawasan dan pengendalian aktivitas produksi sektor Industri
15. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
16. Perlunya peningkatan Intensitas Pengawasan barang Beredar
17. Mewujudkan iklim usaha yang taat ketentuan dan konsumen cerdas
18. Peningkatan nilai ekspor
19. Meningkatnya kerjasama sektor perdagangan antar daerah
20. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian
22. Peningkatan Kapasitas SDM Penguji Mutu Barang
23. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
24. Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi
25. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik OPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
26. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan OPD

F. KEADAAN PEGAWAI

Keadaan pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggambarkan ketersediaan sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pegawai yang ada terdiri dari Aparatur Sipil Negara dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan, yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.

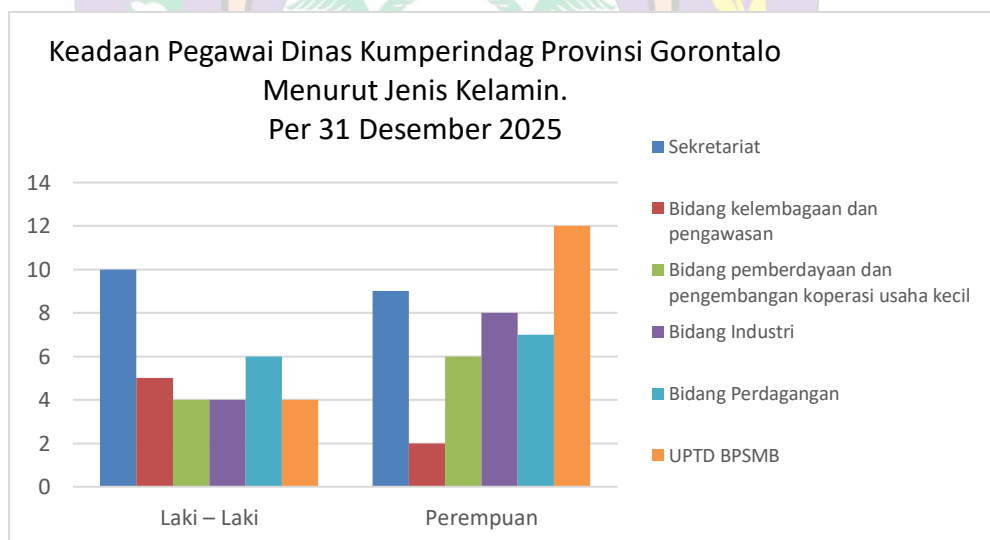
Komposisi dan distribusi pegawai dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas. Informasi keadaan pegawai ini menjadi dasar evaluasi kecukupan sumber daya manusia serta perencanaan pengembangan kompetensi aparatur pada periode selanjutnya.

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2025

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	10	9	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	5	2	7
3	Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	4	6	10
4	Bidang Industri	4	8	12
5	Bidang Perdagangan	6	7	13
6	UPTD BPSMB	4	12	16
JUMLAH		33	44	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025



Gambar 1.2. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 57,14% sedangkan pegawai laki-laki 42,86 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di ssekretariat sebanyak 19 orang, kemudian diikuti oleh UOTD BPSMB dan Bidang perdagangan. Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran

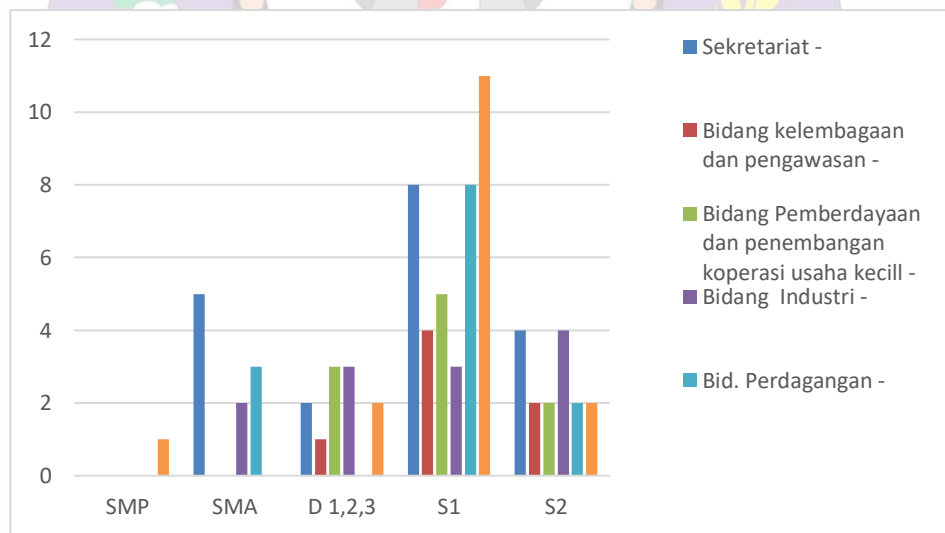
dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	2	8	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	-	1	4	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	-	3	5	2	10
4	Bidang Industri	-	-	2	3	3	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	-	3	-	8	2	13
6	UPTD BPSMB	-	1	-	2	11	2	16
JUMLAH		-	1	10	11	39	16	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025



Gambar 1.3. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan

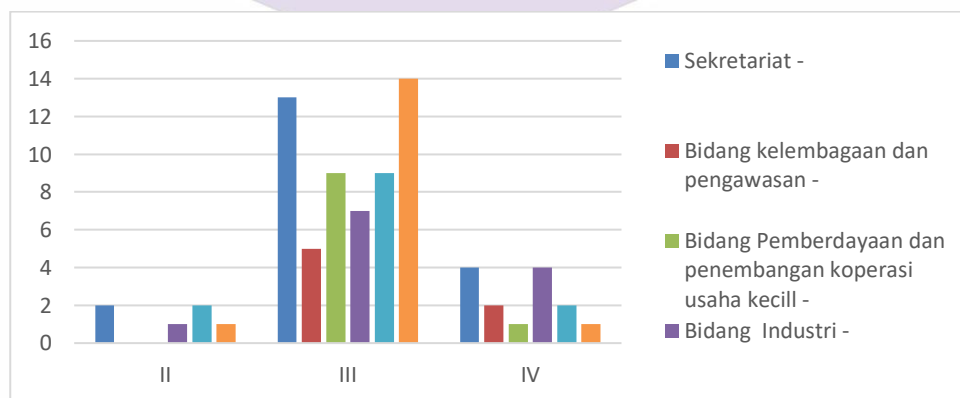
di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 50,64% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 20,78%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 sebesar 14,28%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2025 sebesar 12,98% dan jenjang SMP sebesar 1,3%.

Berdasarkan data tersebut, pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan untuk menyiapkan aparatur yang andal dan profesional, khususnya melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari jenjang SMA dan Diploma ke S1 sesuai bidang keahlian. Upaya ini perlu dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan kesesuaian disiplin ilmu dengan tugas dan fungsi OPD, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	13	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	5	1	6
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	9	1	10
4	Bidang Industri	-	1	7	4	12
5	Bidang Perdagangan	-	2	9	2	13
6	UPTD BPSMB	-	1	14	1	16
TOTAL		-	6	57	13	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025



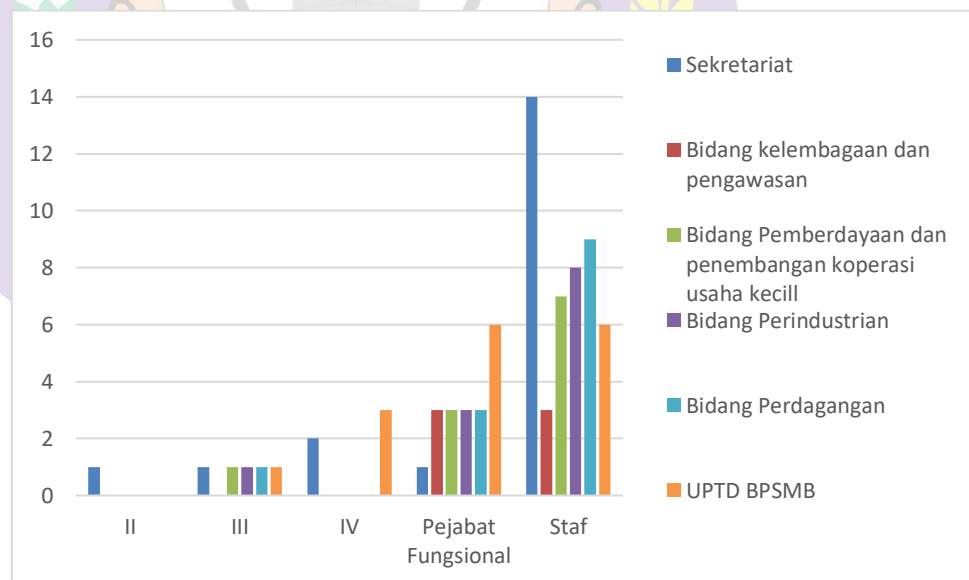
Gambar 1.4. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 7,8% golongan II, 74% golongan III dan 18,2 % golongan IV.

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	1	1	2	1	14	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	-	3	3	6
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	1	-	3	7	11
4	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	-	3	9	13
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	6	16
TOTAL		1	5	5	19	47	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025



Gambar 1.5. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan bahwa struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo diisi oleh 1 orang pejabat eselon II (1,3%) serta pejabat eselon III dan IV sebanyak 5 orang (6,5%). Komposisi

tersebut menunjukkan bahwa dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada urusan Koperasi dan UKM ditopang oleh ketersediaan pejabat fungsional sebanyak 19 orang.

G. SARANA PRASARANA KANTOR

Sarana dan prasarana kantor merupakan unsur pendukung penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta kinerja aparatur.

1. Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan gedung merupakan fasilitas vital yang dimiliki oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Hingga 31 Desember 2025 tanah dan gedung yang tercatat sebagai asset Dinas Kumperindag dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15,424.00	2004	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	2004	Jln Tengah Desa Toto Selatan		Belanja Pengadaan Tanah Tahap II
3	Tanah Bangunan Laboratorium	8,769.00	2004	Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila	UPTD. Metrologi Balai	Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
4	Tanah Lapangan lainnya	23,100.00	2013	Kel. Bullide		Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
						Aset Provinsi Gorontalo
5	Tanah Lapangan Taman lainnya	243	2007	taman wisata iluta		Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area Kiat senilai Rp. 20.000.000,
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	383,66	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15242	12/31/2005	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango		Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8769	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43,37				pekerjaan pembangunan gedung pelayanan tera-tera ulang uptd. metrologi
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	565,8		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Backdrop

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	386		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Panggung
12	Bangunan Gedung kantor Lain-Lain	129600		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Belanja Rumah Genset BPSMB
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Gazebo
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	70,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas Pengembangan Teknologi Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	63		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013
16	Bangunan Gudang Lain-Lain (dst)	148		Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila		Gedung Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
17	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	8769		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo
18	Gedung Pos Jaga Permanen	92,4		Jl. Sawah Besar Kec. Kabila		Pos satpam

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
19	Gedung Garasi/Pool Permanen	34,1	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango			Garasi Kendaraan Dinas
20	Bangunan Kolam bak Ikan	230,4	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango			Fasilitas Umum
21	Bangunan Penerangan taman	1421	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango			Penataan Lampu Hias Kolam
22	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	53,48	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango			Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
23	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	75,85	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango			Gedung Stand Pameran, Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
24	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	354				Taman (Panggung dan Paving)
25	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66,5	12/31/2006	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
26	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	108		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jagung, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
27	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	93.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Pakan Ternak, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
28	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
29	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
30	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
31	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	89		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
32	Bangunan Gedung Pabrik permanen	43,37		Ds. Dulomo Kc. Tilango Kab Gorontalo		Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu
33	Taman Semi Permanan	796		Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango		Paving Kolam
34	Taman Semi Permanan	980		Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango		Penataan Kolam

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
35	Taman lainnya	8769		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone- Bolango		Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005
36	Taman lainnya	1.65		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
37	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pondasi Pagar Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
38	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Kantor Keliling
39	Pagar permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Kantor Depan
40	Pagar Permanen	14,4		~ Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Lanjutan bangunan pagar kantor
41	Pagar Semi Permanen	54		Ds. Bube. Kec. Suwawa. Kab Bone Bolango		Pembangunan Pagar KIAT

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025

2. Kendaraan Dinas

Salah satu aspek pendukung operasional tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo adalah kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Adapun jumlah kendaraan dinas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Aset Kendaraan Dinas OPD	Jumlah
Kendaraan Roda Dua / Motor	16 unit
Kendaraan Dinas Plat Merah / Non KDO	9 unit
Total	25 unit

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Gambaran Umum OPD
- E. Isu-Isu Strategis Organisasi
- F. Keadaan Pegawai
- G. Sarana & Prasarana Kantor
- H. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Rencana Anggaran Tahun 2025
- D. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Diskumperindag Provinsi Gorontalo
 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
 2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu
 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)
 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP



A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran awal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang penguatan ekonomi kerakyatan, industrialisasi daerah, dan stabilitas perdagangan. Pelaksanaan rencana strategis tahun 2025 difokuskan pada penguatan fondasi kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perbaikan tata kelola pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah mengacu pada dokumen perencanaan strategis yang berlaku pada periode pelaksanaan kinerja. Sehubungan dengan adanya penyesuaian dokumen perencanaan strategis organisasi, maka dalam laporan ini digunakan 2 (dua) dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029 untuk memberikan gambar yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja organisasi sekaligus memastikan pelaporan kinerja tetap selaras dengan dokumen perencanaan strategis yang berlaku dimasing-masing periode dan sebagai dasar rujukan dalam penyajian dan analisis capaian kinerja.

Rencana Strategis dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat regional maupun nasional. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada penguatan peran perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan pelaku usaha, pengembangan sektor industri dan perdagangan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis diarahkan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan secara bertahap melalui program dan kegiatan yang relevan, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Setiap sasaran strategis dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan

antara input, proses, output, dan outcome, serta didukung oleh indikator kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah sesuai dengan arah pembangunan daerah. Visi menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis perangkat daerah, serta mencerminkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, visi berfungsi sebagai arah bersama yang memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi, terukur, dan akuntabel.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang menggambarkan upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Misi dirumuskan sebagai pernyataan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap misi menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya dioperasionalkan melalui indikator kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan misi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, sinergi lintas sektor, serta keberlanjutan, guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini tidak terlepas dari penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 serta Renstra 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada sektor Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo dan dokumen tersebut merupakan penjabaran teknis dari dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan RPJMD 2025-2029

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi Provinsi Gorontalo

RPJPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 :				
VISI : "Gorontalo Maju dan Mandiri"				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal	Peningkatan Eknomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Nilai Export (Juta USD)
		Inflasi		
	Terwujudnya Good dan Clean Government		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP
RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 :				
VISI : "Gorontalo Maju dan Sejahtera."				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia	Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)
				Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)
				Rasio Kewirausahaan Provinsi
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
			Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.	Tingkat Inflasi

*Visi & Misi mengacu pada RPJPD 2007-2025 dan RPJMD 2025-2029

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka yang menjadi tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo di Bidang Kumperindag yang

mengacu pada Renstra tahun 2023-2026 dan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2024 (%)	Target Tahunan (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4,13	5,54	5,65	5,74	5,80	5,86	5,92

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.

2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan didasarkan pada isu-isu aktual dan analisa sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat secara tepat menentukan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD dan RPJMD 2025-2029 serta mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Melalui perumusan tujuan strategis, Dinas Kumperindag dapat mengukur sejauh mana visi dan misi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Dengan mengacu pada visi dan misi tersebut diatas, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana jangka waktu Renstra.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, Tujuan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2). Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

- 1). Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2). Kontribusi Industri terhadap PDRB
- 3) Nilai Ekspor

Adapun Tujuan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra 2025-20229 yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah
Indikator Tujuan : Persentase Koperasi Sehat
2. Persentase Pertumbuhan UMKM
Indikator Tujuan : Persentase Pertumbuhan UMKM
3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
4. Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan
Indikator Tujuan : Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan				Kondisi Akhir RPD Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	74,5	74,68	74,88	75,05	75,05
2	Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	20	20	20	20

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan				Kondisi Akhir RPD Renstra
			2023	2024	2025	2026	
	Koperasi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang berdaya saing	60	70	80	90	300
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	0,95%
	Meningkatnya Nilai Export	Jumlah Nilai Ekspor	\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$16.325.490

Tabel 2.4 Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	70%	72%	74%	77%	80%	83%
Peningkatan UMKM Naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	0,70%	0,80%	0,90%	1%	1,10%	1,20%
Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	16%	16%	16%	16%	16%	16%
	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	0,30%	0,34%	0,37%	0,41%	0,44%	0,47%
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	2%	3%	4%	5%	6%	7%
	Persentase peningkatan nilai ekspor	10%	11%	12%	13%	14%	15%
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	95%	96%	97%	98%	99%	100%
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	60%	65%	70%	75%	80%	85%

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2023-2026 dan Renstra 2025–2029. Arah kebijakan dilaksanakan secara terintegrasi dan terukur dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 guna mendorong peningkatan kinerja dinas secara berkelanjutan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026

Tabel 2.5 Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan
		Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
			2. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran
			4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan
Meningkatnya kapasitas Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	Meningkatkan kapasitas usaha dan	1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Usaha Kecil Menengah (Jumlah),	Jumlah UKM yang berdaya saing	kelembagaan koperasi UKM	2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
			3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
			4. Fasilitasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
			5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia
			6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase),	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
			2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
			3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
			2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor
			3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
		Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
		Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Mengacu pada Renstra 2023-2026 maka Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan pertama** dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

- ✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- ✚ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- ✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dinas

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BPSMB

2). Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program ini Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya

Kegiatan adalah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi sehat

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4). Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif

Prioritas kegiatan adalah:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

5). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang berdaya saing

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

6). Program Pengembangan UMKM

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang bertransformasi usaha

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kedua**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

7). Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Outcome Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri

- ✚ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

pencapaian kinerja pada **indikator tujuan ketiga**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

8). Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Outcome Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian
- Pemantauan Mutu Produk
- Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

9). Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Outcome Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

- ✚ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- ✚ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota
- ✚ Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- ✚ Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan :

- ✚ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

10). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi

- ✚ Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

11). Program Pengembangan Ekspor

Outcome Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan

✚ ***Berdasarkan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029***

Tabel 2.6 Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi	Peningkatan kapasitas Usaha dan SDM koperasi serta pendampingan koperasi
			Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
		Peningkatan Akses Permodalan : Mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) / LPDB secara inklusif.	Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
Peningkatan UMKM Naik kelas	Presentase UMKM Naik Kelas	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM :	a. Penyediaan database UMKM yang akurat dan terkini b. Peningkatan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan c. Optimalisasi sarana dan prasarana
		Peningkatan legalitas produk dan Akses permodalan	a. Peningkatan sumber daya manusia b. Reformasi Regulasi dan Kemudahan Berusaha
		Peningkatan kemitraan di berbagai sektor (produksi, pemasaran, pembiayaan)	Kolaborasi dan sinergitas lintas sektor (BUMN, Perguruan Tinggi, Swasta)
		Akselerasi Transformasi Digital	Program UMKM Go Digital, Dukungan Infrastruktur Digital serta Layanan Digital UMKM
Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Ketersediaan database IKM yang valid	a. Data yang terintegrasi dengan Kab/ Kota b. Fasilitasi Penyusunan RPIK
	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	Penerepan Standarisasi dan Regulasi terkait sertifikasi produk, Peningkatan Kapasitas dan Teknologi	a. Penetapan regulasi yang mendukung standarisasi produk b. Pengembangan teknologi produksi dan pelatihan
		Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan IKM, Alih teknologi dalam pengolahan produk IKM, penguatan permodalan serta penguatan kewirausahaan Industri Halal	a. Peningkatan Produk dan Keahlian b. Stimulasi peningkatan produk IKM
		Kolaborasi dan sinergitas promosi produk IKM	a. Budget sharing dengan instansi terkait b. Dukungan kemitraan, c. Kebijakan Pemerintah mendukung Pemasaran Produk
		Peningkatan pembinaan dan pengawasan terpadu sektor Industri	Pembentukan tim teknis Pengawasan dan Pengendalian serta Monitoring Evaluasi berkala
Terwujudnya Pengendalian	Persentase Intervensi Pengendalian Harga	Subsidi harga barang kebutuhan pokok	Pelaksanaan intervensi pasar

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Bahan Pokok dan barang penting		
	Persentase peningkatan nilai ekspor	Memberikan kemudahan bagi iklim investasi yang berorientasi ekspor	Meningkatkan promosi dan kerja sama di bidang ekspor
		Peningkatan intensitas pertemuan pelaku usaha antar daerah	Meningkatkan promosi dan kerja sama sektor perdagangan antar daerah
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Beredar secara berkala	Peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
		Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen	Peningkatan edukasi tentang regulasi serta standar produk dan penegakan Hukum
		Peningkatan penyelesaian sengketa konsumen	Penyelesaian aduan sengketa konsumen
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	Optimalisasi Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium	Perencanaan dan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
		Peningkatan Kompetensi Teknis serta Penerapan Stadarisasi Mutu Barang	Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan	Sertifikasi dan Akreditasi

Mengacu pada Renstra 2025-2029 maka Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan pertama** dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

✚ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dinas

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BPSMB

2). Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program ini Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya

Kegiatan adalah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi sehat

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4). Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif

Prioritas kegiatan adalah:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kedua**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

5). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang berdaya saing Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

6). Program Pengembangan UMKM

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang bertransformasi usaha Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan ketiga dan keempat**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

7). Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Outcome Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri

- ✚ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kelima**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Outcome Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

- + Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- + Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota
- + Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- + Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan :

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

pencapaian kinerja pada **indikator tujuan keenam**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

9). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi

- ✚ Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

10). Program Pengembangan Ekspor

Outcome Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan

pencapaian kinerja pada **indikator tujuan ketujuh**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

11). Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Outcome Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kedelapan**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian
- Pemantauan Mutu Produk
- Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi

Tahun 2025 terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak teranggarkan yaitu:

1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Outcome Jumlah Izin yang difasilitasi dan dievaluasi

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcome Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dimana Petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025 merupakan komitmen antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi kinerja. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2025

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Renstra 2023–2026 sebagai dasar komitmen kinerja tahunan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, yang memuat sasaran, indikator, dan target sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Seiring dengan diberlakukannya Renstra 2025–2029 dan masa transisi dokumen perencanaan, dilakukan Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai penyesuaian untuk menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja dengan Renstra yang baru, tanpa mengubah tujuan organisasi, guna menjaga konsistensi, keterukuran, dan akuntabilitas pelaksanaan serta pelaporan kinerja.

**Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	74,88
2.	Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20 Koperasi
3.	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Jumlah UKM yang Berdaya Saing	80 UKM
		Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,95%
4.	Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	US\$ 15.548.086

**Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	70%
2.	Peningkatan UMKM Naik Kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	0,7%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.	Meningkatnya kualitas 3 Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	16%
		Persentase IKM yang di fasilitasi stimulan	0,3%
4.	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	2%
		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	10%
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	95%
		Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	60%

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2025, Alokasi anggaran Dinas Kumperindag setelah perubahan sebesar **Rp. 32.773.206.805,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN. Pagu anggaran awal Dinas Kumperindag TA. 2025 sebesar Rp. 22.071.294.305,- kemudian mengalami revisi anggaran yaitu :

- Tahapan hasil pencadangan anggaran OPD 2025 sebesar (Rp. 3.548.673.500,-).
- Revisi tambahan anggaran sesuai Inpres 1 tahun 2025 sebesar Rp. 12.578.276.000,- antara lain pada program pengembangan UMKM sebesar Rp. 6.908.000.000,- (item belanja barang untuk dijual /diserahkan kepada Masyarakat serta belanja pendukung lainnya. Dimana sebesar Rp. 4.993.030.000 ditagging melalui sumber dana IF Tahun Anggaran 2025 (Kinerja Tahun Sebelumnya), program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar Rp. 1.710.000.000,- (item belanja barang yang dijual/serahkan kepada Masyarakat dan item belanja pendukung lainnya yang bersesuaian untuk pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dan ditagging melalui sumber dana IF Tahun Anggaran 2025 (Kinerja Tahun Sebelumnya)), program perencanaan dan Pembangunan industri pada 2 (dua) sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Masyarakat (item belanja belanja barang yang dijual/serahkan

kepada Masyarakat dan item belanja pendukung lainnya yang bersesuaian Rp. 1.446.534.000,-) dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (item belanja belanja barang yang dijual/serahkan kepada Masyarakat dan item belanja pendukung lainnya yang bersesuaian Rp. 2.513.742.000,-)

- c. Revisi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-
- d. Penyesuaian pagu SKPD TA. 2025 sebesar Rp. 1.400.000.000,- antara lain pada item belanja belanja barang yang dijual/serahkan kepada Masyarakat dan item belanja pendukung lainnya yang bersesuaian Rp. 1.500.000.000,- untuk pelaksanaan operasi pasar/pasar murah) dan item belanja lainnya pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Rp. 250.000.000,-) serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar Rp. 150.000.000,- (item belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Dekranasda)
- e. Tahapan APBD-P 2025 sebesar Rp. 47.310.000,-

Sehingga Implementasi rencana strategis untuk tahun 2025 yang mencakup pelaksanaan program/kegiatan mendapat dukungan anggaran total sebesar **Rp. 32.773.206.805,-** (melalui sumber dana APBD dan termasuk tagging IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo total sebesar Rp. 6.703.030.000) yaitu :

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2025*

- Belanja Operasi : Rp. 32.773.206.805,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.976.439.505,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 22.129.306.200,-
 - ~ Belanja Modal : Rp. 667.461.200,-

✚ *Realisasi Anggaran :*

- Belanja Operasi :Rp. 28.806.278.960,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.521.920.473,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 18.620.142.740,-
 - ~ Belanja Modal : Rp. 664.215.747,-

Anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terdiri atas 11 program, 18 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Ditahun 2025 terdapat indikator program yang belum tercapai. Adapun untuk indikator program yang belum tercapai antara lain :

- Jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan realisasi 18 koperasi. Ditahun 2025 jumlah koperasi tahun buku 2024 yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan/monev koperasi di tahun 2025 sebanyak 22 koperasi. Setelah dilakukan penilaian koperasi sehat berdasarkan aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan maka dihasilkan 18 koperasi sehat dan cukup sehat.
- *Jumlah UKM yang berdaya saing* target 160 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM
- Di tahun 2025 sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo salah satunya adalah terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah dimana pelaksanaan program kegiatan antara lain lebih difokuskan pada peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global serta Peningkatan kapasitas UMKM. Hal ini berdampak pada pengalokasian anggaran dimana terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai target yaitu program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional hal ini disebabkan.

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)*
1	Mengacu pada Renstra 2023-2026 ❖ Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag ❖ Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah) ❖ Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) ❖ Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	
	Mengacu pada Renstra 2025-2029 ❖ Meningkatnya Koperasi Aktif ❖ Peningkatan UMKM Naik Kelas ❖ Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM ❖ Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	
2	Sumber Dana APBD	26.070.176.805,-
3	Sumber Dana DAK Non Fisik	-
4	IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2025	6.703.030.000,-
Jumlah		32.773.206.805,-

*anggaran setelah APBD 2025

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis mengacu Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.071.294.305	32.773.206.805
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.363.175.305	22.640.639.805
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.280.412.305	14.634.756.305
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.226.400	760.785.400

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	381.369.400	391.400.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.857.000	369.385.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.326.341.705	10.052.421.705
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.226.439.505	9.976.439.505
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99.902.200	75.982.200
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.892.000	128.214.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.892.000	128.214.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.416.800	633.036.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.416.800	633.036.800
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.535.400	3.060.298.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.629.400	2.523.222.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB	578.906.000	537.076.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	257.664.000	134.337.500
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.559.000	121.284.000
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	241.559.000	121.284.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.559.000	121.284.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.777.000	53.125.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.777.000	53.125.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.777.000	53.125.000
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	339.772.000	46.146.000
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	339.772.000	46.146.000
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	297.548.000	46.146.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	42.224.000	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	742.991.000	7.650.991.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	742.991.000	7.650.991.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	742.991.000	7.650.991.000
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.000.000.000	4.589.602.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	351.396.000	1.675.280.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	349.884.000	2.812.168.000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	298.720.000	102.154.000
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.708.119.000	5.542.965.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.550.000	23.550.000
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	23.550.000	23.550.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.550.000	23.550.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.024.429.000	4.130.936.500
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	960.023.000	4.088.637.500
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.258.000	27.258.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	915.765.000	4.061.379.500
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	64.406.000	42.299.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	64.406.000	42.299.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	228.052.000	91.514.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	228.052.000	91.514.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	228.052.000	91.514.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.432.088.000	1.296.964.500
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.920.518.000	998.134.000
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.920.518.000	998.134.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	421.094.000	243.025.500
	Pengembangan Layanan Pengujian	259.258.000	179.934.500
	Pemantauan Mutu Produk	95.299.000	18.084.000
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	66.537.000	45.007.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90.476.000	55.805.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	90.476.000	55.805.000

Adapun Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis mengacu Renstra 2025-2029 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.071.294.305	32.773.206.805

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
Meningkatnya Koperasi Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.363.175.305	22.640.639.805
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	257.664.000	134.337.500
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.559.000	121.284.000
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	241.559.000	121.284.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.559.000	121.284.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.777.000	53.125.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.777.000	53.125.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.777.000	53.125.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.280.412.305	14.634.756.305
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.226.400	760.785.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	381.369.400	391.400.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.857.000	369.385.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.326.341.705	10.052.421.705
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.226.439.505	9.976.439.505
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99.902.200	75.982.200
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.892.000	128.214.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.892.000	128.214.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.416.800	633.036.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.416.800	633.036.800
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.535.400	3.060.298.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.629.400	2.523.222.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB	578.906.000	537.076.000
Peningkatan UMKM Naik Kelas	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	339.772.000	46.146.000
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	339.772.000	46.146.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	297.548.000	46.146.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	42.224.000	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	742.991.000	7.650.991.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	742.991.000	7.650.991.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	742.991.000	7.650.991.000
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan Teknologi IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.000.000.000	4.589.602.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	351.396.000	1.675.280.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	349.884.000	2.812.168.000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	298.720.000	102.154.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.708.119.000	5.542.965.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.550.000	23.550.000
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	23.550.000	23.550.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.550.000	23.550.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.024.429.000	4.130.936.500
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	960.023.000	4.088.637.500
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.258.000	27.258.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	915.765.000	4.061.379.500
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	64.406.000	42.299.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	64.406.000	42.299.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	228.052.000	91.514.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	228.052.000	91.514.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	228.052.000	91.514.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.432.088.000	1.296.964.500
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.920.518.000	998.134.000
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.920.518.000	998.134.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	421.094.000	243.025.500
	Pengembangan Layanan Pengujian	259.258.000	179.934.500
	Pemantauan Mutu Produk	95.299.000	18.084.000
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	66.537.000	45.007.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90.476.000	55.805.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	90.476.000	55.805.000

D. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag dalam menunjang pembangunan daerah dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dengan membangun beberapa sistem informasi.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pembangunan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

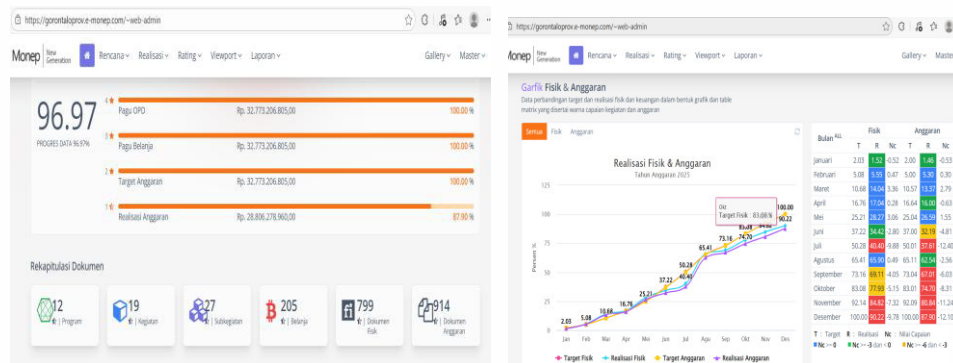
Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi (E-Monev NG)

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan berisi Monev APBD, dengan alamat akses <http://gorontaloprov.e-monep.com>

Aplikasi e-Monev NG merupakan sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara berkala. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja dan anggaran dengan menyajikan data realisasi fisik dan keuangan, capaian output, serta permasalahan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi.

Pemanfaatan aplikasi e-Monev mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu pelaporan kinerja, serta menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Gambar 2.1. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

2. APLIKASI SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yaitu Sistem yang digunakan untuk menampung data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data calon debitur, akad kredit (debitur), dan transaksi pembayaran/ angsuran KUR yang bisa di akses Pemerintah Daerah dan Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan. Dinas/ pemerintah daerah bisa mengunggah data calon debitur dan sebagai acuan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM

No	Kode Pemda	Nama Pemda	Jumlah Calon Debitur	Total Rencana Kredit	Jumlah Debitur	Total Nilai Akad
1	7301	Kab. Gorontalo	115	853,000,000	0	0
2	7502	Kab. Boalemo	3,062	10,000,015	694	17,679,345,000
3	7503	Kab. Bonebolango	1,031	5,500,500,000	309	7,589,000,000
4	7504	Kab. Pohuwato	161	1,000,000	44	736,000,000
5	7505	Kab. Gorontalo Utara	43	10,000,000	12	141,000,000
6	7571	Kota Gorontalo	1,562	23,561,500,000	465	8,975,000,000
		Total	8,937	30,476,000,015	1,804	38,116,948,000

Gambar 2.2. Aplikasi SIKP

3. Online Data System (ODS)

Online Data Sistem (ODS) Koperasi adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aplikasi ODS ini telah digunakan sejak tahun 2010 untuk mendukung data agregat. Data ODS Koperasi secara individu meliputi data sebagai berikut :Nama Koperasi, b. Nomor & Tanggal Badan Hukum, Alamat tempat kedudukan, Identitas Koperasi (Jenis & Kelompok), Sektor usaha koperasi, Data Kepengurusan,

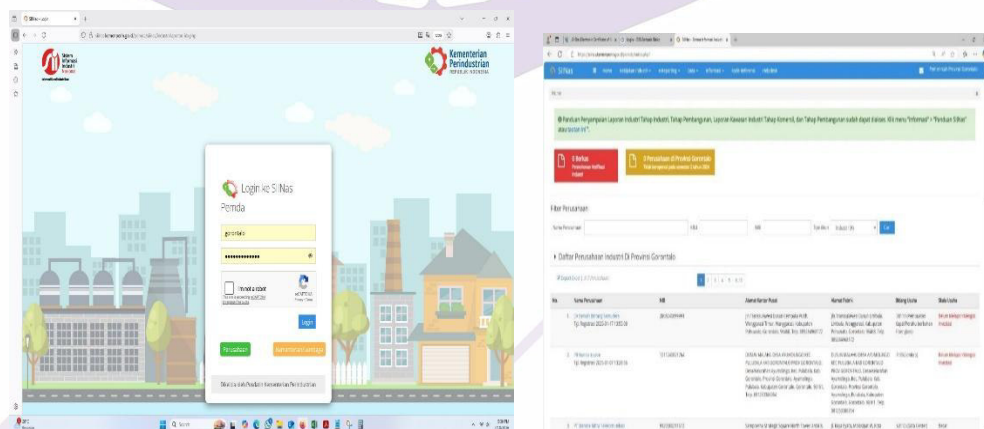
data Peningkatan & Kesehatan Koperasi, Data Indikator Keuangan, Data Indikator kelembagaan.



Gambar 2.3. Online Data System (ODS)

4. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi, dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif yang didukung data yang valid dan up to date. Up dating data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) wajib dilakukan oleh masing-masing industri. Data ke SIINas, yang berisi antara lain: kapasitas terpasang, mesin yang digunakan, kebutuhan bahan baku, penggunaan energi, penggunaan air baku, pengolahan limbah dan sebagainya.



Gambar 2.4. Aplikasi SIINas

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan :

registrasi di Website SIINas yang beralamat siinas.kemenperin.go.id proses ini hanya dilakukan satu kali saja. Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
2. Menyiapkan dokumen asli
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada),
 - d. Tanda Daftar Perusahaan,
 - e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
 - f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.

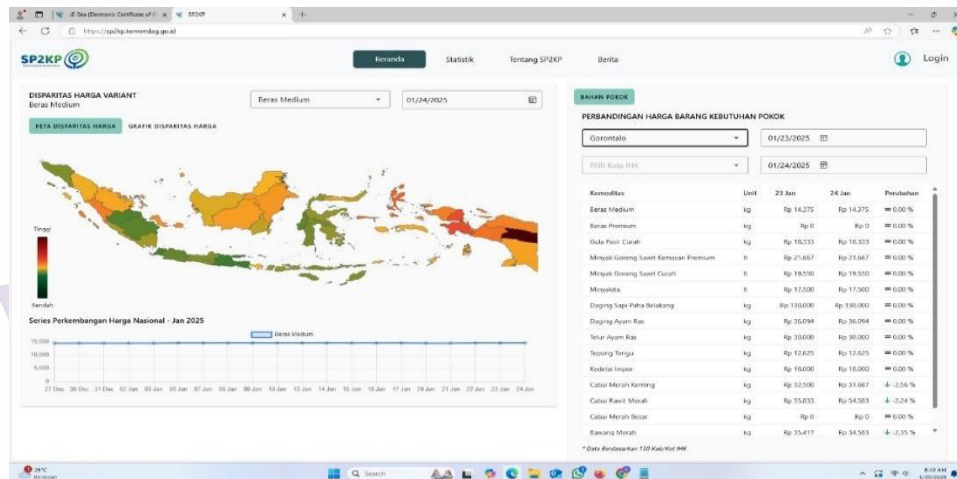
3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan public

2. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

merupakan website pusat informasi mengenai harga pangan yang digagas oleh Kementerian Perdagangan. Mengacu pada UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bapokting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Kemendag bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok adalah sebuah bukti akan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan arus perdagangan komoditas strategis di seluruh Indonesia, Karena dengan adanya Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok ini diharapkan dapat terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan yang akan mempertajam dan memperjelas indikasi-indikasi sistem perdagangan dan arus lalu-lintas

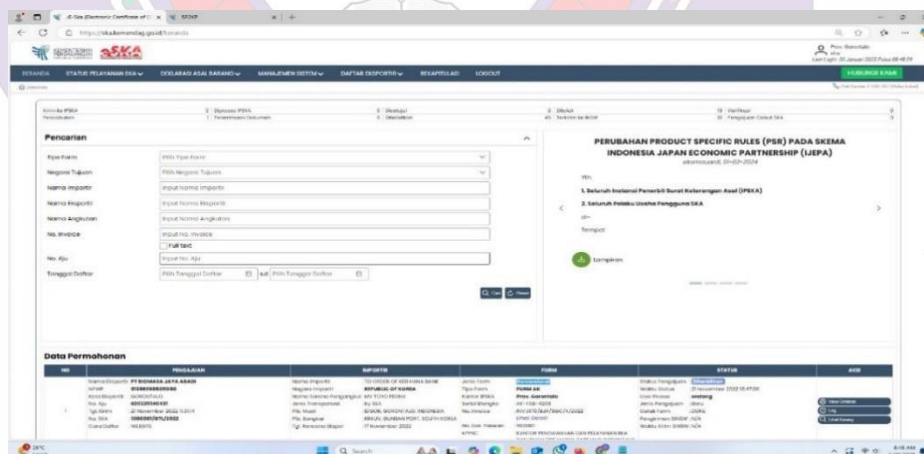
komoditas, selain itu dengan tersedianya data harga yang lengkap, kontinyu dan mutakhir, pada Aplikasi ini akan memungkinkan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan, untuk menjadi lebih tanggap terhadap indikasi-indikasi.



Gambar 2.5. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

3. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.



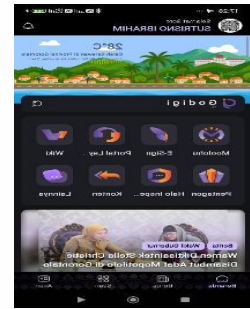
Gambar 2.6. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

4. Aplikasi Godigi

Sistem Absensi GoDigi Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk pencatatan kehadiran aparatur secara

elektronik sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Sistem ini berfungsi untuk merekam data kehadiran pegawai secara real time sebagai dasar pengendalian disiplin kerja dan pendukung pengelolaan manajemen kepegawaian.

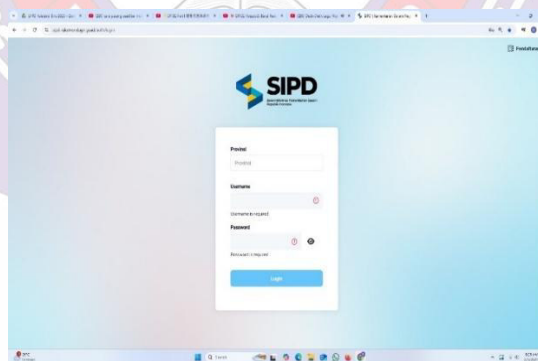
Pemanfaatan Sistem Absensi GoDigi mendukung peningkatan disiplin, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja aparatur, serta menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.



5. Aplikasi SIPD

Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. SIPD berfungsi sebagai sarana penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Pemanfaatan SIPD mendukung peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, akurasi data, serta akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, dan menjadi salah satu instrumen utama dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.

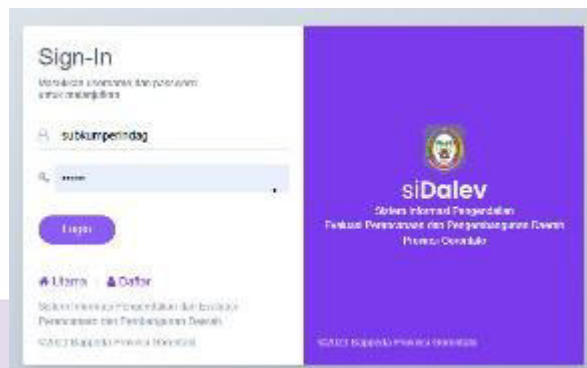


Gambar 2.8. Aplikasi SIPD (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>)

6. Aplikasi siDalev

Aplikasi siDalev merupakan aplikasi yang digunakan untuk evaluasi terhadap rencana kerja secara berkala pada semua dinas yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi yang dimuat dalam aplikasi ini

adalah evaluasi terhadap output Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan.



Gambar 2.9. Aplikasi siDalev (<https://sidalev.gorontaloprov.go.id/auth>)



A. Capaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah pada sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. Capaian tersebut diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2025 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	KARITERIA	INTERVAL REALISASI (%)	KODE
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor koperasi UKM industri dan perdagangan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Mengacu Pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5,71	103,07	
		Inflasi (%)	1,86	0,88	211,37	

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Dinas Kumperindag Provinsi

Gorontalo. Pada tahun 2025, indikator tujuan strategis tersebut terdiri atas:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,71 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 5,54 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 103,07 persen dari target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah mampu tumbuh lebih baik dari yang diproyeksikan, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor serta efektivitas kebijakan dan program pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

- **Inflasi**

Capaian indikator inflasi tahun 2025 sebesar 211,36%, diperoleh dari perbandingan target sebesar 1,86% dengan realisasi sebesar 0,88%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengendalian inflasi melampaui target yang telah ditetapkan, dimana tingkat inflasi lebih rendah dari yang ditargetkan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah berjalan cukup efektif, sehingga tekanan inflasi dapat diminimalisir.

Mengacu Pada Renstra 2025-2029 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5,71	103,07	

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Capaian realisasi indikator kinerja atas sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Mengacu Pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tabel 3.4. Tingkat Pencapaian sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	74,88	79,86	106,65	
2	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas (koperasi)	20	18	90,00	
		Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)	80	43	53,75	
	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)	0,9	19,97	2218,89	
	Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor (USD)	15.548.086	52.504.306,66	337,69	

*Berdasarkan Renstra 2023-2026

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mengacu pada Renstra 2023-2026 memiliki 5 (lima) indikator sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Provinsi Gorontalo.

❖ Nilai saki

Capaian realisasi indikator kinerja *Nilai SAKIP* Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebesar 106,65. Capaian tersebut, apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 74,88, menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan terlampaui secara signifikan.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta penguatan penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten pada seluruh tahapan manajemen kinerja

❖ Jumlah koperasi Berkualitas

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Koperasi Berkualitas* Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 18 koperasi, atau telah mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 20 koperasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk memenuhi target secara keseluruhan.

Penilaian koperasi berkualitas didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang mencakup empat aspek utama, yaitu aspek tata kelola, kinerja keuangan, profil risiko, dan permodalan. Dengan mempertimbangkan pemenuhan keempat aspek tersebut, capaian yang diperoleh mencerminkan kondisi koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sesuai ketentuan.

❖ Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah UKM yang Berdaya Saing* pada tahun 2025 tercatat sebanyak 43 UKM. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 UKM, capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum sepenuhnya mencapai target, dengan tingkat pencapaian sekitar 53,75 persen.

Belum optimalnya capaian indikator ini dipengaruhi oleh pemenuhan kriteria UKM berdaya saing, keterbatasan kapasitas sebagian UKM dalam memenuhi standar yang ditetapkan, serta proses pemutakhiran data dan evaluasi UKM pada tahun berjalan. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh mencerminkan UKM yang telah memenuhi kriteria berdaya saing.

❖ Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)

Capaian realisasi indikator kinerja *Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah* pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,97 persen, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,9 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Industri

Kecil dan Menengah yang signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Indikator kinerja urusan industri "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah " Tahun 2025 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2025 = 13.896 IKM

Jumlah industri tahun 2024 = 11.583 IKM

❖ **Jumlah Nilai Ekspor**

Pada tahun 2025, capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Nilai Ekspor* tercatat sebesar USD 52.504.306,66, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar USD 15.548.086. Capaian tersebut menunjukkan kinerja ekspor yang sangat baik dan melampaui ekspektasi yang telah direncanakan.

Data capaian nilai ekspor tersebut diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dan data Bea Cukai Provinsi Gorontalo. Adapun komoditas ekspor yang berkontribusi pada capaian tahun 2025 meliputi molases, wood pellet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, dan kepiting, yang mencerminkan keberagaman komoditas unggulan daerah dalam mendukung kinerja ekspor.

✚ **Mengacu Pada Renstra 2025-2029 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Tabel 3.5. Tingkat Pencapaian sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (%)	70	70,25	100,36	
2	Peningkatan UMKM Naik kelas	Presentase UMKM Naik Kelas (%)	0,7	0,28	40	
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (%)	16	66,67	416,68	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
	produksi dan Teknologi IKM	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan (%)	0,3	5,31	1770	
4	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan Nilai Ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting (%)	2	170,26	8513	
		Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	10	49,45	494,5	
		Persentase penyelesaian pengaduan konsumen (%)	95	100	105,26	
		Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi (%)	60	78,39	130,65	

❖ Persentase Koperasi Aktif (%)

Capaian indikator persentase koperasi aktif pada tahun berjalan terealisasi sebesar 70,25% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mendorong keaktifan koperasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan kewajiban kelembagaan, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh OPD. Selain itu, perbaikan aspek administrasi dan tata kelola koperasi turut berkontribusi terhadap peningkatan status keaktifan koperasi.

Namun demikian, masih terdapat sebagian koperasi yang belum aktif secara optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, rendahnya partisipasi anggota, serta kendala dalam pengembangan usaha koperasi.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan pembinaan dan pengawasan, penguatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pengembangan usaha agar koperasi dapat beroperasi secara

berkelanjutan dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

❖ **Persentase UMKM Naik Kelas (%)**

Realisasi indikator Persentase UMKM Naik Kelas pada tahun berjalan sebesar 0,28% dari target yang ditetapkan sebesar 0,7%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 40%. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan UMKM naik kelas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha, serta belum optimalnya pemenuhan aspek legalitas, standardisasi, dan kualitas produk. Selain itu, keterbatasan jangkauan program pembinaan dan pendampingan serta belum terintegrasinya dukungan lintas sektor turut mempengaruhi percepatan peningkatan kelas UMKM.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan upaya peningkatan pembinaan dan pendampingan secara lebih terarah, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, serta pengembangan kemitraan dan rantai pasok. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan guna mendorong UMKM agar mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing secara berkelanjutan.

❖ **Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (%)**

Realisasi indikator Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah pada tahun berjalan sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 16%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 416,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan rencana pembangunan IKM jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan IKM, termasuk penyusunan dan implementasi rencana pembangunan yang lebih progresif, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Selain itu, adanya komitmen

pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan IKM turut mempercepat realisasi capaian indikator.

❖ Persentase IKM yang difasilitasi stimulan (%)

Realisasi indikator Persentase IKM yang difasilitasi stimulan pada tahun berjalan sebesar 5,31% dari target yang ditetapkan sebesar 0,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 1.770%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi stimulan kepada IKM jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan program bantuan stimulan, meningkatnya jumlah IKM yang memperoleh fasilitasi, serta adanya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, proses identifikasi dan verifikasi calon penerima yang lebih diefektifkan turut mempercepat realisasi program.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan potensi dan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, ke depan jika dimungkinkan diperlukan penyesuaian target yang lebih proporsional dan terukur pada renstra perubahan 2025, disertai peningkatan kualitas fasilitasi agar bantuan yang diberikan tidak hanya menjangkau lebih banyak IKM, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing secara berkelanjutan.

❖ Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting (%)

Realisasi indikator Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada tahun berjalan sebesar 170,26% dari target yang ditetapkan sebesar 2%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 8.513%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi pengendalian harga jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan kegiatan intervensi yang meningkat, seperti operasi pasar, pasar murah, pemantauan harga, serta koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, respons cepat terhadap potensi gejolak harga pada momen tertentu turut mendorong peningkatan realisasi indikator.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dan belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Ke depan, jika dimungkinkan diperlukan penyesuaian target yang lebih proporsional dan terukur pada renstra perubahan 2025-2029, serta penguatan efektivitas intervensi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan, tetapi juga pada dampak nyata dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

❖ Persentase peningkatan nilai ekspor

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Nilai Ekspor pada tahun berjalan sebesar 49,45% dari target yang ditetapkan sebesar 10%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 494,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan nilai ekspor jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas unggulan daerah, perluasan akses pasar ekspor, serta dukungan fasilitasi pemerintah dalam promosi, kemitraan, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, perbaikan pada aspek logistik dan distribusi turut mendorong kelancaran arus barang ke pasar internasional.

Namun demikian diperlukan penguatan strategi diversifikasi produk, peningkatan daya saing melalui standarisasi dan hilirisasi, serta keberlanjutan fasilitasi bagi pelaku usaha agar pertumbuhan ekspor dapat terjaga secara konsisten.

❖ Persentase penyelesaian pengaduan konsumen (%)

Realisasi indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada tahun berjalan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian pengaduan konsumen melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas mekanisme penanganan pengaduan, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait seperti BPSK dan instansi teknis, serta respons yang cepat terhadap setiap laporan yang masuk. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara resmi turut mendorong optimalnya penyelesaian kasus.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas layanan pengaduan, meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

❖ **Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi (%)**

Realisasi indikator Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi pada tahun berjalan sebesar 78,39% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 130,65%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian komoditi terakreditasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas layanan laboratorium, ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang cukup, serta kompetensi SDM yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengujian dan standardisasi produk turut mendorong peningkatan jumlah komoditi yang diuji secara terakreditasi.

Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pengujian melalui penguatan akreditasi, peningkatan kompetensi tenaga penguji, penyediaan sarana prasarana yang optimal serta pengembangan cakupan layanan agar mampu mendukung daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas.

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Yang Lalu

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

✚ **Mengacu Pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian			
		2022	2023	2024	2025
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,04			
	Laju Inflasi (%)	5,15			
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		4,5	3,98	5,71
	Laju Inflasi (%)		3,88	2,87	0,88

- ❖ Capaian kinerja indikator pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan dinamika perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,50 persen, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 3,98 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan mencapai 5,71 persen, yang menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja perekonomian daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi lintas sektor, didukung oleh peningkatan kinerja sektor-sektor utama serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada level yang lebih baik dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi lintas sektor, didukung oleh peningkatan kinerja sektor-sektor utama serta

efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada level yang lebih baik dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya.

- ❖ Capaian kinerja indikator inflasi Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, inflasi tercatat sebesar 3,88 persen, selanjutnya pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,87 persen, dan pada tahun 2025 sebesar 0,88 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat inflasi dari tahun ke tahun. Perubahan tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dinamika harga komoditas, kondisi pasokan dan distribusi barang, serta kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Dengan demikian, capaian inflasi tahun 2025 mencerminkan kondisi stabilitas harga yang terjaga sesuai dengan perkembangan perekonomian pada tahun berjalan.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, maka didukung pula oleh tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian.

Mengacu Pada Renstra 2025-2029 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian			
		2022	2023	2024	2025
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi		4,5	3,98	5,71

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Mengacu Pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Adapun sasaran pemerintah daerah yang menjadi tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026 yaitu meningkatnya tata Kelola pemerintahan, meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian daerah. Dari tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut maka untuk pencapaian sasaran strategis didukung oleh capaian 5 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	34,38 %			
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	66			
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	212			
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	0,19%			
Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100%			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP		78,41	79,46	79,86
Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Berkualitas		22 Koperasi	20 Koperasi	18 Koperasi
	Jumlah UKM yang berdaya saing		50 UKM	43 UKM	43 UKM
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah		-36,34	0,38	19,97
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor		\$ 37.959.205	\$ 52.967.332,45	52.504.306,66

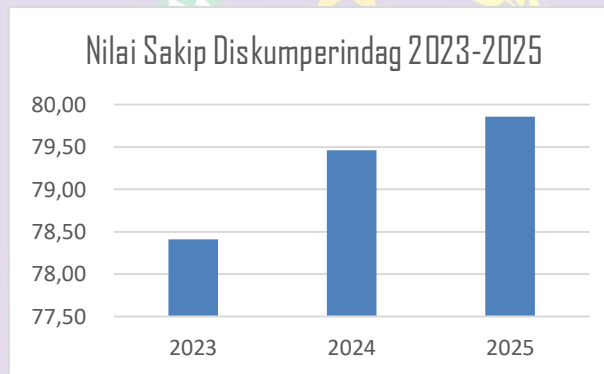
Untuk sasaran strategis dinas Kumperindag tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.). Kemudian untuk tahun 2022 mengacu pada renstra revisi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

indikator kinerja dibawah ini merupakan indikator yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026). Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja dari tahun 2023 sebagai berikut :

a. Nilai Sakib

Capaian realisasi indikator kinerja *Nilai SAKIP* pada tahun 2025 mencapai 79,86. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 79,46, capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan konsistensi kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program.

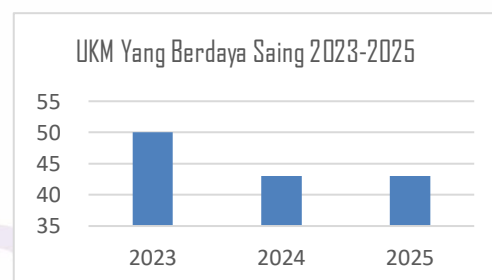
Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,41, capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,45 poin, yang mencerminkan penguatan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja “jumlah koperasi berkualitas” adalah sebesar 18 koperasi. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 2 koperasi atau 10% dibandingkan dengan capaian 2024 dan 18,2% dibandingkan tahun 2023. capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan dengan jumlah yang sama, yang dipengaruhi oleh hasil penilaian Kesehatan koperasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing



Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah UKM yang Berdaya Saing* pada tahun 2025 mencapai 43 UKM. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga sebesar

43 UKM, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stabil, tanpa perubahan jumlah UKM berdaya saing.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 50 UKM, capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 7 UKM. Penurunan tersebut mencerminkan perbedaan jumlah UKM yang memenuhi kriteria berdaya saing pada tahun berjalan, seiring dengan dinamika usaha UKM, serta proses pemutakhiran data.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian realisasi indikator kinerja *Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah* pada tahun 2025 mencapai 19,97 persen, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,38 persen, terjadi kenaikan sebesar 19,59 poin persentase, yang mencerminkan penguatan dan pemulihan pertumbuhan IKM secara bertahap.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercatat -36,34 persen, capaian tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat substansial, dengan selisih 56,31 poin persentase, sekaligus menandai perubahan kondisi dari kontraksi menjadi pertumbuhan positif yang kuat.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian realisasi indikator kinerja *Jumlah Nilai Ekspor* pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 52.504.306,66. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar USD 52.967.332,45, nilai ekspor tahun 2025 mengalami penurunan sebesar USD 463.025,79 atau sekitar 0,87 persen, yang menunjukkan kondisi relatif stagnan dengan fluktuasi ringan (Perbedaan nilai lebih dipengaruhi dinamika normal pasar (harga, volume, permintaan), bukan penurunan kinerja struktural)



Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar USD 7.959.205, nilai ekspor tahun 2025

menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar USD 44.545.101,66 atau meningkat sekitar 559,5 persen. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kinerja ekspor secara substansial dalam tiga tahun terakhir.

✚ **Mengacu Pada Renstra 2025-2029 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (%)				70,25
2	Peningkatan UMKM Naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas (%)				0,28
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (%)				66,67
		Persentase IKM yang difasilitasi stimulan (%)				5,31
4	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan Nilai Ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting (%)				170,3
		Persentase peningkatan nilai ekspor (%)				49,45
		Persentase penyelesaian pengaduan konsumen (%)				100
		Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi (%)				78,39

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada

periode perencanaan Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data pembandingan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 menjadi baseline awal dalam pengukuran kinerja untuk periode perencanaan tersebut.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Mengacu pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari beberapa indikator kinerja dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target RPD	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	5,54	5,71	103,1	
	Laju Inflasi (%)	1,86	0,88	47,31	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a). Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,54 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,07 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mampu melampaui target yang direncanakan, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor serta dukungan program pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

b). Laju Inflasi

Realisasi kinerja indikator inflasi sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 0,88 persen. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPD sebesar 1,86 persen, tingkat capaian kinerja mencapai 47,31 persen. Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi inflasi belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Namun demikian, realisasi inflasi yang berada di bawah target menunjukkan bahwa tingkat inflasi daerah lebih terkendali dibandingkan sasaran yang direncanakan, sehingga mencerminkan kondisi stabilitas harga yang relatif terjaga sesuai dengan perkembangan perekonomian pada tahun berjalan.

✚ **Mengacu pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,54	5,71	103,1	

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

✚ **Mengacu pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung juga oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu 5 (lima) indikator kinerja yang akan dibandingkan dengan target Renstra.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
					/Kode
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	74,88	79,86	106,65	
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	18 Koperasi	90	
	Jumlah UKM yang berdaya saing	80	43 UKM	53,75	
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,90%	19,97	2218,89	
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	\$15.548.086	\$52.504.306,66	337,68	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut adalah :

a. Nilai Sakib

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Nilai SAKIP tercatat sebesar 79,86. Angka ini melampaui target Renstra 2023-2026 yang ditetapkan sebesar 74,88, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,65 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan lebih efektif dan konsisten dibandingkan dengan target perencanaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaporan, serta konsistensi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Jumlah Koperasi Berkualitas tercatat sebanyak 18 koperasi. Apabila dibandingkan dengan target Renstra yang ditetapkan sebesar 20 koperasi, tingkat capaian kinerja mencapai 90 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi telah berjalan dengan baik. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek pemeringkatannya yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Jumlah UKM yang Berdaya Saing tercatat sebanyak 43 UKM. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 UKM, tingkat capaian kinerja mencapai 53,75 persen.

Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dimana capaiannya hanya sebesar 45,24% dari target yang ditetapkan 0,84% dan realisasi 0,38%.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Sasaran Strategis Nilai Ekspor tercatat sebesar US\$52.504.306,66. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar US\$15.548.086, tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 337,7 persen. Data ini diperoleh dari Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kumperindag dan Bea Cukai Provinsi Gorontalo.

✚ **Mengacu pada Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo**

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Kode
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	70	74,72	106,74	
Peningkatan UMKM Naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	0,7	0,28	40	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	16	66,67	416,69	
	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	0,3	5,31	1770	
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	2	400	20000	
	Persentase peningkatan nilai ekspor	10	49,45	494,5	
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	95	100	105,26	
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	60	78,39	130,65	

❖ **Persentase Koperasi Aktif**

pada indikator Persentase Koperasi Aktif menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 74,72 persen, melampaui target Renstra sebesar 70 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 106,74 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator tersebut telah mencapai bahkan melampaui target jangka

menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan koperasi di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan serta aktivitas usaha koperasi di daerah

❖ **Presentase UMKM Naik Kelas**

Pada indikator Persentase UMKM Naik Kelas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 0,28 persen dari target Renstra sebesar 0,70 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 40 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo

❖ **Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah**
pada indikator Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 66,67 persen, melampaui target Renstra sebesar 16 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 416,69 persen. Hal ini menunjukkan percepatan dalam rekomendasi penyusunan RPIK di Provinsi Gorontalo

❖ **Persentase IKM yang difasilitasi stimulan**

capaian kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu realisasi tahun 2025 sebesar 5,31 persen, dari target Renstra sebesar 0,30 persen, tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 1.770 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya fasilitasi stimulan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rangka mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi IKM di Provinsi Gorontalo

❖ **Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting**

Capaian kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Dimana realisasi tahun 2025 sebesar 400 persen, dari target Renstra sebesar 2 persen, tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 20.000 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya intervensi pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok dan barang penting melalui berbagai kegiatan seperti pemantauan harga, operasi pasar, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait telah dilaksanakan secara intensif dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat.

❖ Persentase peningkatan nilai ekspor

Capaian kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor daerah baik melalui pelabuhan Gorontalo maupun melalui Pelabuhan diluar Gorontalo serta upaya penguatan daya saing produk dan perluasan akses pasar ekspor.

❖ Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

capaian kinerja pada indikator tersebut telah mencapai dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen telah berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen di Provinsi Gorontalo

❖ Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

capaian kinerja pada indikator tersebut telah mencapai dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 60% dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pengujian komoditi terakreditasi telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan mutu serta daya saing produk di Provinsi Gorontalo

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

1). Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

✚ Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan indikator kinerja lainnya dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3*	5,71	107,74	
		Inflasi (%)	2,5% ± 1% Batas bawah 1,5% Batas atas 3,5%	0,88	35,2-88	

Rujukan RPJMN 2025-2028

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2025 tercatat sebesar 5,71 persen. Dibandingkan dengan standar nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, capaian tersebut telah melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah berada pada kondisi yang relatif baik dan didukung oleh pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang berjalan secara efektif.

b. Laju Inflasi

Realisasi indikator inflasi Provinsi Gorontalo tahun 2025 tercatat sebesar 0,88 persen. Apabila dibandingkan dengan target inflasi nasional tahun 2025 sebesar 2,5 persen ± 1 persen, maka tingkat inflasi Provinsi Gorontalo berada di bawah rentang target nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi daerah relatif terkendali, meskipun perlu tetap diantisipasi agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3*	5,71	107,74	

2) Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari 5 (lima) indikator kinerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu realisasi kinerja sasaran strategis jika dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional (%)	Capaian (%)	Kriteria /Kode
Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Nilai SAKIP	79,86	>90-100 AA	BB	
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah(Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan	Jumlah Koperasi Berkualitas	18 Koperasi	-	-	
	Jumlah UKM yang berdaya saing	43 UKM	-	-	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional (%)	Capaian (%)	Kriteria
					/Kode
Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	19,97	-	-	
	Jumlah Nilai Ekspor	\$52.504.306,66	USD 315 miliar		

a. Nilai Sakib

Target nasional Nilai SAKIP diarahkan pada kategori AA (Sangat Memuaskan) sebagai standar kinerja tertinggi dalam penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah. Capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target nasional tersebut, capaian OPD belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, namun telah menunjukkan penerapan SAKIP yang sangat baik dan menjadi modal penting untuk peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan menuju kategori yang lebih tinggi.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Indikator jumlah koperasi berkualitas tahun 2025 diukur berdasarkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas sesuai ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM. Hingga tahun 2025, belum terdapat target nasional kuantitatif yang ditetapkan secara seragam, sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra daerah serta tren peningkatan kualitas koperasi pada tahun sebelumnya.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Kebijakan nasional tidak menetapkan angka "jumlah UKM berdaya saing" per provinsi, melainkan arah kebijakan dan kriteria peningkatan daya saing UKM. UKM dikategorikan berdaya saing apabila telah memenuhi Sebagian atau seluruh indikator Memiliki legalitas usaha (NIB, PIRT/Halal/sertifikasi lain), Peningkatan kualitas produk dan kemasan, Akses pasar digital / ekspor / kemitraan, Penerapan standar

mutu dan manajemen usaha, Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi.

Hingga tahun 2025 belum terdapat target nasional kuantitatif yang ditetapkan secara seragam, sehingga capaian kinerja OPD dievaluasi berdasarkan standar nasional berbasis kriteria serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Capaian OPD tahun 2025 sebesar 43 UKM berdaya saing menunjukkan adanya peningkatan kualitas UKM binaan, meskipun masih diperlukan penguatan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah UKM yang memenuhi kriteria daya saing.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Indikator Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun 2025 diukur berdasarkan jumlah IKM yang mengalami peningkatan kinerja usaha sesuai kriteria pembinaan. Hingga tahun 2025 belum terdapat target nasional kuantitatif yang ditetapkan secara seragam untuk indikator ini, sehingga evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan nasional penguatan IKM serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Capaian OPD tahun 2025 sebanyak 43 IKM menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas IKM binaan, meskipun masih diperlukan penguatan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan persentase IKM yang mengalami peningkatan kinerja.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian indikator nilai ekspor OPD tahun 2025 tercatat sebesar USD 52.504.306,66. Dibandingkan dengan standar nasional nilai ekspor sebesar USD 315 miliar, capaian tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional, meskipun secara nominal masih berada di bawah target agregat nasional.

 Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Kode
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	± 60-75	74,72	99,62	
Peningkatan UMKM Naik Kelas	Presentase UMKM Naik Kelas	Umumnya <1% dari total UMKM per tahun	0,28	28	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	40 - 70	66,67	95,24	
	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	±1% – 5% dari total IKM	5,31	106,20	
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	100% – 200%	400	200,00	
	Persentase peningkatan nilai ekspor	5-15	49,45	329,67	
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	90 - 100	100	100	
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	60-80	78,39	97,99	

❖ **Persentase Koperasi Aktif**

Perbandingan dengan capaian daerah lain dan acuan nasional menunjukkan bahwa Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Gorontalo sebesar 74,72 persen berada pada kategori baik. Secara umum, tingkat koperasi aktif di berbagai daerah berada pada kisaran 60–70 persen dari total koperasi yang terdaftar. Dengan capaian tersebut, Provinsi Gorontalo tidak hanya melampaui target Renstra sebesar 70 persen, tetapi juga berada di atas rata-rata capaian beberapa daerah, yang menunjukkan bahwa tingkat keaktifan koperasi di daerah ini relatif lebih baik serta mencerminkan adanya peningkatan pembinaan dan pengelolaan koperasi yang cukup efektif

❖ **Presentase UMKM Naik Kelas**

Perbandingan dengan capaian daerah lain dan acuan nasional menunjukkan bahwa Persentase UMKM Naik Kelas di Provinsi

Gorontalo sebesar 0,28 persen masih relatif rendah. Secara umum, peningkatan UMKM naik kelas di berbagai daerah masih berada pada kisaran di bawah 1 persen dari total UMKM binaan, mengingat proses peningkatan skala usaha memerlukan waktu, penguatan kapasitas usaha, serta dukungan akses pembiayaan dan pasar. Dengan demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Provinsi Gorontalo masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan agar semakin banyak UMKM yang mampu berkembang dan naik kelas.

❖ **Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah**

Secara nasional tidak terdapat standar persentase baku terkait fasilitasi Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah. Namun pada berbagai daerah, persentase kabupaten/kota yang telah memiliki atau difasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan industri umumnya berada pada kisaran 40 hingga 70 persen dari total kabupaten/kota yang ada. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perencanaan pembangunan industri sebagai bagian dari penguatan sektor industri daerah.

❖ **Persentase IKM yang difasilitasi stimulan**

Perbandingan dengan capaian daerah lain dan standar nasional menunjukkan bahwa Persentase IKM yang difasilitasi stimulan di Provinsi Gorontalo sebesar 5,31 persen tergolong cukup baik. Secara umum, fasilitasi stimulan kepada IKM di berbagai daerah masih terbatas karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta jumlah IKM yang menjadi sasaran pembinaan setiap tahunnya. Oleh karena itu, persentase IKM yang difasilitasi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan total populasi IKM yang ada. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya memberikan dukungan stimulan kepada pelaku IKM guna mendorong peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, serta pengembangan usaha industri kecil dan menengah di daerah

- ❖ **Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting**
 secara nasional tidak terdapat standar persentase baku terkait intervensi pengendalian harga bahan pokok dan barang penting, karena pelaksanaannya bersifat situasional dan menyesuaikan dengan dinamika harga di pasar. Pada berbagai daerah, capaian indikator ini umumnya berada pada kisaran 100 hingga 200 persen dari target yang direncanakan. Dengan capaian sebesar 400 persen, Provinsi Gorontalo menunjukkan tingkat respons yang cukup tinggi dalam melakukan langkah-langkah stabilisasi harga melalui berbagai kegiatan pemantauan harga, operasi pasar, serta koordinasi distribusi bahan pokok.
- ❖ **Persentase peningkatan nilai ekspor**
 Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor nasional yang dalam kondisi normal berada pada kisaran 5–15 persen per tahun, capaian peningkatan nilai ekspor Provinsi Gorontalo sebesar 49,45 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap komoditas unggulan daerah serta penguatan akses pasar ekspor.
- ❖ **Persentase penyelesaian pengaduan konsumen**
 Secara umum, tingkat penyelesaian pengaduan konsumen pada berbagai daerah ditargetkan berada pada kisaran 90 hingga 100 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan capaian 100 persen, Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa seluruh pengaduan konsumen yang masuk telah dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas mekanisme penanganan pengaduan konsumen serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen
- ❖ **Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi**
 Secara umum, persentase pengujian komoditi terakreditasi pada laboratorium pemerintah diberbagai daerah berada pada kisaran 60 hingga 80 persen dari total pengujian yang dilakukan. Dengan capaian sebesar 78,39 persen, kinerja layanan pengujian komoditi di Provinsi

Gorontalo tergolong baik dan telah mendekati praktik optimal layanan laboratorium terakreditasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar pengujian yang dilakukan telah memenuhi standar kompetensi laboratorium yang diakui secara nasional melalui akreditasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2025 tercatat sebesar 5,71 persen, masih berada di bawah target RPD 2023–2026 sebesar 6,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun secara umum tetap berada pada tren positif dan melampaui standar nasional.

Belum tercapainya target RPD antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya pemulihan pada beberapa sektor utama, khususnya sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing usaha. Selain itu fluktuasi harga komoditas turut memengaruhi stabilitas aktivitas ekonomi daerah.

Sebagai upaya peningkatan kinerja, pemerintah daerah telah melakukan penguatan program hilirisasi produk unggulan, pemberdayaan UMKM dan IKM, serta perluasan akses pasar dan investasi. Upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan belanja produktif juga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi

Realisasi inflasi Provinsi Gorontalo tahun 2025 tercatat sebesar 0,88 persen, berada di bawah target RPD 2023–2026 sebesar 1,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi daerah terkendali, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Rendahnya tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh efektivitas langkah pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksanaan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Selain itu, stabilitas pasokan dan harga komoditas utama serta terkendalinya tekanan permintaan turut berkontribusi terhadap capaian inflasi yang relatif rendah.

Sebagai upaya menjaga keseimbangan inflasi ke depan, pemerintah daerah telah melakukan penguatan sistem pemantauan harga, peningkatan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan, serta optimalisasi program stabilisasi harga. Langkah-langkah tersebut diarahkan agar inflasi tetap berada dalam rentang yang sehat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP

Realisasi indikator Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan “Nilai Sakib” tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik), menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Capaian ini didukung oleh perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja serta meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan pelaporan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada penguatan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi dan pemanfaatan hasil evaluasi. Untuk peningkatan kinerja, telah dilakukan penguatan pembinaan SAKIP, penyempurnaan indikator kinerja berorientasi hasil, dan peningkatan kapasitas aparatur

guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

d. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas

Realisasi indikator Jumlah Koperasi Berkualitas tahun 2025 mencapai 18 koperasi dari target 20 koperasi, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas koperasi binaan, namun masih terdapat sebagian koperasi yang belum memenuhi seluruh kriteria koperasi berkualitas sesuai ketentuan.

Belum tercapainya target dipengaruhi oleh belum optimalnya pemenuhan aspek kelembagaan dan tata kelola, khususnya pelaksanaan RAT tepat waktu, kelengkapan administrasi, serta keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Selain itu, variasi tingkat kesiapan koperasi dalam menerapkan prinsip tata kelola dan pengelolaan usaha juga memengaruhi capaian kinerja.

Sebagai alternatif solusi dan upaya perbaikan, pemerintah daerah telah melakukan pendampingan intensif koperasi, fasilitasi pelaksanaan RAT, serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi melalui pelatihan dan asistensi. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan kriteria koperasi berkualitas dan mendorong pencapaian target pada periode berikutnya.

e. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing

Realisasi indikator Jumlah UKM Berdaya Saing tahun 2025 mencapai 43 UKM dari target 80 UKM, sehingga capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum meratanya kapasitas UKM dalam pemenuhan legalitas, standar mutu produk, dan akses pasar, serta keterbatasan pembinaan intensif. Untuk meningkatkan capaian kinerja, telah dilakukan penguatan pendampingan UKM, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, serta perluasan

akses pemasaran dan kemitraan usaha guna mendorong peningkatan jumlah UKM berdaya saing.

f. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Realisasi Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah tahun 2025 mencapai 19,97 persen, melampaui target Renstra 2023–2026 sebesar 0,90 persen, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi IKM. Capaian ini didukung oleh upaya peningkatan efektivitas pendampingan, penguatan kapasitas produksi, serta dukungan legalitas dan pengembangan produk IKM. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja perlu dilakukan penguatan basis data IKM, penajaman sasaran pembinaan, dan peningkatan kualitas pendampingan serta akses pasar.

g. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.

Realisasi nilai ekspor tahun 2025 mencapai USD 52.504.306,66, melampaui target Renstra 2023–2026 sebesar USD 15.548.086, yang menunjukkan keberhasilan peningkatan kinerja ekspor daerah. Capaian ini didukung oleh peningkatan kualitas dan kapasitas produk ekspor, perluasan akses pasar, serta fasilitasi promosi dan identifikasi produk eksport. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja, telah dilakukan fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), misi dagang.

🚩 Mengacu pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026

a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2025 tercatat sebesar 5,71 persen, masih berada di bawah target RPD 2023–2026 sebesar 6,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun secara umum tetap berada pada tren positif dan melampaui standar nasional.

Belum tercapainya target RPD antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya pemulihan pada beberapa sektor utama, khususnya sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing usaha. Selain itu fluktuasi harga komoditas turut memengaruhi stabilitas aktivitas ekonomi daerah.

Sebagai upaya peningkatan kinerja, pemerintah daerah telah melakukan penguatan program hilirisasi produk unggulan, pemberdayaan UMKM dan IKM, serta perluasan akses pasar dan investasi. Upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan belanja produktif juga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indicator kinerja Persentase Koperasi Aktif

Realisasi tahun 2025 sebesar 74,72 persen, melampaui target Renstra sebesar 70 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 106,74 persen. Tercapainya kinerja sebesar 106,74 persen dari target Renstra menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan koperasi berjalan dengan baik. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan kelembagaan koperasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan revitalisasi koperasi di Kabupaten/kota. Selain itu, dukungan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga turut mendorong peningkatan keaktifan koperasi di daerah

c. Peningkatan UMKM Naik Kelas dengan indicator kinerja Presentase UMKM Naik Kelas

Realisasi tahun 2025 sebesar 0,28 persen dari target Renstra sebesar 0,70 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 40 persen. capaian kinerja pada indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Belum tercapainya target Persentase UMKM Naik Kelas dalam Renstra dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kapasitas usaha sebagian besar UMKM yang didominasi oleh usaha mikro, keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan, serta masih rendahnya kemampuan manajerial dan penguasaan teknologi produksi maupun pemasaran. Selain itu, proses peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil atau dari usaha kecil menjadi usaha menengah memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan peningkatan omzet, legalitas usaha, kualitas produk, serta perluasan akses pasar. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah UMKM yang dapat naik kelas setiap tahunnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan total populasi UMKM yang ada.

Untuk mendorong peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan berbagai upaya, antara lain melalui pembinaan dan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran melalui promosi dan pemanfaatan platform digital. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu berkembang dan naik kelas secara bertahap.

d. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM dengan indicator kinerja Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.

Tercapainya target Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM terhadap target Renstra antara lain dipengaruhi oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penyusunan dokumen perencanaan pembangunan industri di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota berjalan dengan baik, sehingga proses penyusunan dan pengintegrasian

dokumen rencana pembangunan industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dukungan kebijakan nasional di bidang pembangunan industri serta meningkatnya kesadaran daerah terhadap pentingnya perencanaan sektor industri juga turut mendorong tercapainya indikator tersebut.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan upaya fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan industri, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong integrasi rencana pembangunan industri dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah serta meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

e. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM dengan indikator kinerja Persentase IKM yang difasilitasi stimulan

realisasi tahun 2025 sebesar 5,31 persen, dari target Renstra sebesar 0,30 persen, tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 1.770 persen.

Tercapainya target Persentase IKM yang Difasilitasi Stimulan dalam Renstra dipengaruhi oleh adanya dukungan program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah yang dilaksanakan. Fasilitasi stimulan yang diberikan kepada pelaku IKM, seperti bantuan peralatan produksi, kemasan, halal serta dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha, turut mendorong peningkatan jumlah IKM yang memperoleh fasilitasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penguatan pembinaan dan pendampingan pelaku

IKM, peningkatan fasilitasi bantuan stimulan yang tepat sasaran, serta pengembangan kapasitas produksi dan kualitas produk IKM. Selain itu, upaya penguatan promosi produk juga terus dilakukan agar IKM yang telah difasilitasi mampu berkembang dan meningkatkan daya saing usahanya secara berkelanjutan

f. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting

Realisasi tahun 2025 sebesar 400 persen, dari target Renstra sebesar 2 persen, tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 20.000 persen. Tercapainya target Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting dalam Renstra disebabkan oleh pelaksanaan langkah-langkah pengendalian harga yang intensif dan terencana. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan pemantauan harga secara berkala, operasi pasar, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk distributor dan pemerintah kabupaten/kota. Kesigapan dalam merespons fluktuasi harga serta adanya rencana intervensi yang jelas membuat realisasi kegiatan pengendalian harga melebihi target yang ditetapkan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini, Pemerintah Provinsi terus melakukan:

1. Pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional dan modern.
2. Operasi pasar dan stabilisasi pasokan saat terjadi lonjakan harga.
3. Koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait, distributor, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Evaluasi dan pembaruan rencana intervensi berdasarkan data fluktuasi harga harian atau mingguan.

Upaya tersebut diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mencegah gejolak harga yang dapat berdampak pada inflasi daerah

g. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase peningkatan nilai ekspor

tersebut telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tercapainya target Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dalam Renstra dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya peningkatan permintaan terhadap komoditas unggulan dari Provinsi Gorontalo baik di pasar nasional maupun internasional. Kedua, pelaku usaha didukung melalui fasilitasi pemerintah daerah berupa penribitan Surat Keterangan Asal, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha berjalan efektif sehingga program ekspor dapat terlaksana sesuai rencana.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Pendampingan pelaku usaha dalam memenuhi standar kualitas dan regulasi ekspor.
2. Fasilitasi sertifikasi produk dan pengembangan branding agar lebih kompetitif di pasar internasional.
3. Penguatan akses pasar melalui partisipasi dalam pameran nasional serta platform digital.
4. Peningkatan kapasitas produksi melalui pelatihan, modernisasi peralatan, dan transfer teknologi.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekspor, meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB, serta memperkuat posisi Provinsi Gorontalo di pasar global.

h. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

Tercapainya target Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam Renstra disebabkan oleh mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang berjalan efektif dan responsif. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta BPSK telah melaksanakan seluruh proses mediasi, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa secara tepat waktu. sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi lintas instansi terkait turut mendukung tercapainya indikator ini. Kesigapan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi penyelesaian pengaduan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk dapat melakukan:

1. Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penyelesaian pengaduan.
2. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani pengaduan melalui pelatihan mediasi dan konsiliasi.
3. Sosialisasi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen.

Upaya ini diharapkan dapat menjaga kinerja penyelesaian pengaduan konsumen tetap optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan memastikan perlindungan hak konsumen di Provinsi Gorontalo berjalan efektif dan diharapkan juga ada dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini.

i. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indikator kinerja Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

Belum tercapainya target maksimal Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi dalam Renstra disebabkan oleh beberapa faktor antar lain proses akreditasi laboratorium memerlukan pemenuhan standar kompetensi peralatan yang lengkap, serta tenaga ahli yang bersertifikasi, sehingga tidak semua pengujian dapat langsung

terakreditasi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di beberapa pengujian menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah pengujian terakreditasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya dapat melakukan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan kapasitas laboratorium melalui penyediaan peralatan.
2. Pelatihan dan sertifikasi SDM laboratorium agar tenaga pengujian kompeten sesuai standar akreditasi.
3. Prioritas pengujian komoditi strategis atau unggulan daerah untuk memastikan sebagian besar pengujian yang berdampak pada daya saing produk telah terakreditasi.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan persentase pengujian komoditi terakreditasi, mendukung peningkatan mutu dan daya saing produk daerah, serta memenuhi target maksimal yang ditetapkan dalam Renstra.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah **Rp. 28.806.278.960,-** sementara target biaya Dinas Kumperindag tahun 2025 yaitu **Rp. 32.773.206.805,-** atau sebesar **87,90 %**. Dengan demikian capaian tingkat efisiensi sebesar **12,10%.**

Renstra 2023-2026 Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo

Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp).	Capaian Output (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	15.280.412.305	14.634.756.305	14.129.320.729	106,65	96,55	10,1
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha	Jumlah Koperasi Berkualitas	1.000.000.000	308.746.500	306.614.312	90	99,31	-9,31

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp).	Capaian Output (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
Kecil Menengah (Jumlah),	Jumlah UKM yang berdaya saing	1.082.763.000	7.697.137.000	7.692.500.840	53,75	99,94	-46,19
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	2218,89	26,97	2191,92
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	3.708.119.000	5.542.965.000	5.440.125.979	337,68	98,14	239,54
JUMLAH		22.071.294.305	32.773.206.805	28.806.278.960			

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya pada 5 (lima) sasaran strategis dinas rata-rata antara -46,19 sampai dengan 2191,92 persen.

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan (Nilai SAKIP) menunjukkan kinerja yang efisien, dengan capaian output sebesar 106,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,55%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai SAKIP tidak hanya berhasil melampaui target, tetapi juga dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Efisiensi ini dipengaruhi oleh penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta konsistensi dalam monitoring dan evaluasi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan koordinasi internal yang efektif turut mendukung peningkatan kinerja organisasi tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.

Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan melalui penguatan budaya kinerja, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja yang terintegrasi agar tata kelola pemerintahan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

- b. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah Koperasi Berkualitas) menunjukkan kinerja yang belum efisien, dengan capaian output sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar -9,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran relatif tinggi, namun belum sepenuhnya diikuti dengan pencapaian target kinerja.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya efektivitas program pembinaan dan pendampingan koperasi, keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi, serta masih rendahnya pemenuhan aspek kelembagaan dan tata kelola koperasi, seperti pelaksanaan RAT, kelengkapan administrasi, dan pengelolaan usaha.

Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan yang lebih intensif dan berbasis kebutuhan, serta penguatan kapasitas SDM koperasi. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan mampu mendorong peningkatan jumlah koperasi berkualitas secara berkelanjutan.

- c. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), dengan indikator Jumlah UKM yang berdaya Saing

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator Jumlah UKM yang Berdaya Saing menunjukkan kinerja yang belum optimal dan tidak efisien, dengan capaian output sebesar 53,75% dan realisasi keuangan sebesar 99,94%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar (46,19%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa target kinerja belum tercapai, sementara penggunaan anggaran hampir seluruhnya terealisasi.

Rendahnya capaian output dipengaruhi oleh masih terbatasnya efektivitas program peningkatan daya saing UKM, termasuk dalam aspek kapasitas manajerial, kelembagaan, pemasaran, serta pemenuhan standar dan kualitas produk. Selain itu, belum optimalnya pendampingan yang

berkelanjutan dan belum terintegrasinya dukungan lintas sektor turut menghambat percepatan peningkatan daya saing UKM.

Ke depan, diperlukan penguatan kualitas pendampingan berbasis kebutuhan UKM, serta integrasi dukungan fasilitasi seperti akses permodalan berupa sarana pendukung, digitalisasi pemasaran, dan standarisasi produk. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan mampu mendorong peningkatan jumlah UKM yang berdaya saing secara signifikan dan berkelanjutan

d. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (Persentase) dengan indikator Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah menunjukkan kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 2.218,89% dan realisasi keuangan sebesar 26,97%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2.191,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah.

Tingginya efisiensi tersebut dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan IKM yang signifikan, efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi, serta adanya dukungan faktor eksternal seperti meningkatnya permintaan pasar dan aktivitas usaha. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan sinergi antar program turut mendorong peningkatan jumlah IKM secara signifikan tanpa memerlukan pembiayaan besar.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan potensi riil di lapangan. Ke depan, diperlukan penguatan kualitas intervensi agar pertumbuhan IKM tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan mampu meningkatkan daya saing industri daerah.

e. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator Jumlah Nilai Ekspor

Tingkat efisiensi sebesar 0,23 %.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Meningkatnya Nilai Ekspor (USD) dengan indikator Jumlah Nilai Ekspor menunjukkan

kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 337,68% dan realisasi keuangan sebesar 98,14%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sekitar 239,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ekspor jauh melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif terkendali.

Tingginya efisiensi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap komoditas unggulan, efektivitas fasilitasi promosi dan akses pasar ekspor, serta dukungan kemitraan dan jaringan perdagangan. Selain itu, perbaikan kualitas produk dan kelancaran distribusi turut mendorong peningkatan nilai ekspor secara signifikan tanpa memerlukan tambahan belanja yang besar.

Namun demikian, capaian yang jauh melampaui target ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan potensi riil yang ada. Ke depan, diperlukan penetapan target yang lebih realistis dan berbasis potensi, serta penguatan strategi pengembangan ekspor melalui diversifikasi produk, peningkatan standardisasi, dan perluasan pasar agar kinerja ekspor tetap tumbuh secara berkelanjutan.

 Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029

Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Pagu Induk (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Output	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	16.280.412.305	14.943.502.805	14.435.935.041	106,74	98,93	7,81
Peningkatan UMKM Naik Kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	1.082.763.000	7.697.137.000	7.692.500.840	40	99,94	-59,94
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil Menengah	298.720.000	102.154.000	101.996.900	416,69	99,85	316,84
	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	701.280.000	4.487.448.000	1.135.720.200	1770	25,31	1744,69

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Pagu Induk (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Output	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	1.024.429.000	4.130.936.500	4.076.805.113	20000	98,69	19901,31
	Persentase peningkatan nilai ekspor	251.602.000	115.064.000	104.203.394	494,5	90,56	403,94
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	2.010.994.000	1.053.939.000	1.016.591.800	105,26	96,46	8,8
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	421.094.000	243.025.500	242.525.672	130,65	99,79	30,86
JUMLAH		22.071.294.305	32.773.206.805	28.806.278.960			

a. Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Koperasi Aktif menunjukkan kinerja yang efisien dan optimal, dengan capaian output sebesar 106,74% dan realisasi keuangan sebesar 98,93%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 7,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja tidak hanya berhasil dilampaui, tetapi juga dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Efisiensi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan koperasi yang tepat sasaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, serta koordinasi yang efektif antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pendekatan pembinaan yang lebih terarah turut meningkatkan keaktifan koperasi tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.

Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas pembinaan, memperkuat kapasitas SDM pengelola koperasi, serta meningkatkan inovasi dalam metode pendampingan agar capaian kinerja yang optimal dapat terus berkelanjutan.

b. Peningkatan UMKM Naik Kelas dengan indicator kinerja Persentase UMKM Naik Kelas

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase UMKM Naik Kelas menunjukkan kinerja yang belum efisien, dengan capaian output sebesar 40% dan realisasi keuangan mencapai 99,94%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar -59,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran relatif tinggi, namun belum diimbangi dengan pencapaian kinerja yang optimal.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tepatnya sasaran dan skema intervensi program, keterbatasan efektivitas kegiatan pembinaan dan pendampingan, serta masih rendahnya kesiapan UMKM dalam memenuhi kriteria naik kelas, seperti aspek legalitas, kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan daya saing produk yang turut mempengaruhi rendahnya capaian output.

Ke depan, diperlukan penguatan kualitas pendampingan yang berbasis kebutuhan UMKM, serta integrasi dukungan lintas sektor, pemasaran, dan standardisasi. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan mampu mendorong peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas secara signifikan.

c. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM dengan indicator kinerja Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah menunjukkan kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 416,69% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 316,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi jauh melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang tetap terkendali.

Tingginya efisiensi ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, dukungan kebijakan dan komitmen dalam pengembangan IKM turut mendorong peningkatan capaian output secara signifikan tanpa peningkatan belanja yang sebanding.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan potensi riil pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, ke depan jika memungkinkan diperlukan penyesuaian target, serta tetap menjaga kualitas implementasi program agar efisiensi yang tinggi dapat diimbangi dengan dampak yang berkelanjutan terhadap pengembangan IKM

d. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM dengan indicator kinerja Persentase IKM yang difasilitasi stimulan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase IKM yang difasilitasi stimulan menunjukkan kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 1.770% dan realisasi keuangan sebesar 25,31%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1.744,69%. Capaian ini mengindikasikan bahwa target kinerja jauh melampaui rencana dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah.

Tingginya efisiensi tersebut tidak terlepas dari optimalisasi fasilitasi yang tetap berjalan efektif, meskipun sebagian alokasi bantuan stimulan tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menyebabkan penyerapan anggaran menjadi rendah, namun capaian output tetap tinggi karena intervensi yang dilakukan lebih difokuskan pada kegiatan yang cepat terealisasi dan menjangkau lebih banyak IKM.

Namun demikian, hal ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya dalam aspek penjadwalan kegiatan. Ke depan, diperlukan perencanaan waktu yang lebih matang, percepatan proses pelaksanaan, serta penyesuaian target dan skema bantuan agar penyerapan anggaran dan capaian kinerja dapat berjalan lebih selaras, serta tetap memberikan dampak optimal bagi pengembangan IKM.

e. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting menunjukkan kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 20.000% dan realisasi keuangan sebesar 98,69%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 19.901,31%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan intervensi pengendalian harga jauh melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali.

Tingginya efisiensi tersebut dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan kegiatan intervensi yang sangat tinggi, seperti operasi pasar, pasar murah, pemantauan harga, serta koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Respons cepat terhadap potensi gejolak harga, khususnya pada periode tertentu, turut mendorong peningkatan capaian output secara signifikan tanpa peningkatan belanja yang sebanding.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dan belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian target yang lebih terukur, serta penguatan kualitas intervensi agar tidak hanya berfokus pada frekuensi kegiatan, tetapi juga pada efektivitas dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan

f. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase peningkatan nilai ekspor

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Peningkatan Nilai Ekspor menunjukkan kinerja yang sangat efisien, dengan capaian output sebesar 494,5% dan realisasi keuangan sebesar 90,56%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 403,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ekspor jauh melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu.

Tingginya efisiensi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas unggulan, efektivitas fasilitasi promosi dan akses pasar ekspor, serta dukungan kemitraan yang mendorong perluasan jaringan

pemasaran. Selain itu, perbaikan kualitas produk dan kelancaran distribusi turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor secara signifikan tanpa membutuhkan peningkatan belanja yang besar.

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan potensi riil yang ada. Ke depan, diperlukan penetapan target yang lebih realistis dan berbasis potensi, serta penguatan strategi pengembangan ekspor yang berkelanjutan melalui diversifikasi produk, peningkatan standardisasi, dan perluasan pasar agar efisiensi yang tinggi dapat terus dipertahankan dengan dampak yang optimal.

g. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen menunjukkan kinerja yang efisien, dengan capaian output sebesar 105,26% dan realisasi keuangan sebesar 96,46%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Efisiensi ini didukung oleh efektivitas sistem penanganan pengaduan, koordinasi yang baik antara lembaga terkait seperti BPSK dan instansi teknis, serta respons yang cepat dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada turut mendorong penyelesaian pengaduan secara tepat waktu dan akurat tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.

Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan kualitas layanan pengaduan, memperkuat sistem berbasis digital, serta meningkatkan kapasitas SDM agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel.

h. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi menunjukkan kinerja yang efisien dan optimal, dengan capaian output sebesar 130,65% dan realisasi keuangan sebesar 99,79%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 30,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja tidak hanya melampaui target, tetapi juga dicapai dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali.

Efisiensi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan laboratorium, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengujian, serta kompetensi SDM yang semakin baik. Selain itu, tingginya permintaan pengujian dari pelaku usaha dan efektivitas pelayanan turut mendorong peningkatan capaian output tanpa peningkatan biaya yang signifikan.

Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan mutu layanan, memperluas cakupan akreditasi, serta memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur laboratorium agar mampu mendukung peningkatan daya saing produk daerah secara berkelanjutan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Program-program tersebut dilaksanakan oleh pada urusan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Program-program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

A. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

B. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

C. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

E. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

G. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

H. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

I. Program Pengembangan Eksport**Kegiatan**

- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

J. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**Kegiatan**

- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**K. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri****Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didukung oleh output program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan selaras dengan Renstra 2023–2026 serta Renstra 2025–2029. Output program dan kegiatan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan. Kesiambungan antarperiode Renstra menjamin konsistensi kontribusi output dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.

Adapun output dari program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pada program ini terdiri atas 4 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 381.369.400,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 10.031.000,- sehingga total pagu setelah perubahan sebesar Rp. 391.400.000,- dengan realisasi Rp. 390.478.984.-

Di tahun 2025 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen Renja 2026, Renstra Tahun 2025-2029, RAK, RKA 2026, KAK, RAB, SIRUP *Output* dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan IV Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo
- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II dan III serta penyampaian hasil Monev UKM, IKM di Kabupaten Bone Bolango, Rapat penyusunan dan pengimputan RUP pada aplikasi Sirup 2026 serta pengimputan RUP APBD-P 2025
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Evaluasi Bantuan yang diserahkan kepada UKM, IKM ; pendampingan pelaksanaan program kegiatan Koperasi Merah Putih dan Pasar Murah.
- Rapat penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)

Pagu awal untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 308.857.000,- kemudian terdapat revisi anggaran total sebesar Rp. 60.528.000,- (termasuk tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 120.650.000,-) sehingga total pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 369.385.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 369.287.438,- dan Silva kegiatan berjumlah Rp. 97.562,- dari beberapa belanja yang

tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,97%.

Di tahun 2025 telah dihasilkan 7 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ Tahun 2024, LPPD Tahun 2024, laporan evaluasi renja per triwulan, Paparan capaian E-Monev, Lakip Tahun 2024, laporan tahunan APBD masing-masing bidang.

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Evaluasi Bantuan yang diserahkan kepada UKM dan IKM, Monev bantuan hibah koperasi tahun 2024, pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah)
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan). adapun pagu awal sub kegiatan ini Rp. 10.226.439.505,- Di tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu SKPD 2025 berkurang sebesar Rp. 250.000.000,- Sehingga pagu akhir Rp. 9.976.439.505,- dengan realisasi Rp. 9.521.920.473,- silva Rp. 454.519.032,- yang terdiri dari sisa gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS, tunjangan jabatan PNS, Tunjangan beras PNS, tunjangan PPh, pembulatan gaji PNS serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan prestasi kerja.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target)

Pagu anggaran induk sub kegiatan ini Rp. 99.902.200,- kemudian terdapat revisi melalui hasil pencadangan anggaran OPD pada DPA APBD 2025 sebesar (Rp. 23.920.000,-). Sehingga pagu setelah perubahan pada sub kegiatan ini sejumlah Rp. 75.982.200,- dengan

realisasi Rp. 75.891.831,- dengan silva Rp. 90.369,- dari sisa belanja yang tidak dapat diimmanfaatkan.

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang.

Output kegiatan :

- Finalisasi ABK SEkeretariat Diskumperindag
- Review Standar Pelayanan Diskumperindag
- Rekonsiliasi e-Bupot pada Aplikasi Cortex di Kabupaten Boalemo
- Kegiatan e.PPID di kabupaten Pohnuato
- Kegiatan Aset di Kabupaten Boalemo
- Sosialisasi e-TPP

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 30 paket, capaian 18 paket atau 60% karena keterbatasan anggaran)

Output kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer serta belanja modal).

Pagu awal sebesar Rp. 936.416.800,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (Rp. 303.380.000,-) termasuk pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 98.040.000,- (belanja sewa bangunan, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja modal). Sehingga pagu sesudah perubahan menjadi Rp. 633.036.800,- dengan realisasi Rp. 627.033.722,- Silva Rp. 20.864.732.493,-.

❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 2.351.629.400,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dan APBD-P dengan total senilai 171.593.000. Sehingga pagu setelah perubahan Rp. 2.523.222.400,- realisasi keuangan Rp. 2.480.468.917,- silva Rp. 42.753.483,- (capaian fisik 100% dan keuangan 98.31%.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 578.906.000,- kemudian pada tahapan APBD-P mengalami pengurangan anggaran (Rp. 41.830.000,-). Sehingga pagu setelah perubahan Rp.537.076.000,- realisasi keuangan Rp. 536.367.520,- silva Rp. 708.480,- (capaian fisik 100% dan keuangan 99,87%.

Output kegiatan :

- a) Penatausahaan keuangan dan kepegawaian
- b) Belanja operasional kantor
- c) Pekerjaan konstruksi pembuatan platduiker dan rehabilitasi pagar kantor
- d) Pengadaan meja uji laboratorium
- e) Belanja pengadaan printer
- f). Pemeliharaan gedung kantor

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

Adapun indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan target 20 koperasi capaian 22 koperasi.

Jumlah anggaran induk pada program ini sebesar Rp. 257.664.000,- dengan jumlah revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 123.326.500,-). Sehingga total pagu setelah perubahan Rp. 134.337.500,- dengan realisasi Rp. 132.420.375,- silva Rp. 1.917.125

Output Kegiatan ini adalah :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi di Kabupaten/Kota.

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dilaksanakan pada 22 koperasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 18 Koperasi
Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.

- b. Bimtek Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengawas Koperasi Bagi Fungsional Pengawas Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebanyak 24 orang, dengan menghadirkan Narasumber Asdep Pemeriksaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif

ditetapkan oleh deputi/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.

Tabel 3.20.
Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
Tahun 2025

NO.	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD <i>Jl. H. Moh. Non Pango, SE Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. 372/BH/V Tgl. 26 November 1968 PAD No. AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Sehat
2	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA <i>Jl. Jend. Sutoyo No. 35 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. 1449/BH/V Tgl. 8 Juni 1971 PAD No. AHU-0000323.AH.01.38.TAHUN 2025 Tgl. 7 Februari 2025	Konsumen	Sehat
3	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA <i>Kel. Botu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo</i>	BH No. 36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 5 Juli 2015	Konsumen	Sehat
4.	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI WIYOWA PROVINSI GORONTALO <i>Jl. Jend. Sudirman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo</i>	BH No. 07/BH/518/DTKTK/IV/04. Tgl. 13 April 2004 PAD No. AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Sehat
5	KOPERASI SIMPAN PINJAM DHANA PANEN RAYA <i>Jl. Nani Wartabone No. 27, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	S. Pinjam	Sehat
6	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA <i>Jl. Prof Dr Ing BJ Habibie Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango</i>	BH No. AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Sehat
7	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	BH No. AHU-0010002.AH.01.26.TAHUN 2021	Konsumen	Sehat

NO.	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
	<i>Jl. Kusno Tongkodu Desa Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	Tgl. 27 April 2021		
8	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO <i>Jl. Nani Wartabone Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. 450/BH/V/07 Tgl. 20 April 2007 PAD No. AHU- 0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Sehat
9	KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA INSAN MANDIRI SEJAHTERA <i>Jl. Yusuf Hasiru Perum. Borobudur Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0006552.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 09 Desember 2022	Produsen	Sehat
10	KOPERASI KONSUMEN LAPUAN GO HEBAT BERSAMA <i>Jl. Sude Kau Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0001277.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 25 April 2024	Konsumen	Sehat
11	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIRA USAHA BARU <i>Jl. Tengah, Desa Toto Kec. Kabila Kab. Bone Bolango</i>	BH No. 21/BH/XXII/III/2011 Tgl.18 Maret 2011	S. Pinjam	Sehat
12	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU <i>Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. 1685/BH/V Tgl. 30 Oktobeer 1971 PAD. AHU- 0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Cukup Sehat
13	KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA CIPTA DANA <i>Jl. Bulila Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo</i>	BH No. 33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	S.Pinjam	Cukup Sehat
14	KOPERASI SIMPAN PINJAM AL HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	BH No. 31/BH/XXII/III/2014 Tgl. 21 Maret 2014	S. Pinjam	Cukup Sehat

NO.	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
	<i>Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo</i>	PAD. No. 000177/PAD/DEP.1/V/2018 Tgl. 25 Mei 2018		
15	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU <i>Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Cukup Sehat
16	KOPERASI KONSUMEN DEKRANASDA PROVINSI GORONTALO <i>Jl. Tinaloga Desa Toto Selatan Kec. Tinaloga Kab. Bone Bolango</i>	BH No. AHU-0001276.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 21 Maret 2023	Konsumen	Cukup Sehat
17	KOPERASI KONSUMEN TUNAS JAYA MAKMUR BERSAMA <i>Perum Bumi Limboto Indah Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU-0002643.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 29 Juli 2024	Konsumen	Cukup Sehat
18	KOPERASI PRODUSEN SUBUR SEJAHTERA BERSAMA <i>Jl. Buke Panai Desa Huwongo Kec. Biluhu Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU-0003192.AH.01.26.TAHUN 2020 Tgl. 07 April 2020 PAD No. AHU-0000323.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 9 Februari 2023	Produsen	Cukup Sehat

Tabel 3.21
Daftar Pengawasan dan Pemeriksaan/Monev Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2025

N O	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD <i>Jl. H. Moh. Non Pango, SE Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. 372/BH/V Tgl. 26 November 1968 PAD No. AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes

N O	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
2	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA <i>Jl. Jend. Sutoyo No. 35 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. 1449/BH/V Tgl. 8 Juni 1971 PAD No. AHU- 0000323.AH.01.38.TAHUN 2025 Tgl. 7 Februari 2025	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
3	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA <i>Kel. Botu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo</i>	BH No. 36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 5 Juli 2015	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
4.	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI WIYOWA PROVINSI GORONTALO <i>Jl. Jend. Sudirman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo</i>	BH No.07/BH/518/DTKTK/IV/04 Tgl.13 April 2004 PAD No. AHU- 0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
5	KOPERASI SIMPAN PINJAM DHANA PANEN RAYA <i>Jl. Nani Wartabone No. 27, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. AHU-0015444.AH.01.26 TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
6	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA <i>Jl. Prof Dr Ing BJ Habibie Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango</i>	BH No. AHU-0001579.AH.01.29 TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
7	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN <i>Jl. Kusno Tongkodu Desa Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU-0010002.AH.01.26 TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
8	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO <i>Jl. Nani Wartabone Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo</i>	BH No. 450/BH/V/07 Tgl. 20 April 2007 PAD No. AHU- 0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
9	KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA INSAN MANDIRI SEJAHTERA <i>Jl. Yusuf Hasiru Perum. Borobudur Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0006552.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 09 Desember 2022	Produsen	Pengawasan dan Pemkes

N O	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
10	KOPERASI KONSUMEN LAPUAN GO HEBAT BERSAMA <i>Jl. Sude Kau Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0001277.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 25 April 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
11	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIRA USAHA BARU <i>Jl. Tengah, Desa Toto Kec. Kabila Kab. Bone Bolango</i>	BH No. 21/BH/XXII/III/2011 Tgl.18 Maret 2011	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
12	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU <i>Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. 1685/BH/V Tgl. 30 Oktobeer 1971 PAD. AHU-0002091.AH.01.38 TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
13	KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA CIPTA DANA <i>Jl. Bulila Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo</i>	BH No. 33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
14	KOPERASI SIMPAN PINJAM AL HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO <i>Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo</i>	BH No. 31/BH/XXII/III/2014 Tgl. 21 Maret 2014 PAD. No. 000177/PAD/DEP.1/V/2018 Tgl. 25 Mei 2018	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
15	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU <i>Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Pengawasan dan Pemkes
16	KOPERASI KONSUMEN DEKRANASDA PROVINSI GORONTALO <i>Jl. Tinaloga Desa Toto Selatan Kec. Tinaloga Kab. Bone Bolango</i>	BH No. AHU- 0001276.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 21 Maret 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
17	KOPERASI KONSUMEN TUNAS JAYA MAKMUR BERSAMA <i>Perum Bumi Limboto Indah</i>	BH No. AHU- 0002643.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 29 Juli 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes

N O	NAMA DAN ALAMAT KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	JENIS KOPERASI	KATEGORI DAN PREDIKAT
	<i>Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo</i>			
18	KOPERASI PRODUSEN SUBUR SEJAHTERA BERSAMA <i>Jl. Buke Panai Desa Huwongo Kec. Biluhu Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0003192.AH.01.26.TAHUN 2020 Tgl. 07 April 2020 PAD No. AHU- 0000323.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 9 Februari 2023	Produsen	Pengawasan dan Pemkes
19	KOPERASI SIMPAN PINJAM KINANTI JAYA MANDIRI <i>Desa Hduhiadaa Kec. Marisa Kab. Pohuwato</i>	BH No. AHU- 0002799.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 07 Agustus 2024	S. Pinjam	Pengawasan
20	KOPERASI JASA POWER BAR BAR <i>Perum Bintang Permai Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo</i>	BH No. AHU- 0003880.AH.01.29.TAHUN 2025 Tgl. 20 Mei 2025	Jasa	Pengawasan
21	KOPERASI KONSUMEN GORUT MAKMUR ABADI <i>Dusun Pasar Lama Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara</i>	BH No. AHU- 0003275.AH.01.29.TAHUN 2024 Tgl. 06 September 2024	Konsumen	Pengawasan
22	KOPERASI KONSUMEN SARIPI ALIYA MANDIRI <i>Desa Saripi Kec. Paguyaman Kab. Boalemo</i>	BH No. AHU- 0002144.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 05 Juni 2023	Konsumen	Pengawasan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Outcome program ini adalah Jumlah Koperasi Aktif (target 25 Unit usaha, capaian 50 unit usaha).

Dimana jumlah koperasi aktif tahun 2025 diperoleh dari Jumlah koperasi yang diintervensi kegiatan di tahun 2025 sebanyak 50 koperasi dari total koperasi aktif tahun 2025 sebanyak 1833 koperasi.

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi Usaha dengan target 25 unit usaha capaian 25 unit usaha

Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 500.777.000,- kemudian mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 447.652.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa Rp. 47.652.000,- dan belanja hibah koperasi Rp. 400.000.000. sehingga total pagu akhir yang mendukung pencapaian target kinerja sebesar Rp. 53.125.000,-. Realisasi Rp. 53.064.636,- silva Rp. 60.364,- (capaian fisik 100% dan keuangan 99,89%)

Pelaksanaan Program/ kegiatan ini adalah :

a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan kemampuan kemandirian dan kesejahteraan koperasi melalui pengembangan usaha, modal dan akses pasar agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial;
- Meningkatkan unit usaha dan mempermudah mendapatkan akses permodalan;
- Meningkatkan pengelola koperasi dalam meningkatkan penguatan kelembagaan dengan peraturan-peraturan

Pemberdayaan meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus dan pengawas

koperasi di 10 Koperasi penerima bantuan hibah Tahun 2023, 2024 dan calon penerima hibah Tahun 2025 masing-masing :

- Koperasi Konsumen Dekranasda Provinsi Gorontalo
- Koperasi Jasa Segala Sagela Sejahtera
- Koperasi Pinus Jaya Sejahtera
- Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati
- Koperasi Konsumen Saitama Mandiri
- Koperasi Konsumen Rafahiyah Gorontalo Mandiri
- Koperasi Konsumen Adil dan Sejahtera
- Koperasi Produsen Salfa Helumo Mandiri
- KSP Tinelo Mandiri Jaya
- Koperasi Konsumen Murni Lestari Sejahtera

b. Pendampingan Koperasi yang mengakses Permodalan dan Pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat dan LPDB sebanyak 15 koperasi masing-masing :

- Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Indonesia Wiyowa Provinsi Gorontalo
- KSP Al-Hikmah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
- KSU Karya Prasetya
- Koperasi Konsumen Primer Kartika Otanaha
- KSP Dhana Panen Raya
- Koperasi Konsumen Batara BTN Gorontalo
- Koperasi Produsen Serba Usaha Insan Mandiri Sejahtera
- Koperasi Konsumen Serba Usaha Teratai Limutu
- KSP Karya Cipta Dana
- Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo
- Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Bersama Ainun
- Koperasi Konsumen Primer Kesehatan Daerah KKPKD
- Koperasi Produsen Subur Sejahtera Bersama
- Koperasi Konsumen Tunas Jaya Makmur Bersama
- Koperasi Simpan Pinjam Kinanti Jaya Mandiri

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 400 orang.

Pagu induk program ini ditahun 2025 sebesar Rp. 241.559.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 120.275.000,-). Pada item belanja perjalan dinas Rp. 103.650.000,- serta item belanja pendukung lainnya. Sehingga total pagu akhir setelah perubahan yaitu Rp. 121.284.000,-

Tahun 2025 tidak menerima DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dengan target 390 orang di tahun 2025, Adapun realisasi sebanyak 400 orang.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi tahun 2025 dilaksanakan melalui :
 - Kegiatan Revitalisasi Perkoperasian dalam bentuk sosialisasi tentang kelembagaan usaha, permodalan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan sebanyak 5 kali di Kabupaten Gorontalo yaitu koperasi transportasi angkasa Gorontalo (binaan provinsi), Kabupaten Boalemo pesertanya Adalah 12 Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, Kabupaten Bone Bolango pesertanya 10 Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, Kabupaten Pohuwato pesertanya 9 Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih dan Kabupaten Gorontalo Utara 18 Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih (*terlampir*)

- Pembinaan Perkoperasian sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 400 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi yaitu Koperasi KPKD Maju Bersama, Koperasi SP Karya Cipta Dana, Koperasi Kartika Otanaha, Koperasi Invinity, Koperasi Subur Sejahtera, dan Koperasi Transportasi Lipuu

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pagu induk pada program ini sejumlah Rp. 15.280.412.305 kemudian terdapat revisi anggaran termasuk APBD-P sebesar (Rp. 645.656,-) sehingga total pagu setelah perubahan Rp. 14.634.756.305,- realisasi Rp. 14.129.320.729,- dan silva Rp. 505.435.576,- antara lain pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 1.018.978,- kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah Rp. 454.609.401,- yang merupakan sisa gaji pokok dan tunjangan.

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 381.369.400,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 10.031.000,- sehingga total pagu

setelah perubahan sebesar Rp. 391.400.000,- dengan realisasi Rp. 390.478.984.-

Di tahun 2025 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen Renja 2026, Renstra Tahun 2025-2029, RAK, RKA 2026, KAK, RAB, SIRUP

Output dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan IV Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo
- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II dan III serta penyampaian hasil Monev UKM, IKM di Kabupaten Bone Bolango, Rapat penyusunan dan pengimputan RUP pada aplikasi Sirup 2026 serta pengimputan RUP APBD-P 2025
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Evaluasi Bantuan yang diserahkan kepada UKM, IKM ; pendampingan pelaksanaan program kegiatan Koperasi Merah Putih dan Pasar Murah.
- Rapat penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)

Pagu awal untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 308.857.000,- kemudian terdapat revisi anggaran total sebesar Rp. 60.528.000,- (termasuk tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 120.650.000,-) sehingga total pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 369.385.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 369.287.438,- dan Silva kegiatan berjumlah Rp. 97.562,- dari beberapa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,97%.

Di tahun 2025 telah dihasilkan 7 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ Tahun 2024, LPPD Tahun 2024, laporan evaluasi renja per triwulan, Paparan capaian E-Money, Lakip Tahun 2024, laporan tahunan APBD masing-masing bidang.

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Evaluasi Bantuan yang diserahkan kepada UKM dan IKM, Monev bantuan hibah koperasi tahun 2024, pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan). adapun pagu awal sub kegiatan ini Rp. 10.226.439.505,- Di tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu SKPD 2025 berkurang sebesar Rp. 250.000.000,- Sehingga pagu akhir Rp. 9.976.439.505,- dengan realisasi Rp. 9.521.920.473,- silva Rp. 454.519.032,-

yang terdiri dari sisa gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS, tunjangan jabatan PNS, Tunjangan beras PNS, tunjangan PPh, pembulatan gaji PNS serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan prestasi kerja

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target)

Pagu anggaran induk sub kegiatan ini Rp. 99.902.200,- kemudian terdapat revisi melalui hasil pencadangan anggaran OPD pada DPA APBD 2025 sebesar (Rp. 23.920.000,-). Sehingga pagu setelah perubahan pada sub kegiatan ini sejumlah Rp. 75.982.200,- dengan realisasi Rp. 75.891.831,- dengan silva Rp. 90.369,- dari sisa belanja yang tidak dapat diimfaatkan.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang.

Output kegiatan :

- Finalisasi ABK SEkeretariat Diskumperindag
- Review Standar Pelayanan Diskumperindag
- Rekonsiliasi e-Bupot pada Aplikasi Cortex di Kabupaten Boalemo
- Kegiatan e-PPID di kabupaten Pohnuato
- Kegiatan Aset di Kabupaten Boalemo
- Sosialisasi e-TPP

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 30 paket, capaian 18 paket atau 60% karena keterbatasan anggaran)

Output kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer serta belanja modal).

Pagu awal sebesar Rp. 936.416.800,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai(Rp. 303.380.000,) termasuk pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 98.040.000,- (belanja sewa bangunan, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja modal). Sehingga pagu sesudah perubahan menjadi Rp. 633.036.800,- dengan realisasi Rp. 627.033.722,- Silva Rp. 20.864.732.493,-.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 2.351.629.400,- kemudian revisi pada beberapa

rekening belanja yang bersesuaian dan APBD-P dengan total senilai 171.593.000. Sehingga pagu setelah perubahan Rp. 2.523.222.400,- realisasi keuangan Rp. 2.480.468.917,- silva Rp. 42.753.483,- (capaian fisik 100% dan keuangan 98.31%.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 578.906.000,- kemudian pada tahapan APBD-P mengalami pengurangan anggaran (Rp. 41.830.000,-). Sehingga pagu setelah perubahan Rp.537.076.000,- realisasi keuangan Rp. 536.367.520,- silva Rp. 708.480,- (capaian fisik 100% dan keuangan 99,87%.

Output kegiatan :

- a). Penatausahaan keuangan dan kepegawaian
- b). Belanja operasional kantor
- c). Pekerjaan konstruksi pembuatan platduiker dan rehabilitasi pagar kantor
- d). Pengadaan meja uji laboratorium
- e). Belanja pengadaan printer
- f). Pemeliharaan gedung kantor

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Outcome program adalah *Jumlah UKM yang berdaya saing* target 160 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM. adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,31% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM

Pagu anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp. 339.772.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 293.626.000,-) sehingga pagu akhir setelah perubahan sejumlah Rp. setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 46.146.000,- realisasi 45.826.652,- silva Rp. 319.348

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Pada program/kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Indikator kinerja adalah Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan target 300 unit usaha , realisasi 350 unit usaha.

Pagu anggaran setelah perubahan Rp. 46.146.000,- dari pagu induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 297.548.000,- dan mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 251.402.000,-). Realisasi anggaran sub kegiatan Rp. 45.826.652

Output Kegiatan ini adalah :

- Pendampingan UMKM di 6 Kabupaten/Kota dalam hal pembuatan NIB sebanyak 350 UMKM
- Rapat evaluasi kegiatan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Indikator kinerja adalah Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan target 358 unit usaha, capaian 0%

Target kinerja sub kegiatan ini tidak tercapai karena anggaran kegiatan ini telah mengalami revisi pencadangan OPD Tahun 2025 dan di Tahun 2025 tidak mendapatkan anggaran melalui DAK Non Fisik P2KUKM untuk mengintervensi sub kegiatan ini.

Pagu anggaran hasil sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.224.000,- tetapi mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 42.224.000,-) sehingga indikator Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 358 orang tidak tercapai.

Tahun 2025 pelaksanaan sub kegiatan ini tidak didukung oleh anggaran DAK Non Fisik PK2UKM untuk kegiatan vokasi bagi KUKM sehingga output kegiatan tidak tercapai

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Outcome program adalah Jumlah UKM yang bertransformasi usaha dengan realisasi 52 unit usaha dari target 50 unit usaha.

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 742.991.000,- kemudian mengalami revisi dengan total Rp. 6.908.000.000,- yaitu :

- Revisi anggaran Ta. 2025 sebesar (Rp. 605.296.000,-)
- Pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres I Tahun 2025 Rp. 6.908.000.000,- antara lain pada item belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 6.563.000.000,- dan item belanja lainnya yang bersesuaian.

Sehingga total pagu setelah perubahan dalam mendukung pelaksanaan program ini sebesar Rp. 7.650.991.000,- dengan realisasi Rp. 7.646. 674.188,- dengan silva Rp. 4.316.812,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 4.993.030.000,- ditagging pada Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.

Adapun pagu induk item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bantuan bahan produksi olahan bagi UMKM) ini sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian terdapat revisi anggaran dan pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres 1 Tahun 2025 total sebesar Rp. 7.113.000.000,- sehingga pagu akhir setelah perubahan Rp. 7.163.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.159.229.717,- silva Rp. 3.770.283,-

Adapun rincian bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM terlaksana dalam 2 tahap sebagai berikut :

❖ Tahap I Tahun 2025 :

Rekapan Penerima Bantuan Tahap I Tahun 2025		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	300
2	Kabupaten Bone Bolango	300
Total		600

Tahap ini berfokus pada percepatan dukungan awal bagi UMKM prioritas untuk memperkuat kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha.

❖ Tahap II Tahun 2025

Bantuan UMKM pada Tahap 2 direalisasikan di 6 (enam) wilayah Kabupaten/Kota dengan total penerima bantuan pada Tahap 2 sekitar 6.563 UMKM, dengan rincian sebagai berikut :

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2025		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	1.645
2	Kabupaten Gorontalo	2.325

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2025		
3	Kabupaten Bone Bolango	870
4	Kabupaten Gorontalo Utara	221
5	Kabupaten Boalemo	633
4	Kabupaten Pohuwato	869
Total		6.563

- b. Peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui sinergi dan kolaborasi dengan beberapa lembaga/perusahaan/BUMN bagi 100 (seratus) pelaku UMKM dengan rincian sebagai berikut :

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2025		
No.	Lembaga	Jumlah UMKM
1	PT. Grab	50
2	PT. pegadaian Persero	50
Total		100

Pelaksanaan peningkan SDM terkait materi digitalisasi pemasaran produk serta dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, hal ini berorientasi peningkatan skala usaha bagi UMKM naik Kelas

- c. Bantuan UMKM melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo kerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo (sebagai penyedia data) dengan jumlah penerima bantuan adalah 1.254 UMKM dengan rincian sebagai berikut :

❖ Realisasi tahap 1 pada bulan Juli 2025

Bantuan UMKM melalui Program Badan Amil Zakat Nasional		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	38
2	Kabupaten Gorontalo	13
3	Kabupaten Bone Bolango	2
4	Kabupaten Gorontalo Utara	146
5	Kabupaten Boalemo	2
6	Kabupaten Pohuwato	2
TOTAL		203

❖ Realisasi tahap 2 pada bulan Juli dan Oktober 2025

Bantuan UMKM melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahap II		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	38
2	Kabupaten Gorontalo	11
3	Kabupaten Bone Bolango	2
4	Kabupaten Gorontalo Utara	253
5	Kabupaten Boalemo	2
6	Kabupaten Pohuwato	2
Total		203

❖ Realisasi Tahap 3 pada Bulan Desember 2025

Bantuan UMKM melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahap III		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	233
2	Kabupaten Gorontalo	302
3	Kabupaten Bone Bolango	148
4	Kabupaten Boalemo	60
Total		743

d. Pelaksanaan verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri, dengan capaian 100% yaitu 36 Dokumen dari target 36 Dokumen.

Pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.000.000.000,- kemudian terdapat revisi dengan total sebesar Rp. 3.589.602.000,- termasuk pada tahapan APBD-P 2025 sejumlah (Rp.10.950.000,-) pada beberapa item belanja yang bersesuaian. Sehingga total pagu akhir setelah perubahan Rp. 4.589.602.000,- dengan realisasi Rp. 1.237.717.100,- (realisasi fisik 29,52% dan keuangan 26,97%)

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (target 12 Dokumen, capaian 12 Dokumen).

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2025 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.675.280.000,- dengan realisasi Rp. 399.494.402,- dengan selisih Rp. 1.275.785.598,- antara lain selisih pada item belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.275.088.968,- dan item belanja lainnya sebesar Rp. 696.630,-

Adapun penganggaran induk APBD 2025 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 351.396.000,-. Kemudian terdapat revisi dengan total sebesar Rp. 1.323.884.000,- termasuk tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 66.050.000,- antara lain pada item Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) Rp. 90.180.000,- serta item belanja lainnya yang bersesuaian.

Output kegiatan ini :

- a. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat bagi IKM Pangan dan Furniture yaitu Fasilitas tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan bagi 1 IKM Furniture di Kabupaten Pohuwato yang teranggarkan pada pagu induk

Tujuan :

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
- Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkan peluang pasar lokal, regional dan nasional

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 80.150.000,- kemudian revisi hasil pencadangan anggaran sebesar (Rp. 25.720.000,-). Pemanfaatan efisiensi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.262.880.000,- dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar

Rp. 90.180.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 1.407.460.000,- realisasi Rp. 132.371.032,-. Dengan Silva Rp. 1.275.088.968,- pagu anggaran ini termasuk fasilitasi kemasan bagi IKM.

anggaran yang tidak dapat direalisasikan untuk bantuan barang yang diserahkan kepada IKM sebesar Rp. 1.275.000.000,- bagi IKM pangan dan furnitur karena keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta keterlambatan pemasukan usulan dari calon penerima bantuan.

b. Verifikasi, Pengawasan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri Pangan dan Furniture yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing,

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu calon penerima bantuan IKM Pangan dan Furniture di Kabupaten/Kota

c. Terlaksananya Kampanye Sadar Halal yang dilaksanakan di Kota Gorontalo (peserta 50 IKM), Kabupaten Bone Bolango (peserta 30 IKM), Kabupaten Gorontalo (peserta 30 IKM), Kabupaten Pohuwato (peserta 30 IKM) Provinsi Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan Pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya produk Halal, baik dari sisi keagamaan, kesehatan, keamanan, Maupun kualitas prodak.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu IKM Pangan di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

d. Fasilitasi Sertifikasi Halal sebanyak 434 penerima

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Memberikan dukungan dan kemudahan pada pelaku usaha khususnya IKM/UKM dalam memperoleh sertifikat Halal guna menjamin kehalalan prodak serta meningkatkan daya saing usaha.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu IKM Pangan di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

- e. Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Pangan sebanyak 17 IKM pangan
Yang tersebar di Kabupaten Gorontalo 3 IKM , Kota Gorontalo 10 IKM dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 4 IKM

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen).
Pagu awal sub kegiatan ditahun 2025 berjumlah Rp. 349.884.000,- kemudian terdapat revisi dengan total sejumlah Rp. 2.462.284.000,- yaitu revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sejumlah (Rp. 124.458.000,-) pada item belanja pakaian adat daerah dan perjalanan dinas biasa. Selanjutnya adalah revisi pemanfaatan hasil efisiensi sesuai Inpres 1 Tahun 2025 & SE Mendagri 900/833/SJ Tahun 2025 sejumlah Rp. 2.513.742.000,- antara lain pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, honorarium narasumber dan item belanja lainnya. Pada tahapan APBD-P sebesar (Rp. 77.000.000,-) antara lain pada item belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 150.000.000,-) dan belanja lainnya yang bersesuaian, serta penyesuaian pagu SKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 150.000.000,- yaitu belanja hibah uang kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo. Sehingga total anggaran setelah perubahan pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 2.812.168.000,- realisasi Rp. 736.225.798,- dengan silva Rp. 2.075.942.202,-. antara lain pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 2.075.032.503,-

Output kegiatan ini adalah :

1. Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM sandang, aneka dan kerajinan serta IKM logam mesin.

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 54.400.000,- kemudian revisi pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 2.225.000.000,- dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar (Rp. 150.000.000,-) sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 2.129.400.000,- realisasi Rp. 54.367.497,- silva Rp. 2.075.032.503,-

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing IKM, meringankan beban operasional, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta membantu pelaku usaha naik kelas dari level mikro ke kecil, dengan memberikan alat yang memadai untuk produksi dan pengembangan usaha mereka.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan yaitu

- 16 IKM Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan berupa Mesin peralatan dan Bahan Produksi.
- 66 IKM Perbengkelan berupa Mesin dan Peralatan
- 1 IKM Perbengkelan berupa Mesin Peralatan, Bahan Bangunan Rumah Produksi dan Fasilitas Pemasangan Listrik yang berada di Kab. Gorontalo Utara

Bantuan yang diberikan berupa Mesin Peralatan dan Bahan Produksi, Bahan Bangunan serta Fasilitas Pemasangan Listrik

Anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.075.032.503 kepada 82 IKM Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan dan IKM Perbengkelan karena keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan dimaksud serta keterlambatan pemasukan usulan dari calon penerima bantuan.

2. Monitoring Evaluasi / Pengendalian IKM

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Mengevaluasi pemanfaatan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul serta memberikan solusi upaya pemecahannya, dan
 - Memberikan masukan, saran dan rekomendasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang
3. Pembinaan dan Pendampingan IKM
- Tujuan Pelaksanaan kegiatan :
- membina pelaku IKM sebagai upaya meningkatkan kualitas dan standar produk dalam rangka Peningkatan Daya Saing IKM ,
 - Pengembangan Kapasitas SDM & Manajemen dan
 - Perluasan Akses Pasar & Jaringan.
- Sasaran* yaitu IKM IKSAK dan IKM ILMEA di kabupaten/Kota.
4. Gebyar UMKM
- Kegiatan ini Kolaborasi antara Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia Cabang Gorontalo.
 - Tujuan kegiatan untuk meningkatkan penjualan dan omzet, mendorong inovasi serta kualitas produk, memperluas jangkauan pasar (lokal hingga nasional/internasional), memacu adopsi digitalisasi, serta memperkuat ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi, menjadikan UMKM sebagai pilar penggerak ekonomi lokal.
 - Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26 – 28 April 2025 di Gedung Bele Li Mbui Kota Gorontalo.
 - Gelaran Gebyar UMKM Gorontalo tahun 2025 mencatatkan transaksi sebesar Rp2,04 miliar selama tiga hari pelaksanaan. Kegiatan yang diikuti oleh 190 UMKM dari lima kabupaten dan satu kota itu, juga telah menarik antusiasme tinggi dengan lebih dari 4.720 pengunjung yang hadir.

- Gebyar UMKM melaksanakan kegiatan Talkshow dengan tema “Peran Dekranasda dalam Pemberdayaan Perempuan dan Kerajinan Daerah.”
5. Pelantikan Pengurus Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Ketua Dekranasda pada 4 Kabupaten.
- Tujuan untuk mengukuhkan kepemimpinan baru dalam membina, mengembangkan, dan mempromosikan kerajinan daerah agar lebih berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan perajin, melestarikan budaya, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain demi kemajuan industri kerajinan lokal sebagai identitas bangsa. .
 - Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026 di Gedung Bele Li Mbui Kota Gorontalo. Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo melantik para Pengurus Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Ketua Dekranasda pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.
6. Partisipasi HUT Dekranas di Kalimantan Timur
- Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun 2025. Acara ini digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome pada tanggal 9 Juli 2025, dibuka oleh Istri Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Umum Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional khas Kalimantan Timur
 - Sebanyak 170 stan ekspso kerajinan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota turut meramaikan puncak acara. Sekitar 80 UMKM lokal Balikpapan juga dilibatkan. Pameran hari ini berlangsung mulai pukul 13.00 WITA hingga malam hari, serta 10–11 Juli mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
 - Dekranasda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan Bank Indonesia berpartisipasi pada ekspso HUT Dekranas ke 45 di Balikpapan.

7. Pelatihan Desain dan Sulaman karawo

- Tujuan meningkatkan kualitas dan variasi motif, melestarikan budaya Gorontalo, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, serta memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi digital dan teknik desain modern, agar kerajinan karawo tetap relevan, inovatif, dan dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun internasional.
- Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 – 27 Nopember 2025 berlokasi di Rumah Produksi TIAR HANDYCRAFT Kompleks Danau Perintis Desa Huluduotamu Kabupaten Bone Bolango.
- Peserta yang dilatih sebanyak 15 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango.

8. Rakernas Dekranas

- Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Ketua Dekranasda Provinsi bersama Pengurus dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota.

9. Rakerda Dekranasda Provinsi Gorontalo

- Bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas, inovasi, pemasaran, dan daya saing produk kerajinan lokal berbasis budaya, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan pengrajin melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
- Kegiatan Rakerda ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025 dan diikuti oleh Dekranasda Kabupaten Kota serta para perajin dari Kabupaten Kota.

10. Pameran Inacraft di Jakarta

- Bertujuan untuk mempromosikan kekayaan seni dan kerajinan Provinsi Gorontalo, meningkatkan pasar domestik dan peluang ekspor, serta mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor kerajinan agar dapat bersaing di pasar global. Pameran ini menjadi platform bagi pengrajin untuk memamerkan produk, mendapatkan eksposur media, bertemu pembeli potensial (termasuk internasional), meningkatkan kualitas produk, dan membangun citra merek.
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1-5 Oktober 2025 di Jakarta dan diikuti oleh Dekranasda Provinsi Gorontalo.

11. Roadshow ke IKM Kerajinan di Kabupaten se Provinsi Gorontalo

- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memfasilitasi perizinan (seperti NIB), mempromosikan produk unggulan, memberikan informasi layanan pendukung (teknis, sertifikasi, digital), serta meningkatkan kualitas dan pemasaran produk kerajinan melalui sosialisasi program pemerintah, pelatihan, dan akses pasar. Selain itu juga bertujuan sebagai platform untuk mengumpulkan masukan langsung dari pengrajin demi perbaikan kebijakan dan program.
- Roadshow Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo bersama pengurus Dekranasda dilaksanakan pada bulan oktober dan Nopember 2025 di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

12. Capacity Building bagi Pelaku IKM Kerajinan

- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan (teknis, manajerial, kepemimpinan), efisiensi, dan daya saing agar mampu berinovasi, bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar yang berubah, melalui peningkatan kualitas SDM, pemasaran, manajemen, dan akses pasar, sehingga produk kerajinan lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah tinggi

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 23 Desember 2025 di Kota Gorontalo yang diikuti oleh para perajin se Provinsi Gorontalo

Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Target 12 Dokumen, capaian 100%)

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 298.720.000,- kemudian terdapat revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 196.566.000,-) sehingga total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 102.154.000- dengan realisasi sebesar Rp. 101.996.900,- (99,85% keuangan, fisik 100%)

Output kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi Penginputan Data Siinas pada Siidig 2025

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator kabupaten/kota serta melakukan perbaikan terhadap aplikasi siidig dari tahun 2020 sampai tahun 2025 sehingga diharapkan data yang di tampilkan mampu memberikan sumbangsih data

Maksud Pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya data perindustrian yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kegiatan di ikuti 30 peserta yang terdiri dari operator data di Kabupaten/Kota, Aparat urusan industri Kabupaten/Kota Yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

- Verifikasi Bantuan Alat & Mesin

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan diharapkan bantuan yang di berikan oleh pemerintah provinsi gorontalo tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maskimal terhadap para IKM khususnya IKM perbengkelan. Dilaknakan pada 6 wilayah Kabupaten Kota Gorontalo

- Review terhadap penyusunan RPIK Kab. Bonebolango dan Kota Gorontalo

Tujuan Kegiatan

Sebagai amanat PP 110 tahun 2015 pedoman penyusunan RPIP dan RPIK bahwa Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap penyusunan RPIK Kabupaten/kota.

- Pengawasan serta evaluasi perizinan sektor perindustrian di Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2025 melakukan pengawasan terhadap perusahaan/pabrik yang beroperasi di Provinsi Gorontalo, juga melakukan verifikasi dari setiap perizinan yang diajukan oleh pihak swasta atau perusahaan, 1 ijin IUI pabrik karet milik PT. Pabrik Gula Gorontalo dan 2 penyesuaian KBLI PT. Tri Jaya Tangguh

pengawasannya adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing industri.

9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen fasilitasi untuk penerbitan Surat Keterangan Asal untuk 4 (empat) Perusahaan* yaitu PT. Biomasa Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Indo Selebes, PT. Pabrik Gula Gorontalo dan PT. Gorontalo Panel Lestari, PT. Gorontalo Panel Lestari serta perusahaan yang diawasi dalam hal pengawasan kualitas dan standar produk, pengawasan dokumen ekspor, pendampingan eksportir baru, dan memfasilitasi antara eksportir dengan instansi terkait yaitu perusahaan PT. Gorontalo Pangan Lestari, PT. Seger Pangan Sejahtera, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Dentosa Utama Lestari, PT. Indofish Gorontalo Ocean, PT. Tuna Teluk Tomini.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran hingga Desember 2025 sejumlah Rp. 23.550.000,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 berjumlah Rp. 23.405.540,- (99,39% keuangan dan

100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2025. Adapun silva pada program ini Rp. 144.460,- pada beberapa item belanja.

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 10 dokumen, capaian 74 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pendataan pengawasan monitoring dan evaluasi ekspor di pelabuhan dan identifikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor di kabupaten/kota
- Memastikan keaslian dan keabsahan asal barang yang diekspor, dan mencengah penyalagunaan
- Mengurangi risiko pemalsuan dokumen asal barang yang tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara pengimpor atau sanksi perdagangan bagi negara pengekspor
- Memastikan proses penerbitan SKA berjalan secara efisensi, transparan dan akuntabel bagi para eksportir

- b. Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Biomasa Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Indo Selebes, PT. PG Gorontalo dan PT. Gorontalo Panel Lestari.

c. Adapun realisasi export tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Rekap Realisasi Eksport Berdasarkan Komoditi
Selang Bulan Januari – Desember 2025

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
1	WOOD PELET	216.561.565,00	34.019.535,26	KOREA SELATAN, JEPANG	PT. BIOMAS JAYA ABADI
2	WOOD PELET	64.087.460,00	8.987.242,65	JEPANG	PT. GORONTALO PANEL LESTARI
3	SANTAN BEKU	1.014.000,00	1.701.804,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
4	MINYAK KELAPA MENTAH	120.940,00	193.504,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
5	MOLASES	35.614.947,00	4.980.104,93	KOREA SELATAN	PT. PABRIK GULA GORONTALO
6	IKAN GOROPA, IKAN TENGGIRI	56.166,90	181.413,93	SINGAPURA	PT. FARIS OCEAN MANDIRI
					CV. GORONTALO FISHERY
7	IKAN TUNA	85.736,60	724.767,15	JEPANG, SINGAPURA	CV. TUSUKJI FREESH INDO CV. BERKAT ADIDAYA
8	KERANG DARAH	53.193,00	116.659,15	THAILAND	PT. NURSEAFOOD LIMA PUTRA
					PT. INDOFISH GORONTALO OCEAN
					CV. UTAMA PERKASA Indonesia
					CV. ADILA GRUP
9	SANTAN BEKU	889.000,00	1.514.611,59	MALAYSIA, JEPANG	PT. ROYAL COCONUT
10	MINYAK KELAPA MENTAH	40.780,00	84.664,00	MALAYSIA	PT. TENCO MITRA LESTARI
J U M L A H		318.523.789	52.504.306,66		

Tabel 3.23
Penerbitan SKA
Yang Dokumennya Telah Diterima dengan Lengkap dan Benar
Tahun 2025

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
1	3 Januari 2025	0000001/GTL/2025	INV.553/BJA/APB/XII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
2	13 Januari 2025	0000002/GTL/2025	INV.583/BJA/APB/II/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
3	14 Januari 2025	0000003/GTL/2025	MAS-SB-2410-01/PP001	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
4	16 Januari 2025	0000004/GTL/2025	MAS-SB-2410-02/PP002	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
5	23 Januari 2025	0000005/GTL/2025	INV.003/BJA/APB/II/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
6	6 Februari 2025	0000006/GTL/2025	INV.040/BJA/HAN/II/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
7	6 Februari 2025	0000007/GTL/2025	MAS-SB-2410-03/PP003	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
8	6 Februari 2025	0000008/GTL/2025	MAS-SB-2410-04/PP004	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
9	07 Februari 2025	0000009/GTL/2025	MAS-MP-250101-PP001	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
10	18 Februari 2025	0000010/GTL/2025	MAS-SB-2410-05/PP005	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
11	18 Februari 2025	0000011/GTL/2025	MAS-SB-2410-06/PP006	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
12	27 Februari 2025	0000012/GTL/2025	INV.082/BJA/HAN/II/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
13	5 Maret 2025	0000013/GTL/2025	MAS-SB-2410-07/PP007	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
14	6 Maret 2025	0000014/GTL/2025	MAS-SB-2410-08/PP008	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
15	7 Maret 2025	0000015/GTL/2025	MAS-MP-2502101-PP002	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
16	13 Maret 2025	0000017/GTL/2025	INV.124/BJA/HAN/III/202	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. REPUBLIC OF KOREA
17	21 Maret 2025	0000018/GTL/2025	MAS-SB-2410-10/PP010	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
18	21 Maret 2025	0000019/GTL/2025	MAS-SB-2410-11/PP011	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
19	21 Maret 2025	0000020/GTL/2025	MAS-SB-2410-12/PP012	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
20	25 Maret 2025	0000021/GTL/2025	INV.150/BJA/HAN/III/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
21	26 Maret 2025	0000022/GTL/2025	MAS-SB-2410-09/PP009	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
22	1 April 2025	0000023/GTL/2025	MAS-SB-2503-01/PP013	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
23	24 April 2025	0000026/GTL/2025	INV.189/BJA/HAN/IV/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
24	28 April 2025	0000027/GTL/2025	MAS-MP-250301-PP003 MAS-SB-2504-01-	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
25	2 Mei 2025	0000028/GTL/2025	02/PP014/PP015	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
26	9 Mei 2025	0000029/GTL/2025	INV.219/BJA/APB/V/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. REPUBLIC OF KOREA
27	9 Mei 2025	0000030/GTL/2025	MAS-SB-2504-03/PP016	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
28	15 Mei 2025	0000031/GTL/2025	002/FD-TLM/V/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
29	15 Mei 2025	0000032/GTL/2025	004/FD-TLM/V/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
30	15 Mei 2025	0000033/GTL/2025	006/FD-TLM/V/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
31	15 Mei 2025	0000034/GTL/2025	008/FD-TLM/V/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
32	28 Mei 2025	0000035/GTL/2025	MAS-SB-2505-01/PP017	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
33	2 Juni 2025	0000036/GTL/2025	INV.265/BJA/GSG/V/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	GS GLOBAL CORP, REPUBLIC OF KOREA
34	23 Juni 2025	0000037/GTL/2025	INV.303/BJA/HAN/VI/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
35	26 Juni 2025	0000038/GTL/2025	MAS-SB-2506-01/PP018	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
36	30 Juni 2025	0000039/GTL/2025	MAS-MP-250501-PP004	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
37	7 Juli 2025	0000040/GTL/2025	INV.343/BJA/HAN/VII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
38	16 Juli 2025	0000041/GTL/2025	MAS-SB-2506-02/PP019	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
39	22 Juli 2025	0000042/GTL/2025	MAS-SB-2506-03/PP020	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
40	22 Juli 2025	0000043/GTL/2025	MAS-SB-2506-04/PP021	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
41	1 Agustus 2025	0000044/GTL/2025	MAS-SB-2507-01/PP022 MAS-SB-2507-02-	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
42	13 Agustus 2025	0000045/GTL/2025	03/PP023/PP024	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
43	19 Agustus 2025	0000046/GTL/2025	INV.391/BJA/HAN/VIII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
44	19 Agustus 2025	0000050/GTL/2025	MAS-SB-2507-04-05/PP025/PP026	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
45	19 Agustus 2025	0000051/GTL/2025	MAS-MP-250701-PP005	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
46	21 Agustus 2025	0000047/GTL/2025	013/FD-TLM/VIII/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
47	21 Agustus 2025	0000048/GTL/2025	INV.424/BJA/HAN/VIII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
48	22 Agustus 2025	0000049/GTL/2025	MAS-SB-2508-01/PP027	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
49	2 September 2025	0000052/GTL/2025	INV.450/BJA/APB/VIII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
50	11 September 2025	0000053/GTL/2025	INV.483/BJA/APB/IX/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
51	23 September 2025	0000054/GTL/2025	MAS-SB-2508-02/PP028	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
52	25 September 2025	0000055/GTL/2025	MAS-MP-250901-PP006	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
53	26 September 2025	0000056/GTL/2025	INV.522/BJA/HAN/IX/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
54	7 Oktober 2025	0000057/GTL/2025	MAS-SB-2509-02/PP030	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
55	8 Oktober 2025	0000058/GTL/2025	MAS-SB-2509-01/PP029	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
56	14 Oktober 2025	0000059/GTL/2025	INV.550/BJA/HAN/X/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
57	16 Oktober 2025	0000060/GTL/2025	MAS-SB-2510-01-02/PP032/PP033	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
58	21 Oktober 2025	0000061/GTL/2025	MAS-SB-2509-03/PP031	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
59	4 November 2025	0000062/GTL/2025	INV.589/BJA/APB/X/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
60	10 November 2025	0000063/GTL/2025	MAS-SB-2510-03/PP034	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
61	18 November 2025	0000064/GTL/2025	INV.617/BJA/HAN/XI/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
62	24 November 2025	0000065/GTL/2025	INV.640/BJA/APB/XI/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN

No	Tgl. Daftar	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
63	02 Desember 2025	0000072/GTL/2025	MAS-SB-2511-02/PP036	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
64	02 Desember 2025	0000073/GTL/2025	MAS-SB-2511-03/PP037	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
65	03 Desember 2025	0000066/GTL/2025	INV.669/BJA/HAN/XII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. JAPAN
66	05 Desember 2025	0000071/GTL/2025	MAS-SB-2511-01/PP035	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
67	05 Desember 2025	0000067/GTL/2025	019/FD-TLM/XI/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
68	05 Desember 2025	0000068/GTL/2025	018/FD-TLM/XI/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
69	05 Desember 2025	0000069/GTL/2025	017/FD-TLM/XI/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
70	05 Desember 2025	0000070/GTL/2025	016/FD-TLM/XI/2025	PT PABRIK GULA GORONTALO	REPUBLIC OF KOREA
71	11 Desember 2025	0000074/GTL/2025	MAS-SB-2512-01/PP038	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA
72	19 Desember 2025	0000075/GTL/2025	INV.706/BJA/HAN/XII/2025	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. REPUBLIC OF KOREA
73	20 Desember 2025	0000076/GTL/2025	GPL-12-2025-0000006	PT GORONTALO PANEL LESTARI	BANK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO. JAPAN
74	24 Desember 2025	0000077/GTL/2025	MAS-SB-2512-02/PP039	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD CHINA

10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 28 Laporan yaitu 12 Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya serta 16 Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Dalam pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran hingga Desember 2025 sejumlah Rp. 4.130.936.500,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 berjumlah Rp. 4.076.805.113,- (98,69% keuangan dan 100% fisik). Adapun pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.024.429.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sejumlah (Rp. 103.492.500,-), tambahan anggaran hasil pencadangan anggarang sesuai Inpres 1 Tahun 2025 sejumlah Rp. 1.710.000.000,- (antara lain pada item belanja barang yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.541.550.000),- serta belanja lainnya yang bersesuaian) dan revisi penyesuaian pagu SKPD TA. 2025 Rp. 1.500.000.000,- (antara lain pada item belanja barang yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.377.450.000,- serta belanja lainnya yang bersesuaian).

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

✚ **Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan sub kegiatan :

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota.

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 44.258.000,- dan mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp.17.000.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.258.000,- dengan realisasi Rp. 27.203.972,- dengan realisasi keuangan 99,80% dan fisik 100%. Anggaran untuk sub kegiatan ini meliputi belanja ATK, kertas dan bahan computer serta perjalanan dinas biasa.

Output kegiatan ini adalah :

1. Pemantauan harga barang pokok (beras, gula, minyak goreng, cabe rawit, bawang merah, telur) di pasar rakyat di kabupaten/kota dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan stok barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di pasar rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataupun terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan operasi pasar/ kebutuhan murah bersubsidi.

Kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antara lain meliputi :

- Monitoring pelaksanaan pemantauan dan pelaporan harga oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan;
- Supervisi langsung di pasar pantauan kabupaten/kota guna memastikan pemantauan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan;
- Pelatihan dan pendampingan petugas pemantau harga Komoditi di pasar rakyat dari dinas kabupaten/kota.

Secara teknis pelaksanaan pemantauan dilaksanakan setiap harinya di hari kerja, mulai dari pukul 08.00 s/d pukul 11.00, untuk selanjutnya diinput/dilaporkan oleh petugas/kontributor, melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag RI

Pelaksanaan pemantauan harga tidak terlepas dari permasalahan teknis dan non teknis, seperti adanya perbedaan harga antara petugas pemantau harga di kabupaten kota dan provinsi terhadap pasar pantauan yang sama.

Sebagai upaya dalam menyamakan persepsi serta ketaatan/ketepatan waktu dan substansi materi terkait pelaporan pemantauan pasar dan harga barang kebutuhan pokok, maka diperlukan hal-hal diantaranya;

- Pelaporan terkait ketersediaan dan kondisi harga barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan yang terkonfirmasi dengan petugas dari dinas terkait di kota/kabupaten;
 - Ketepatan data dan kepatuhan batas waktu pelaporan merupakan hal yang sangat penting, sehingga para petugas pendataan dan pelaporan harus benar-benar memperhatikan hal ini termasuk validitas datanya.
2. Monitoring harga, pasokan, dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H di Pasar Rakyat Kabupaten Boalemo.

dalam rangka mengantisipasi kenaikan permintaan dan keterbatasan stok barang pokok, yang biasanya terjadi menjelang HBKN Ramadhan 1446 H. Hasil pemantauan di lapangan untuk sejumlah barang pokok, seperti Gula, Minyak Goreng, telur, dan mentega sudah mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga barang pokok ini disebabkan karna tingginya permintaan menjelang momen bulan Ramadhan. Belum lagi ditambah dengan kondisi keterlambatan pasokan akibat keterbatasan muatan kendaraan operasional, yang terjadi hampir di semua daerah.

✚ Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang

dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 4 laporan dari target 4 laporan.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 915.765.000,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 3.145.614.500,- yaitu :

- Revisi hasil pencadangan anggaran OPD 2025 (Rp. 64.385.500,-)
- Pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres I Tahun 2025 & SE Mendagri 900/833/SJ Tahun 2025 senilai Rp. 1.710.000.000,- (pada beberapa item belanja antara lain belanja barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.541.550.000,- dan belanja operasional pendukung pelaksanaan operasi pasar Rp. 168.450.00,-)
- dan revisi penyesuaian pagu OPD TA. 2025 Rp. 1.500.000.000,- (item belanja barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.377.450.000,- dan belanja pendukung lainnya Rp. 122.550.000).

Total pagu sub kegiatan setelah perubahan sebesar Rp. 4.061.379.500- dengan realisasi Rp. 4.007.342.341,- (98,67% keuangan, fisik 100%)

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 1.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana IF, dengan rincian :

- Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp. 1.710.000.000,- yaitu Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa barang kebutuhan pokok dan pendukung lainnya pada kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 laporan dan capaian 4 laporan pelaksanaan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi atau yang juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pasar Murah Bersubsidi. Kondisi perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi setiap hari, utamanya ketika menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menuntut adanya intervensi harga dari Pemerintah. Salah satunya melalui kegiatan Pasar Murah Bersubsidi. Untuk sekali pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, yang ditargetkan dapat melayani ± 1000 kpm (Kelompok Penerima Manfaat).

Di tahun 2025 Jumlah pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi mencapai 28x pelaksanaan dan berhasil melayani masyarakat sebanyak 23.583 penerima manfaat di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.

Kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menyediakan produk antara lain komoditi Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Telur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya pada komoditi yang mengalami lonjakan harga ditambah peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan 1446 H.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dan menjual komoditi yang turut mempengaruhi inflasi yaitu:

- Beras kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp.25.000 atau @Rp.5.000/Kg;
- Gula Pasir kemasan 1 Kg dijual Rp.10.000/Kg.
- Minyak Goreng kemasan botol 1 liter dijual Rp.10.000/Liter;
- Telur kemasan 10 butir dijual Rp.10.000/pack atau @Rp.1.000/butir
- Cabai Rawit dikemas dalam tas 0,5 Kg atau 0,25 Kg dijual Rp.10.000
- Bawang Merah dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Bawang Putih dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;

sebaran pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di wilayah kabupaten kota Provinsi Gorontalo dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 24
Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi TA. 2025

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Penerima Manfaat
1	Kota Gorontalo	6	4706
2	Kabupaten Gorontalo	9	8135
3	Boalemo	3	1900
4	Pohuwato	2	885
5	Bone Bolango	5	4750
6	Gorontalo Utara	3	3207
Total		28	23.583

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan capaian 12 laporan dari target 12 laporan.

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 64.406.000,- dan terdapat revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp.22.107.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa dan makan minum rapat, sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 42.299.000,- dengan realisasi Rp. 442.258.800,- (Capaian kinerja realisasi keuangan 99,90% dan fisik 100%). Anggaran untuk sub kegiatan ini hanya meliputi belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan/Monev pupuk bersubsidi.

Output kegiatan ini adalah :

Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025 yang dilaksanakan sebanyak 15 (Lima belas) kali di 6 (enam) lokasi Kabupaten/Kota. Pengawasan dikhususkan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari alokasi/kuota pupuk bersubsidi di tiap Kabupaten/Kota, proses

pendistribusiannya, penerapan harga eceran tertinggi, hingga kesesuaian penerima alokasi pupuk bersubsidi. Secara umum hasil kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar, namun belum begitu efektif karna terbatas dengan ketersediaan anggaran. Permasalahan mulai dengan adanya keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi, masih adanya petani yang ingin membeli pupuk subsidi, namun belum terdaftar dalam sistem E-RDKK, hingga adanya indikasi penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai (baik kuota, lokasi, hingga penerima pupuk), semuanya bisa diawasi dan dikoordinasikan dengan pihak produsen maupun distributor untuk penyelesaian permasalahannya, dan jika ada pelanggaran ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi.

11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Outcome dari program ini adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 8 Komoditi, dan capaian 8 komoditi yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diekspor diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah).

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor Unggulan Yang terdapat pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk ekspor Unggulan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan dengan capaian 20 pelaku usaha dari target 8 pelaku usaha.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 228.052.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar (Rp. 136.538.000),-. Sehingga total pagu akhir Rp. 91.514.000,-

Output kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan Misi dagang ke Kota Samarinda, untuk membangun kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama di bidang perdagangan Sapi. Yang di tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama Tentang Kerja Sama Pemberdayaan Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan antara Dinas Kumperindang Provinsi Gorontalo dengan Dinas PERINDAG, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur
2. Pelaksanaan Kegiatan misi dagang dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 20 (dua Puluh) pelaku usaha
Tujuan Pelaksanaan kegiatan
 - Memperkenalkan produk unggulan ke calon pembeli
 - Membentuk jaringan pemasaran yang efisiensi dan membangun kemitraan strategis antar pelaku usaha
 - Mempromosikan produk unggulan secara langsung.
 - Mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi agar produk memenuhi standar dan permintaan pasar global
 - Meningkatkan nilai transaksi perdagangan yang berkontribusi pada pendapatan daerah dan pertumbuhan daerah

12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 9 Dokumen, Capaian 9 Dokumen yaitu dokumen pengawasan produk potensial yang dipantau, pengujian mutu barang yang diterbitkan, dokumen pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota serta dokumen hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi

Alokasi Anggaran awal program ini Sebesar Rp. 2.432.088.000,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 79.390.000,- dan revisi hasil pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar Rp. 1.224.263.500,- pada beberapa item belanja yang bersesuaian, sehingga total anggaran setelah perubahan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.296.964.500,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.259.117.472,- (96,26 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik).

Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen, capaian 187 kasus dari target 12 kasus

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.920.518.000,- kemudian terdapat tambahan anggaran melalui finalisasi APBD-P sebesar Rp. 47.310.000,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain perjalanan dinas biasa Rp. 37.404.000,- dan bahan cetak Rp. 156.000,- dan makan minum rapat Rp. 9.750.000,- serta revisi hasil pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar Rp. 969.694.000,- Sehingga total pagu anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 998.134.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 960.789.900,- dan silva sebesar Rp. 37.344.100,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak tertagih lagi Rp. 37.340.000,- karena target kinerja anggota BPSK yang tidak tercapai dan terdapat 9 (sembilan) orang anggota BPSK yang tidak ditagih lagi honorinya (3 orang BPSK Kabupaten Boalemo, 3 orang BPSK Kabupaten Gorontalo Utara dan 3 Orang Kabupaten Bone Bolango karena alasan pensiun 1 orang, pindah domisi 1 orang, mengundurkan diri karena terangkat menjadi PNS 3 orang, 4 orang mengundurkan diri serta pada item belanja lainnya. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 96,26%.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK.

Pada Tahun 2021 telah terbentuk Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen di 3 (tiga) Kabupaten yakni BPSK Kabupaten Gorontalo, BPSK Kabupaten Pohuwato dan BPSK Kota Gorontalo. Dan di Tahun 2022 di bentuk 3 (tiga) Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen yakni BPSK Kabupaten Boalemo, BPSK Kabupaten Gorontalo Utara, BPSK Kabupaten Bone Bolango yang pelantikan dan pengambilan sumpah pada Bulan September Tahun 2022.

Penyelesaian Sengketa Konsumen di lakukan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen seperti promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, dan lain-lain. Sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan juga oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang di tentukan oleh pemerintah provinsi. Sasaran Pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dan konsumen untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Pengaduan Sengkea Konsumen di antaranya :

1. Pengaduan permasalahan pembiayaan
 2. Pengaduan mengenai Pengkreditan melalui Bank
 3. Pengaduan Klausula Baku
- b. Jumlah Monitoring dan evaluasi BPSK di 6 (enam) Kabupaten/Kota
- c. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan melalui mediasi Dinas Kumperindag Provinsi yaitu :
- Pengaduan pembelian HP yang tidak ada garansi'
 - Pengaduan tentang gas LPG di atas Harga HET
 - Pengaduan tentang BJ Beton yang tidak sesuai Ukuran
 - Pengaduan Mengenai Barang yang tidak Berbahasa Indonesia

- Pengaduan tentang Barang Kadaluarasa
- d. Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Tahun 2025 sebanyak 187 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 187 kasus antara lain tentang Pengaduan Klausula Baku, Pengaduan permasalahan pembiayaan, liter/timbangan, penjualan LPG diatas harga Het, penjualan makanan/minuman sudah berjamur ditoko-toko serta Harga yang tidak bersesuaian dengan pembelian

NO	Nama BPSK/Dinas	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Selesai	Keterangan
1	Kota Gorontalo	Kalausula Baku/Pembiayaan	44	43	1(satu) pengaduan konsumen bukan kewenangan BPSK
2	Kabupaten Gorontalo	Kalausula Baku/Pembiayaan	23	22	1(satu) pengaduan konsumen Masih dalam Proses penyelesaian
3	Kabupaten Boalemo	Kalausula Baku/Pembiayaan/PLN	42	41	1(satu) pengaduan konsumen Masih dalam Proses penyelesaian
4	Kabupaten Bone Bolango	Kalausula Baku/Pembiayaan	13	12	1(satu) pengaduan konsumen Masih dalam Proses penyelesaian
5	Kabupaten Pohuwato	Kalausula Baku/Pembiayaan	34	33	1(satu) pengaduan konsumen bukan kewenangan BPSK
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Kalausula Baku/Pembiayaan	14	12	1(satu) pengaduan konsumen bukan kewenangan BPSK
7	Provinsi Gorontalo	liter/Timbangan (Pasar2 Tradisional/ toko)	5	5	Pembinaan
		LPG di jual di atas HET	5	5	Pembinaan
		Makanan dan minuman sudah berjamur	2	2	Pembinaan

NO	Nama BPSK/Dinas	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Selesai	Keterangan
		Pembelian yang harganya tidak bersesuaian antara harga	5	5	
Total			187	187	

❖ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pengujian dan sertifikasi mutu produk dengan target 204 dokumen, capaian 112 Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang. Jumlah pagu induk kegiatan ini total sejumlah Rp. 421.094.000, kemudian terdapat revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 (Rp. 219.898.500) pada beberapa item belanja yang bersesuaian serta pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 41.830.000,- Sehingga anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga 31 Desember 2025 sejumlah Rp. 243.025.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2242.525.672,- atau 99.79 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Produk Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi, capaian 2 komoditi yaitu komoditi kopi dan biji kakao. Target ini tidak tercapai karena minimnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan komoditi potensial.

Anggaran induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 95.259.000,- kemudian terdapat revisi pencadangan OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 77.215.000,-). Total pagu akhir setelah perubahan Rp. 18.084.000,- dengan realisasi Rp. 18.060.400,- dan selisih Rp. 23.600,- (capaian keuangan 99,87% dan fisik 100%).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk

Produk Ekspor Tertentu, dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

Output kegiatan ini adalah :

Pengawasan dan pemantauan mutu komoditi dan barang/produk ber SNI di Kabupaten Pohuwato untuk komoditi kakao dan di Kabupaten Bone Bolango untuk komoditi kopi dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Jumlah pagu induk sejumlah Rp. 259.258.000, kemudian terdapat revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 (Rp. 79.323.500) pada item belanja perjalanan dinas biasa dan belanja bahan kimia. Sehingga anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini hingga 31 Desember 2025 sejumlah Rp. 179.934.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.590.872,- atau 99.81 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengujian/Sertifikat Kesesuaian Mutu barang yang diterbitkan, target 200 laporan capaian 112 laporan. Laporan Hasil Pengujian antara lain pada komoditi beras, biji kakao, rumput laut, gabah, gelatin tulang ikan, cangkang sotong, jagung, lada putih, produk UMKM, karbon aktif tempurung kelapa. Ketidakaapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji kakao) sesuai keinginan pelanggan dan kurang maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pengujian komoditi sesuai standar dengan 680 kali pengujian dan 112 Laporan Hasil Pengujian
- b. Pengambilan sampel (contoh uji) di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi
 - Menjaga kompetensi analisis
- c. Penyediaan bahan kimia penunjang laboratorium pengujian

Tujuannya adalah:

- Menjamin agar pengujian dapat berlangsung dengan lancar dan baik
- d. Penyediaan bahan lainnya penunjang laboratorium pengujian
- e. Jasa kalibrasi peralatan laboratorium
- f. Rapat kaji ulang manajemen dan kaji ulang dokumen
- g. Pengelolaan limbah laboratorium
- h. Mengikuti Kegiatan Uji Banding Antar Laboratorium, yaitu :
 - Uji Banding beras BPSMB Kalimantan Timur. Tanggal 2-13 Juni 2025. Peserta 7 Laboratorium pengujian. Parameter Benda Asing (memuaskan), Kadar Air (memuaskan), Butir Merah (memuaskan)
 - Uji Banding Rumput Laut BPSMB Sulawesi Selatan. Tanggal 3-7 Maret 2025. Peserta 4 Laboratorium pengujian. Kadar Air (memuaskan), impurities kasar (memuaskan)
 - Uji Banding lada putih. Tanggal 2 s/d 13 Juni 2025. Peserta 7 (tujuh) Laboratorium pengujian. Kadar Air : tidak ikut. Benda Asing : Inlier. Lada kehitam-hitaman : outlier
 - Uji Profisiensi minyak goreng sawit oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Tanggal 4-15 Agustus 2025. Peserta 28 Laboratorium pengujian Kadar asam lemak bebas (memuaskan)

Tabel 3.25
Rekapitulasi Pengujian Laboratorium BPSMB Tahun 2025

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH PENGUJIAN	JUMLAH		PARAMETER PENGUJIAN	KETERANGAN
				LHP	SKM		
1	BERAS	1	10	1	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Ds. Lupoyo Kec. Telaga Biru. (Hais Nusi 082188494212)
2	BIJI KAKAO	1	9	1	0	Kadar Air, Serangga Hidup, Biji Berbau Asap, Benda Asing, Biji Pecah, Jumlah Biji, Biji Cacat, Kadar Kulit, Kadar Keping Biji	Ds. Mekarti Jaya Dusun li Ud. Sumber Rezeki (Tamiyani 0852 1104 5417)
3	BERAS	5	50	5	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah,	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH PENGUJIAN	JUMLAH		PARAMETER PENGUJIAN	KETERANGAN
				LHP	SKM		
						Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Monoarfa) "085366613121"
4	RUMPUT LAUT	7	14	0	0	Kadar Air, Impurities Kasar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Bpsmb Makassar)
5	GABAH	3	12	0	0	KADAR AIR, GABAH HAMPA, BUTIR RUSAK, BENDA ASING	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Bogor.
6	BERAS	4	40	4	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Ds. Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo (King Rice)
7	GELATIN TULANG IKAN	6	6	6	0	KADAR ABU	Jl. Piola Isa No. 126 Hadiyanto No. Hp 081241076929
8	CANGKANG SOTONG	3	6	3	0	KADAR AIR, KADAR ABU	Jl. Batu jajar Kel. Tanjung Kramat Kec. Hulontaloangi
9	RUMPUT LAUT	2	4	2	0	KADAR AIR, SENSORI	Ds. Popalo Kec. Anggrek "Ibu Ecen Jafar" 085397666876
10	RUMPUT LAUT	2	4	2	0	KARAGINAN	Ds. lodelunga Kec.Anggrek "Utun Dai" 082192001360
11	JAGUNG	2	10	2	0	KADAR AIR, BUTIR RUSAK, BUTIR WARNA LAIN, BUTIR PECAH, KOTORAN	Ds. Bakti Kab. Gorontalo "Kasma Abdullah Paneo" No. Hp 0812 8793 9936
12	LADA PUTIH	2	3	-	0	KADAR AIR, BENDA ASING, KADAR LADA PUTIH BERWARNA KEHITAM-HITAMAN	Uji Banding Kalimantan Timur
13	BERAS	3	3	-	0	BUTIR MERAH, BENDA ASING, KADAR AIR	Uji Banding Kalimantan Timur

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH PENGUJIAN	JUMLAH		PARAMETER PENGUJIAN	KETERANGAN
				LHP	SKM		
14	BERAS	1	10	1	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Pangan 'Haryadi Saktian' (Kasim) 081942424127
15	SELAI (KACANG SACHA dan GULA AREN)	12	12	4	0	KADAR LEMAK	Ung Maharani Ampile 085241779670
16	BISKUIT (SORGUM dan HATI SAPI)	12	24	4	0	KADAR LEMAK dan KADAR ABU	Ung Amaliah Nurul Fadhilah 085345464951
17	PERMEN JELLY (WORTEL dan KULIT BUAH NAGA MERAH)	12	12	4	0	KADAR ABU	Ung (Binnaria Sembiring) 085270152608
18	NUGGET (TEPUNG KACANG dan DAGING IKAN TUNA)	12	12	4	0	KADAR ABU	UNG (Rahmat Raihandi Usman) 085270152608
19	KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA	1	1	1	0	KADAR ABU	Ung (Ririn Indriani M. Rahman) 089530222984
20	CRECKERS SORGUM dan DAUN KELOR	12	12	4	0	KADAR ABU	Ung (Amelya Alifya Putri) 085397415583
21	BERAS	8	80	8	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi Monoarfa) "085366613121" Beras
22	BERAS	2	20	2	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Ud. Taat Karya Desa Bulotalangi Kab. Bonebolango Beras
23	KUE PIA	4	4	4	0	KADAR ABU	Husain Panggi Tilongkabila
24	BERAS	8	80	8	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi Monoarfa) "085366613121" Beras

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH PENGUJIAN	JUMLAH		PARAMETER PENGUJIAN	KETERANGAN
				LHP	SKM		
25	BISKUIT	4	4	4	0	KADAR ABU	Ung (Sintawati Duyo) Jl. Bj Habibie Kec. Tilongkabila 085255512895
26	FLAKES	4	4	4	0	KADAR ABU	Sri Restanti Mahful
27	MINYAK GORENG SAWIT	1	1	0	0	KADAR ASAM LEMAK BEBAS	Jakarta Timur
28	CANGKANG SOTONG	3	3	3	0	KADAR ABU	Arviani Jl. Batu Jajar Kel. Tanjung Kramat
29	BERAS	10	100	10	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak, Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi Monoarfa) "085366613121" Beras
30	BERAS	3	30	3	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak, Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi Monoarfa) "085366613121" Beras
31	BROWNIS KAKAO	4	4	4	0	KADAR LEMAK	UNG
32	NAORI ANALOG DAUN KELOR	4	4	4	0	KADAR LEMAK	UNG
33	BERAS	1	10	1	0	„ minyak goreng sawit,	Dinas Pangan
34	MINYAK KELAPA	1	2	1	0	KADAR AIR, FFA	Moh. Yusuf Antu
35	BERAS	7	70	7	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak, Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Dinas Ketahanan Pangan (Siswandi Monoarfa) "085366613121"
36	BERAS	1	10	1	0	Kadar Air, Derajat Sosoh, Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Rusak, Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah	Mirna Ibrahim Dinas Pangan Bowalemo
TOTAL KESELURUHAN		168	680	112	0		

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Indikator Kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Sertifikat produk/person/sertifikat inspeksi yang diterbitkan dengan target 4 sertifikat dan capaian tidak ada karena di Tahun 2025 tidak ada ekspor untuk 4 (empat) komoditi akreditasi yaitu jagung, beras, biji kakao dan rumput laut sehingga belum ada Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) yang diterbitkan, disamping itu belum ada perluasan ruang lingkup BPSMB sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 66.537.000,- kemudian pada tahapan finalisasi APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 41.830.000,- (belanja perjalanan dinas biasa, belanja bimbingan teknis, belanja makan minum aktivitas lapangan) dimana sebelumnya mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 63.360.000,-) pada beberapa item belanja yang bersesuaian. Sehingga pagu setelah perubahan Rp. 45.007.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.874.400,- atau 99.71 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik, silva Rp. 132.600,-

Output kegiatan ini adalah :

- a. Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Mutu melalui Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal dan Kaji Ulang Dokumen.
- b. Pelaksanaan Kegiatan *Inhouse Training* (IHT) ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- c. Pembayaran Iuran Tahunan untuk pemeliharaan akreditasi laboratorium pengujian

❖ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan target 50 pelaku usaha, capaian 55 pelaku usaha.

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi dengan target 12 laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Pagu anggaran induk 2025 yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 90.476.000,- Anggaran induk ini mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 34.671.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa. Sehingga pagu akhir sebesar Rp. 55.805.000,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 55.801.900,- dengan silva Rp. 3.100,- Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%.

Output kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di

amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
- c. Diatribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kwalifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistim elektronik

Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

- 1. Terdapatnya Alat Ukur yang belum di Kalibrasi
- 2. Masih Banyak yang menjual Gas LPG di atas HET
- 3. Terdapatnya Mainan anak, celokan, kabel,Lampu LHE, Konfor Gas, kipas angin, Yang sudah Standar Nasional Namun masih perlu pengujiannya
- 4. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman

dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di Kabupaten Gorontalo, toko di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara

5. Hampir Semua Toko-toko, Swalayan, Supermarket dan Mini Market yang memperdagangkan barang tidak mempunyai label Harga pada Barang.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi

- a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi

- Pola Distribusi dari Produsen
- Distributor, Agen ke Pengecer.
- Distribusi Barang

- b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.

- Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.

- c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.

2. Perijinan

- Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)

3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Pasar rakyat
- Pusat-pusat perbelanjaan
- Toko swalayan
- Gudang
- Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Terdapatnya Pedagang yang menjual Minyak Goreng Merek MinyakIta di atas HET
2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin

4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.
8. Terdapatnya SPBU yang mengisi Galon-galon tanpa surat rekomendasi resmi dari dinas terkait yakni dinas pertanian dan dinas perikanan sehubungan dengan musim tanam di bidang pertanian serta bagi nelayan untuk keperluan tangkap ikan
9. Terdapatnya pungli pada saat pengambilan nomor antrian pada SPBU-SPBU

Tabel 3.26
Hasil Pengawasan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2025

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	PROSES HUKUM	PEMBINAAN	KETERANGAN
1	- KASUS ALAT UKUR UTP	10	PEMBINAAN	10	liter/Timbangan
		10	PEMBINAAN	10	LPG(Pasar2 Tradisional) (diserahkan Di Kab/Kota)
2	SNI (Wajib)	5	PEMBINAAN	5	Mainan anak
		2	PEMBINAAN	2	Tusuk Kontak
		2	PEMBINAAN	2	Kabel Lisrik
		2	PEMBINAAN	2	Kipas Angin
		1	PEMBINAAN	1	Pakaian Bekas pasar Tradisional
		2	PEMBINAAN	2	Konfor Gas
3	Harga Pada Barang	10	PEMBINAAN	10	Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangan di Kab-Kota
4	Perbedaan Harga antara pajangan dan mesin hitung	5	PEMBINAAN	5	Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	PROSES HUKUM	PEMBINAAN	KETERANGAN
5	Minyak Goreng Curah	5	PEMBINAAN	5	Di jual tidak sesuai dengan Harga HET Pasar Tradisional
6	-KADALUARSA	10	PEMBINAAN, Diserahkan ke B'POM	10	Kab/Kota, Di serahkan Ke B'POM
7	Makan dan Minuman	2	PEMBINAAN	2	Makanan dan Minuman belum kadaluarsa namu sudah berjamur
JUMLAH TEMUAN		66		66	

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2025, Dinas Kumperindag mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 32.773.206.805,- Adapun rincian alokasi anggaran pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 :

- a. Anggaran induk 2025 = Rp. 22.071.294.305,-
- b. Tahapan Revisi Anggaran : = Rp. 10.701.912.500,-
 - ~ Revisi Hasil pencadangan Anggaran = (Rp. 3.548.673.500,-)
 - ~ Revisi Pergeseran antar OPD = Rp. 225.000.000,-
 - ~ Pemanfaatan Efisiensi = Rp. 12.578.276.000,-
 - ~ Penyesuaian Pagu SKPD = Rp. 1.400.000.000,-
 - ~ APBD-P 2025 = Rp. 47.310.000,-

Dari total anggaran tersebut terdapat tagging Pemanfaatan IF TA 2025 ((IF Kinerja Tahun Sebelumnya) sebesar Rp. 6.703.030.000,-

Total anggaran setelah perubahan 2025 sejumlah Rp. 32.773.206.805,-

📌 Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025

- Belanja Operasi : Rp. 32.773.206.805-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.976.439.505,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 22.129.306.100,-
- Belanja Modal : Rp. 667.461.200

📌 Realisasi Anggaran :

- Belanja Operasi : Rp. 28.806.278.960,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.597.812.304,-

- ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 18.544.250.909,-
- Belanja Modal : Rp. 664.215.747,-

Realisasi Keuangan sebesar 87,90% dan realisasi fisik 90,22% dengan sisa anggaran Rp. 3.966.927.845,- telah kembali ke Kas Daerah. Sisa anggaran terdiri dari :

- Sisa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.300.000.000,-
- Sisa belanja gaji dan tunjangan Rp. 454.519.032,-
- Sisa belanja Honorarium BPSK Rp. 37.340.000,-
- Sisa belanja operasional sub keg. Operasi pasar Rp. 54.037.159,-
- Sisa belanja rutin kantor (sub keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 42.753.483,-
- Silva Kegiatan lainnya Rp. 78.278.171,-

Adapun total alokasi anggaran belanja langsung tersebut, antara lain diperuntukkan untuk pencapaian sasaran strategis utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja.

Tabel. 3.27. Realisasi Anggaran Setiap Sasaran Strategis Mengacu pada Renstra 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.071.294.305	32.773.206.805	28.806.278.960	87,90
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.363.175.305	22.640.639.805	22.128.435.881	97,74
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	339.772.000	46.146.000	45.826.652	99,31
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	339.772.000	46.146.000	45.826.652	99,31
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	297.548.000	46.146.000	45.826.652	99,31

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	42.224.000	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.280.412.305	14.634.756.305	14.129.320.729	96,55
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.226.400	760.785.400	759.766.422	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	381.369.400	391.400.400	390.478.984	99,76
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.857.000	369.385.000	369.287.438	99,97
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.326.341.705	10.052.421.705	9.597.812.304	95,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.226.439.505	9.976.439.505	9.521.920.473	95,44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99.902.200	75.982.200	75.891.831	99,88
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.892.000	128.214.000	127.871.844	99,73
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.892.000	128.214.000	127.871.844	99,73
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.416.800	633.036.800	627.033.722	99,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.416.800	633.036.800	627.033.722	99,05
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.535.400	3.060.298.400	3.016.836.437	98,31
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.629.400	2.523.222.400	2.480.468.917	98,31
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB	578.906.000	537.076.000	536.367.520	99,87

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	351.396.000	1.675.280.000	399.494.402	23,85
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	349.884.000	2.812.168.000	736.225.798	26,18
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	298.720.000	102.154.000	101.996.900	99,85
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.708.119.000	5.542.965.000	5.440.125.979	98,14
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.024.429.000	4.130.936.500	4.076.805.113	98,69
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	960.023.000	4.088.637.500	4.034.546.313	98,68

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.258.000	27.258.000	27.203.972	99,80
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	915.765.000	4.061.379.500	4.007.342.341	98,67
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	64.406.000	42.299.000	42.258.800	99,90
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	64.406.000	42.299.000	42.258.800	99,90
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.432.088.000	1.296.964.500	1.259.117.472	96,26
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.920.518.000	998.134.000	960.789.900	96,26

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.920.518.000	998.134.000	960.789.900	96,26
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	421.094.000	243.025.500	242.525.672	99,79
	Pengembangan Layanan Pengujian	259.258.000	179.934.500	179.590.872	99,81
	Pemantauan Mutu Produk	95.299.000	18.084.000	18.060.400	99,87
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	66.537.000	45.007.000	44.874.400	99,71
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90.476.000	55.805.000	55.801.900	99,99
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	90.476.000	55.805.000	55.801.900	99,99

Tabel. 3.28. Realisasi Anggaran Setiap Sasaran Strategis Mengacu pada Renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.071.294.305	32.773.206.805	28.806.278.960	87,90
Meningkatnya Koperasi Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.363.175.305	22.640.639.805	22.128.435.881	97,74
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	257.664.000	134.337.500	132.420.375	98,57
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.559.000	121.284.000	121.129.301	99,87
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.777.000	53.125.000	53.064.636	99,89
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.280.412.305	14.634.756.305	14.129.320.729	96,55
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.226.400	760.785.400	759.766.422	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	381.369.400	391.400.400	390.478.984	99,76
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.857.000	369.385.000	369.287.438	99,97
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.326.341.705	10.052.421.705	9.597.812.304	95,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.226.439.505	9.976.439.505	9.521.920.473	95,44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99.902.200	75.982.200	75.891.831	99,88
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.892.000	128.214.000	127.871.844	99,73
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.892.000	128.214.000	127.871.844	99,73

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.416.800	633.036.800	627.033.722	99,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.416.800	633.036.800	627.033.722	99,05
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.535.400	3.060.298.400	3.016.836.437	98,31
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.351.629.400	2.523.222.400	2.480.468.917	98,31
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB	578.906.000	537.076.000	536.367.520	99,87
Peningkatan UMKM Naik Kelas	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	339.772.000	46.146.000	45.826.652	99,31
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	339.772.000	46.146.000	45.826.652	99,31
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	297.548.000	46.146.000	45.826.652	99,31
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	42.224.000	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	742.991.000	7.650.991.000	7.646.674.188	99,94
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan Teknologi IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.000.000.000	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	351.396.000	1.675.280.000	399.494.402	23,85

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	349.884.000	2.812.168.000	736.225.798	26,18
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	298.720.000	102.154.000	101.996.900	99,85
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.708.119.000	5.542.965.000	5.440.125.979	98,14
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.550.000	23.550.000	23.405.540	99,39
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.024.429.000	4.130.936.500	4.076.805.113	98,69
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	960.023.000	4.088.637.500	4.034.546.313	98,68
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.258.000	27.258.000	27.203.972	99,80
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	915.765.000	4.061.379.500	4.007.342.341	98,67
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	64.406.000	42.299.000	42.258.800	99,90

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2025	Total Pagu Setelah Perubahan 2025	Realisasi	% Realisasi
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	64.406.000	42.299.000	42.258.800	99,90
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	228.052.000	91.514.000	80.797.854	88,29
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.432.088.000	1.296.964.500	1.259.117.472	96,26
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.920.518.000	998.134.000	960.789.900	96,26
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.920.518.000	998.134.000	960.789.900	96,26
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	421.094.000	243.025.500	242.525.672	99,79
	Pengembangan Layanan Pengujian	259.258.000	179.934.500	179.590.872	99,81
	Pemantauan Mutu Produk	95.299.000	18.084.000	18.060.400	99,87
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	66.537.000	45.007.000	44.874.400	99,71
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	90.476.000	55.805.000	55.801.900	99,99
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	90.476.000	55.805.000	55.801.900	99,99

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Keuangan (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	100	100	100	4.658.316.800	4.607.400.256	98,91
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	100	100	100	308.746.500	306.614.312	99,31
	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	100	100	7.697.137.000	7.692.500.840	99,94
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	100	29,52	29,52	4.589.602.000	1.237.717.100	26,97
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	100	97,63	97,63	5.542.965.000	5.440.125.979	98,14
Dana APBD					22.796.767.300	19.284.358.487	84,59
Jumlah Belanja Barang & Jasa					22.796.767.300	19.284.358.487	84,59
Belanja Pegawai					9.976.439.505	9.521.920.473	95,44
Total Belanja					32.773.206.805	28.806.278.960	87,90

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja mengacu pada Renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Keuangan (%)
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	100	100	100	4.967.063.300	4.914.014.568	98,93
Peningkatan UMKM Naik Kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	100	100	100	7.697.137.000	7.692.500.840	99,94
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	100	100	100	102.154.000	101.996.900	99,85

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Keuangan (%)
Teknologi IKM	Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	100	28,69	28,69	4.487.448.000	1.135.720.200	25,31
Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	100	100	100	4.130.936.500	4.076.805.113	98,69
	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	95,27	95,27	115.064.000	104.203.394	90,56
	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	100	100	100	1.053.939.000	1.016.591.800	96,46
	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	100	100	100	243.025.500	242.525.672	99,79
Dana APBD					22.796.767.300	19.284.358.487	84,59
Jumlah Belanja Barang & Jasa					22.796.767.300	19.284.358.487	84,59
Belanja Pegawai					9.976.439.505	9.521.920.473	95,44
Total Belanja					32.773.206.805	28.806.278.960	87,9

* Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan capaian sasaran strategis yang telah diraih selama periode Renstra 2023–2026, sekaligus meninjau kesesuaian program dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan program, dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hasil capaian kinerja tersebut menjadi dasar evaluasi dan perencanaan tindak lanjut, guna memastikan kesinambungan, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian - uraian yang disampaikan diperoleh bahwa kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo di Tahun 2025 dapat dilihat dari capaian sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja I : Nilai SAKIP

Alokasi anggaran setelah perubahan untuk upaya pencapaian IKU I ini sebesar Rp. 14.634.756.305,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.129.320.729 ,- atau sebesar 98,91 % keuangan dan tingkat efisiensi 1,09%, Target kinerja 100 % dan capaian 100 %.

Realisasi indikator Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan “Nilai Sakib” tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik), menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Capaian ini didukung oleh perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja serta meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan pelaporan, meskipun masih terdapat

ruang perbaikan pada penguatan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi dan pemanfaatan hasil evaluasi. Untuk peningkatan kinerja, telah dilakukan penguatan pembinaan SAKIP, penyempurnaan indikator kinerja berorientasi hasil, dan peningkatan kapasitas aparatur guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)

Indikator Kinerja II : Jumlah Koperasi Berkualitas

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU II ini sebesar Rp. 308.746.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 306.614.312,- atau sebesar 99,31 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,69 %. Target kinerja 100 % (22 koperasi) dan capaian 100%. Capaian ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas koperasi binaan, namun masih terdapat sebagian koperasi yang belum memenuhi seluruh kriteria koperasi berkualitas sesuai ketentuan.

Upaya peningkatan jumlah koperasi berkualitas dilakukan melalui pendampingan intensif bagi koperasi binaan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi melalui pelatihan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan dan tata kelola, mempercepat pemenuhan kriteria koperasi berkualitas, dan mendorong pencapaian target pada periode berikutnya.

3. Indikator Kinerja III : Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU III ini sebesar Rp. 7.697.137.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.692.500.840,- atau sebesar 99,94% keuangan dan tingkat efisiensi 0,06%. Target kinerja 100 % dan capaian 100%.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah UKM berdaya saing antara lain dengan memperluas pendampingan intensif bagi pelaku usaha, memfasilitasi pemenuhan legalitas dan sertifikasi produk, serta meningkatkan akses pemasaran melalui kemitraan strategis dan promosi produk. Selain itu, penguatan kapasitas dalam manajemen usaha, inovasi produk, dan digitalisasi juga menjadi langkah penting untuk mendorong UKM mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

4. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)

Indikator Kinerja III : Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU IV ini sebesar Rp. 4.589.602.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.237.717.100,- atau sebesar 26,97 % keuangan dan tingkat efisiensi 2,55%. Target kinerja 100% dan capaian 29,52%

Langkah strategis untuk peningkatan IKM meliputi peningkatan efektivitas pendampingan, penguatan kapasitas produksi melalui fasilitasi bantuan bagi IKM, serta pemenuhan legalitas (sertifikat halal) dan pengembangan kualitas produk. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja, perlu dilakukan penguatan basis data IKM, penajaman sasaran pembinaan, peningkatan kualitas pendampingan, dan perluasan akses pasar agar IKM serta Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas melalui pemanfaatan potensi bahan baku lokal agar dapat tumbuh lebih kompetitif dan berdaya saing.

5. Meningkatnya nilai ekspor (USD)

Indikator Kinerja V : Jumlah Nilai Ekspor

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU V ini sebesar Rp. 5.542.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.440.125.979,- atau sebesar 98,14 % keuangan dan tingkat efisiensi 1,86 %. Target kinerja 100% dan capaian 100%.

Upaya peningkatan nilai ekspor dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produk ekspor guna memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten, perluasan akses pasar melalui promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak dan identifikasi produk unggulan potensi eksport. Selain itu, keberlanjutan kinerja didukung dengan fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yang membina UMKM, keikutsertaan dalam penyelenggaraan misi dagang untuk membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi produk di pasar internasional. Hal ini juga membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk.

Berdasarkan Sasaran Strategis pada Renstra 2025 – 2029 :|

1. Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator : Persentase Koperasi Aktif

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 14.943.502.805,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.435.935.041,- atau sebesar 98,93 % keuangan dan tingkat efisiensi 7,81 %.

Upaya peningkatan koperasi aktif dapat dilakukan melalui penguatan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan aspek kelembagaan dan tata kelola seperti pelaksanaan RAT tepat waktu, kelengkapan administrasi, dan transparansi pengelolaan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengelola koperasi dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha dan keuangan.

Untuk selanjutnya Pemerintah akan mendorong pengembangan usaha koperasi melalui fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan, serta perluasan pasar, disertai dengan pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan koperasi tetap beroperasi secara aktif. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi turut menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi secara berkelanjutan.

2. Peningkatan UMKM Naik Kelas

Indikator : Persentase UMKM Naik Kelas

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 7.697.137.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.692.500.840,- atau sebesar 99,94 % keuangan dan tingkat efisiensi -59,94 %.

Upaya peningkatan UMKM naik kelas melalui pemberian bantuan stimulan bagi UMKM untuk mendukung penguatan usaha dan pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas SDM melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, perusahaan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna mendorong legalitas usaha.

Namun demikian, upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian indikator UMKM naik kelas secara optimal, karena masih terbatas pada aspek dasar penguatan usaha dan belum menyentuh secara menyeluruh pada peningkatan skala usaha, akses pasar yang lebih luas, standarisasi produk, serta daya saing yang berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan penguatan intervensi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar UMKM tidak hanya terbantu secara administratif dan kapasitas dasar, tetapi juga mampu berkembang naik kelas secara nyata

3. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM

Indikator :

a. Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 102.154.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 101.996.900,- atau sebesar 99,85 % keuangan dan tingkat efisiensi 316,84 %.

Upaya yang dilakukan adalah pendampingan penyusunan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pendampingan ini mencakup fasilitasi penyusunan dokumen; Melalui pendampingan ini, diharapkan kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan industri yang lebih berkualitas, terarah, dan implementatif, sehingga mampu mendorong pengembangan IKM secara berkelanjutan dan berdaya saing.

b. Persentase IKM yang di fasilitasi stimulan

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 4.487.448.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.135.720.200,- atau sebesar 25,31 % keuangan dan tingkat efisiensi 1744,69 %.

Upaya peningkatan Persentase IKM yang difasilitasi stimulan pada tahun 2025 dilakukan melalui penyaluran bantuan stimulan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar produksi IKM, seperti peralatan, rumah produksi. Fasilitasi ini didahului dengan proses identifikasi dan verifikasi calon penerima agar bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan usaha.

Selain itu, dilakukan pendampingan kepada IKM penerima dalam pemanfaatan bantuan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi dengan program fasilitasi Halal, kemasan.

Meskipun demikian, terdapat sebagian bantuan yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang agar seluruh alokasi bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat waktu.

4. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Indikator :

- a. Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 4.130.936.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.076.805.113,- atau sebesar 98,69 % keuangan dan tingkat efisiensi 19901,31 %.

Upaya peningkatan Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada tahun 2025 dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada momen strategis, seperti hari besar keagamaan dan periode rawan inflasi. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pemantauan harga dan stok secara rutin di pasar, distribusi barang, serta koordinasi intensif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merespons secara cepat potensi gejolak harga. Pemerintah daerah juga memfasilitasi kelancaran distribusi dan kerja sama antar daerah guna menjamin pasokan tetap terjaga.

Upaya ini didukung dengan penguatan sinergi lintas sektor serta intervensi yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

- b. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 115.064.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.203.394,- atau sebesar 90,56 % keuangan dan tingkat efisiensi 403,94 %.

Upaya peningkatan Persentase Peningkatan Nilai Ekspor pada tahun 2025 dilakukan melalui fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah melalui kegiatan Misi dagang ke Kota Samarinda, untuk membangun kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama di bidang perdagangan Sapi. Yang di tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama Tentang Kerja Sama Pemberdayaan Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan antara Dinas Kumperindang Provinsi Gorontalo dengan Dinas PERINDAG, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur serta pelaksanaan Kegiatan misi dagang dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 20 (dua Puluh) pelaku usaha

- c. Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 1.053.939.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.016.591.800,- atau sebesar 96,46 % keuangan dan tingkat efisiensi 8,8 %.

Upaya peningkatan Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi fungsi BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, efektif melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. BPSK secara aktif menangani dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan guna mendorong pemahaman konsumen terhadap hak dan mekanisme pengaduan.

d. Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian ini sebesar Rp. 243.025.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.525.672,- atau sebesar 99,79 % keuangan dan tingkat efisiensi 30,86 %.

Upaya peningkatan Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi pada tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi peran UPTD BPSMB dalam penyediaan layanan pengujian yang sesuai standar akreditasi, pengujian komoditi sesuai standar, pengambilan sampel, uji banding antar laboratorium, Pelaksanaan Kegiatan *Inhouse Training* (IHT) ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Penerapan Sistem Manajemen Mutu melalui Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal dan Kaji Ulang Dokumen.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. Capaian indikator kinerja menunjukkan adanya kemajuan yang positif, meskipun masih dijumpai beberapa kendala dan keterbatasan, kapasitas pelaku usaha, keterbatasan dukungan anggaran dibandingkan dengan luasnya cakupan sasaran layanan, belum optimalnya kualitas dan pemutakhiran data pelaku usaha, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pencapaian target indikator program/kegiatan/sub kegiatan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan sinergi

program dengan pemangku kepentingan terkait masih perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang objektif untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government). Seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi akan ditindaklanjuti melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di masa mendatang, dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Gorontalo, Maret 2026
Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo



Fayzal Lamakaraka, S.STP, M.M

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197707151996121001